

Sukses Jakarta untuk Indonesia



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 51011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

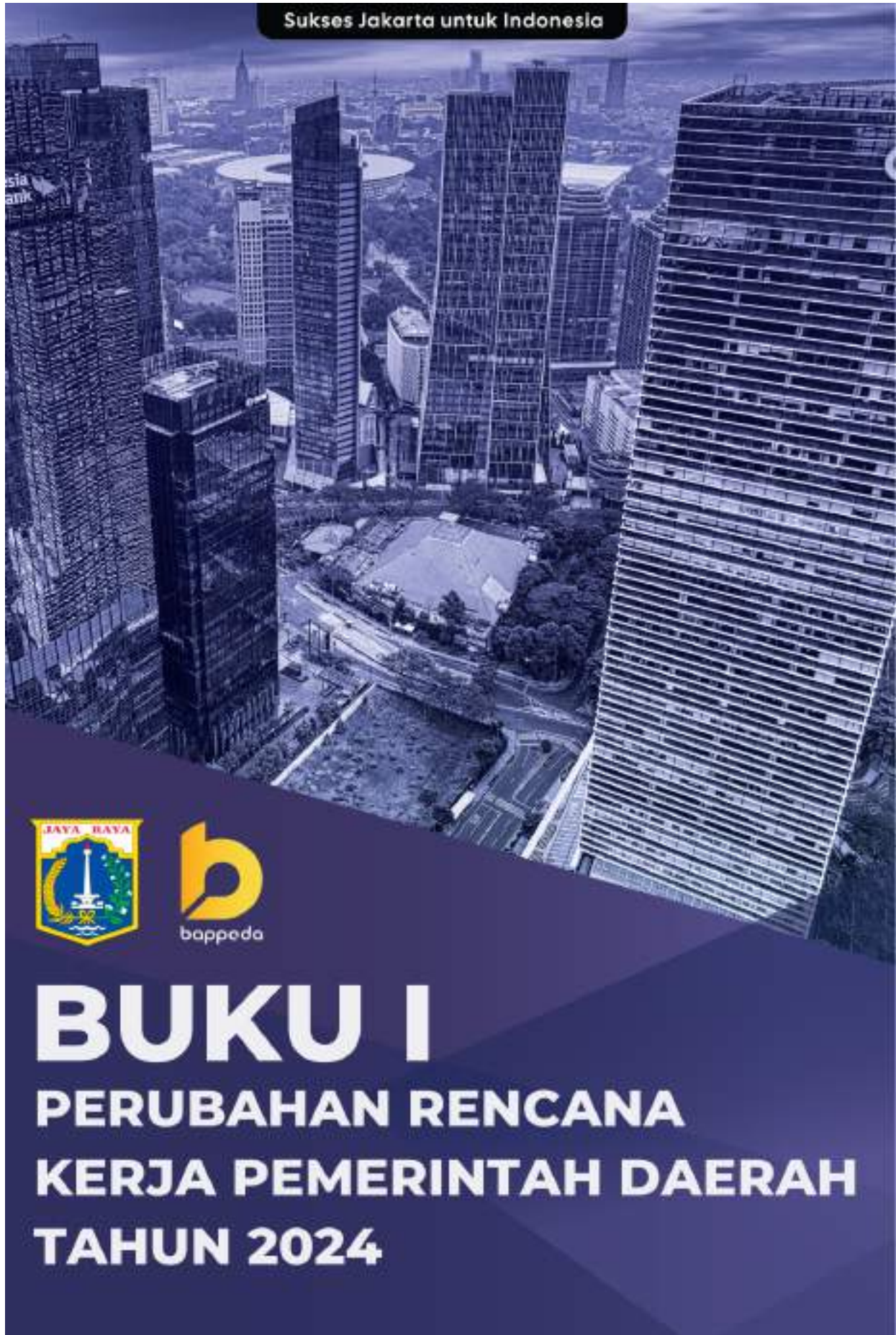
LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i-1

DAFTAR TABEL..... i-3

DAFTAR GAMBAR i-4

DAFTAR GRAFIK..... i-5

DAFTAR i-6

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar Belakang I-2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-7

1.4 Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024 ... II-1

2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024..... II-2

2.1.1 Tujuan dan Sasaran I..... II-3

2.1.2 Tujuan dan Sasaran II..... II-6

2.1.3 Tujuan dan Sasaran III..... II-8

2.1.4 Tujuan dan Sasaran IV II-10

2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024..... II-13

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-2

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global III-2

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional..... III-5

3.1.3 Kondisi, Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah..... III-9

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-17

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-17

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-23

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-3

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-3

4.1.2 Pembangunan Rendah Karbon IV-5

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 IV-8

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024 IV-19

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024..... IV-19

4.2.2 Isu Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta IV-23

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-42

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... IV-44

4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi
DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024..... IV-54

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah..... IV-70

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah V-2

5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah..... V-2

5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah V-37

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran I Pembangunan Daerah Tahun 2024..... II-5

Tabel 2.2 Capaian Tujuan dan Sasaran II Pembangunan Daerah Tahun 2024..... II-7

Tabel 2.3 Capaian Tujuan dan Sasaran III Pembangunan Daerah Tahun 2024..... II-9

Tabel 2.4 Capaian Tujuan dan Sasaran IV Pembangunan Daerah Tahun 2024 II-12

Tabel 2.5 Skala Nilai Peringkat Kerja II-13

Tabel 2.6 Capaian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2024 II-14

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global..... III-3

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran III-5

Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha III-5

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional..... III-8

Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran..... III-9

Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha III-11

Tabel 3.7 Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... III-22

Tabel 3.8 Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 III-24

Tabel 3.9 Perubahan Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 III-26

Tabel 3.10 Ringkasan Perubahan RKPD Tahun 2024..... III-27

Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.. IV-14

Tabel 4.2 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ... IV-23

Tabel 4.3 Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... IV-33

Tabel 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024..... IV-42

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 IV-44

Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 IV-55

Tabel 4.7 Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 IV-56

Tabel 4.8 Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2024 IV-58

Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2024..... V-3

Tabel 5.2 Rekapitulasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024..... V-37

Tabel 5.3 Rekapitulasi Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024..... V-37

Tabel 5.4 Rekapitulasi Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 V-37

Tabel 5.5 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024 V-38

Tabel 5.6 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024..... V-38

Tabel 5.7 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Bina Marga Tahun 2024..... V-38

Tabel 5.8 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024 V-39

Tabel 5.9 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Tahun 2024 V-39

Tabel 5.10 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 V-39

Tabel 5.11 Rekapitulasi Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 V-40

Tabel 5.12 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 V-40

Tabel 5.13 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 V-40

Tabel 5.14 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Tahun 2024 V-41

Tabel 5.15 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Tahun 2024 V-41

Tabel 5.16 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Tahun 2024 V-41

Tabel 5.17 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024..... V-42

Tabel 5.18 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024 V-42

Tabel 5.19 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 V-42

Tabel 5.20 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Tahun 2024 V-43

Tabel 5.21 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 V-43

Tabel 5.22 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 V-43

Tabel 5.23 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2024..... V-44

Tabel 5.24 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 V-44

Tabel 5.25 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024.... V-44

Tabel 5.26 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 V-45

Tabel 5.27 Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2024..... V-45

Tabel 5.28 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2024 V-45

Tabel 5.29 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 .. V-46

Tabel 5.30 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 V-46

Tabel 5.31 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024 V-46

Tabel 5.32 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pembinaan BUMD Tahun 2024..... V-47

Tabel 5.33 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2024 V-47

Tabel 5.34 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024 V-47

Tabel 5.35 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024..... V-48

Tabel 5.36 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024 V-48

Tabel 5.37 Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 V-48

Tabel 5.38 Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024..... V-49

Tabel 5.39 Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 V-49

Tabel 5.40 Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 V-49

Tabel 5.41 Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024..... V-50

Tabel 5.42 Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024..... V-50

Tabel 5.43 Rekapitulasi Perubahan Renja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tahun 2024 V-50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024..... III-7

Gambar 3.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024..... III-8

Gambar 4.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan IV-2

Gambar 4.2 Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta IV-6

Gambar 4.3 Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 IV-9

Gambar 4.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024..... IV-19

Gambar 4.5 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 IV-20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Inflasi Global III-4

Grafik 3.2 Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah III-4

Grafik 3.3 Inflasi Nasional..... III-7

Grafik 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta III-9

Grafik 3.5 Inflasi Nasional dan DKI Jakarta III-12

Grafik 3.6 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta..... III-13

Grafik 3.7 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta III-15

DAFTAR SINGKATAN

A

ABK	: Analisis Beban Kerja
ACI	: <i>Asia Competitiveness Institute</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
Adm.	: Administrasi
AHH	: Angka Harapan Hidup
AIIB	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
AKB	: Adaptasi Kebiasaan Baru
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
AMH	: Angka Melek Huruf
AMPK	: Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
AVG	: <i>Average</i>

B

Bakesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Dikmental	: Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Biro Kesos	: Biro Kesejahteraan Sosial
Biro KSD	: Biro Kerja Sama Daerah
Biro ORB	: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Perkeu	: Biro Perekonomian dan Keuangan
Biro PLH	: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Biro Umum dan ASD	: Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BP	: Bukan Pekerja
BPAD	: Badan Pengelolaan Aset Daerah
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPBUMD	: Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan
BPKD	: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BPPBJ	: Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Perindustrian.
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPS	: Badan Pengelolaan Sampah
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BBC	: <i>British Broadcasting Corporation</i>
BBPP	: Bantuan Biaya Personal Pendidikan
BMD	: Barang Milik Daerah
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun

C

CHSE	: <i>Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability</i>
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil

CRM	: Cepat Respon Masyarakat	DRPLN-JM	: Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>		
D		DRPPLN	: Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri
DAS	: Daerah Aliran Sungai	F	
DAK	: Dana Alokasi Khusus	FISIM	: <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured</i>
DBM	: Dinas Bina Marga	G	
Dinas CKTRP	: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
Dinas Dukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	GNPIP	: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
Dinas Gulkarmat	: Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	GRK	: Gas Rumah Kaca
Dinas KPKP	: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	H	
Dinas Parekraf	: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	HAM	: Hak Asasi Manusia
Dinas PMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HKBN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
Dinas PPAPP	: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
Dinas PPKUKM	: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	HLS	: Harapan Lama Sekolah
		I	
Dinas PRKP	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IDP	: Indeks Dimensi Pendidikan
Dinas SDA	: Dinas Sumber Daya Air	IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
Dinas TKTE	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	IKE	: Indeks Kondisi Ekonomi
Disbud	: Dinas Kebudayaan	IKK	: Indeks Keyakinan Konsumen
Dishub	: Dinas Perhubungan	IKLH	: Indeks Kota Layak Huni
Diskominfotik	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Dispora	: Dinas Pemuda dan Olahraga	IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Dispusip	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IKN	: Ibu Kota Negara
Distamhut	: Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	IKS	: Indeks Keluarga Sehat
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup	IKU	: Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Inmendagri	: Instruksi Menteri Dalam Negeri
DK	: Daftar Kegiatan	IPG	: Indeks Pembangunan Gender
		IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
		IPPR	: Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang

IRB	: Indeks Risiko Bencana	KP	: Kegiatan Prioritas
IRB	: Indeks Reformasi Birokras	KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
J		KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakbar	: Jakarta Barat	KPSS	: Keamanan Pangan Siap Saji
JaKi	: Jakarta Kini	KRISNA	: Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
Jakpus	: Jakarta Pusat	KS	: Keluarga Sejahtera
Jaksel	: Jakarta Selatan	KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Jaktim	: Jakarta Timur	KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Jakut	: Jakarta Utara	KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
JCC	: <i>Jakarta Convention Centre</i>	K/L	: Kementerian/Lembaga
JDCN	: <i>Jakarta Development Collaboration Network</i>	L	
JEDI	: <i>Jakarta Emerge Dredging Initiative</i>	LMK	: Lembaga Musyawarah Kelurahan
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>	LKB	: Lembaga Keuangan Bank
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional	LKBB	: Lembaga Keuangan Bukai Bank
JSDP	: <i>Jakarta Sewerage Development Project</i>	LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
K		LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kab.	: Kabupaten	LPP	: Laju Pertumbuhan Penduduk
KASN	: Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara	LRT	: <i>Light Rail Transit</i>
KB	: Keluarga Berencana	LU	: Lapangan Usaha
Kehati	: Keanekaragaman Hayati	M	
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri	Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	MICE	: <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions</i>
KemenPAN-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Monev	: Monitoring Evaluasi
Kep.	: Kepulauan	MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
Kepgub	: Keputusan Gubernur	Musrenbang	: Musyawarah Perencanaar Pembangunan
Kepmendagri	: Keputusan Menteri Dalam Negeri	N	
KIA	: Kartu Indentitas Anak	NTB	: Nilai Tambah Bruto
KJP	: Kartu Jakarta Pintar	NaTaRu	: Natal dan Tahun Baru
KLA	: Kabupaten/Kota Layak Anak	NCICD	: <i>National Capital Integrated Coastal Development</i>
KLB	: Koefisien Lantai Bangunar		
KOICA	: <i>Korean Internasional Cooperation Agency</i>		
KORPRI	: Korps Pegawai Republik Indonesia		

O

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

OSS : *Online Single Submission*

P

PBI : Penerima Bantuan Iuran

PBIJK : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

PBG : Persetujuan Bangunan Gedung

PBPU : Peserta Bukan Penerima Upah

PD : Perangkat Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PDB : Pendapatan Domestik Bruto

Pemda : Pemerintah Daerah

Pemilu : Pemilihan Umum

Perda : Peraturan Daerah

Pergub : Peraturan Gubernur

Perkada : Peraturan Kepala Daerah

Permen : Peraturan Menteri

Permendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri

Perpres : Peraturan Presiden

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya

PKLNPRT : Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga

PKT : Pengembangan Kewirausahaan Terpadu

PMA : Penanaman Modal Asing

PMI : *Purchasing Managers Index*

PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara

PPKM : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PPKS : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP : Peraturan Pemerintah

PPH : Pola Pangan Harapan

PPP : Pengeluaran per Kapita Penduduk

PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

PPSU : Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

ProP : Proyek Prioritas

PSK : Pekerja Seks Komersial

PSM : Pekerja Sosial Masyarakat

PUSPA : Pusat Pelayanan Keluarga

PZ : Peraturan Zonasi

R

RAD : Rencana Aksi Daerah

Rakortek : Rapat Koordinasi Teknis

RAN : Rencana Aksi Nasional

RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah

RBA : *Risk Based Approached*

RDTR : Rencana Detail Tata Ruang

Renja : Rencana Kerja

Renstra : Rencana Strategis

RKA : Rencana Kerja dan Anggaran

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKP : Rencana Kerja Pemerintah

RLS : Rata-Rata Lama Sekolah

RPD : Rencana Pembangunan Daerah

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPPLN	: Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri	STBM	: Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat
RPRKD	: Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah	SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
RPTRA	: Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	T	
RT	: Rumah Tangga		
RTB	: Ruang Terbuka Biru		TDM : <i>Transportation Demand Management</i>
RTH	: Ruang Terbuka Hijau		THIS : Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah		TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
S			TKD : Transfer ke Daerah
	SAP : Standar Akuntansi Pemerintah	TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
	Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja	TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	SDG's : <i>Sustainable Development Goals</i>	TPK	: Tingkat Penghunian Kama
	SDA : Sumber Daya Alam	TPS	: Tempat Penampungan Sementara
	SDM : Sumber Daya Manusia	TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	TPU	: Tempat Pemakaman Umum
SIPJM	: Sistem Informasi Perencanaan Jangka Menengah	TSLDU	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha
SI-RPD	: Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah	TW	: Triwulan
SK	: Surat Keputusan	U	
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah		
SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Resources Availability, Times</i>		UHH : Umur Harapan Hidup
SOP	: <i>Standarad Operating Procedure</i>		UKBM : Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum		UKPD : Unit Kerja Perangkat Daerah
SPB	: <i>Smart Planning Budgeting</i>		UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	UU	: Undang-Undang
SPM	: Standar Pelayanan Minimal	UUD	: Undang-Undang Dasar
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	W	
			WB : <i>World Bank</i>
			WHO : <i>World Health Organization</i>
		WTP	: <i>World Health Organization</i>



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang terdiri atas latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika baik global, nasional, maupun regional. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas seperti perang Rusia Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta konflik Israel-Palestina memberikan dampak bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ketegangan geopolitik tersebut telah menyebabkan harga minyak dunia mengalami pelonjakan yang cukup besar yang memicu terjadinya krisis pangan energi, kenaikan suku bunga, dan terhambatnya arus logistik.

Selain itu, ketegangan geopolitik sebagaimana dimaksud juga berimbas pada keterlambatan infrastruktur yang berisiko secara langsung terhadap stabilitas pasar dan komoditas, distribusi kebutuhan pangan dan non-pangan hingga perdagangan secara umum. Hal tersebut dikarenakan konflik bersenjata menjadikan negara-negara yang selama ini menjadi pemasok kebutuhan pangan maupun non-pangan berpotensi menunda bahkan memutus pasokan ekspor dan impor-nya. Bagi negara seperti Indonesia sendiri yang beberapa kebutuhan hariannya masih tergantung pada impor/ pasar internasional, konflik bersenjata telah memberikan dampak langsung, seperti kenaikan harga pangan dan energi. Sebagaimana dikutip dalam laman berita kompas.com, Indonesia telah mengalami kenaikan harga pangan dikarenakan harga pupuk dan gandum yang merupakan bahan pokok tepung terigu semakin meningkat.

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan I 2024 tetap kuat dan membaik, terlihat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Sejalan dengan nasional, ketegangan geopolitik juga memberikan dampak tersendiri bagi daerah-daerah di Indonesia, tidak terkecuali DKI Jakarta. Walaupun demikian, kinerja pembangunan daerah dan ekonomi DKI Jakarta sampai dengan triwulan I 2024 juga menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global.

Di samping kinerja pembangunan dan perekonomian yang baik, masih terdapat

sejumlah faktor risiko yang memberi dampak pada tertahannya kinerja dan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, yaitu:

- a. Implikasi perpindahan Ibu Kota Negara Baru
Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdampak kepada perubahan status dan kedudukan DKI Jakarta, dimana Jakarta diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global (Jakarta sebagai Kota Global).
- b. Arus Urbanisasi
DKI Jakarta masuk ke dalam 70 kota teratas dunia dengan kepadatan penduduk tertinggi, dan jumlah pendatang ke DKI Jakarta mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada 2020 terdapat 113.814 orang, pada 2021 terdapat 139.740 orang dan pada 2022 terdapat 151.752 orang.
- c. Aglomerasi
Aglomerasi megalopolis Banten-Jakarta-Jawa Barat diperkirakan akan mencapai 100 juta penduduk di tahun 2045, dan Jakarta akan menjadi pusat aglomerasi megapolitan Jakarta-Bandung.
- d. Disrupsi Teknologi
Munculnya teknologi baru dapat memiliki dampak yang masif dan berbeda dari sebelumnya, DKI Jakarta perlu beradaptasi dengan cepat agar dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- e. Daya Saing
DKI Jakarta diharapkan dapat memiliki high value added dan daya saing yang tinggi, mengingat saat ini DKI Jakarta sudah menjadi bagian dari kota global. Selain itu, masih kurangnya daya tarik iklim investasi dan bisnis bagi perusahaan internasional di DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan kota-kota besar di Asia Tenggara.
- f. Perubahan Iklim
Dampak dari banjir, polusi udara, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, dan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca.

Dengan adanya perkembangan kondisi tahun berjalan serta hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II

2024, maka perlu dilakukan upaya akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD 2023 - 2026. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 melakukan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sesuai dengan amanat pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Penyusunan perubahan RKPD ini juga dilakukan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diarahkan untuk keberlanjutan pelaksanaan tema pembangunan dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yaitu

“Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia”. Tema tersebut memiliki makna bahwa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diarahkan untuk bertransformasi untuk mencapai Jakarta yang tangguh untuk melalui berbagai krisis atau tantangan yang terjadi, baik ekonomi, sosial, hingga bencana (alam dan non-alam), Jakarta yang dapat menjadi kota berdaya saing global, dan Jakarta yang berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak dalam setiap pembangunannya.

Dalam rangka mengimplementasikan tema pembangunan tersebut, pembangunan Jakarta tahun 2024 dirumuskan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan nilai demokrasi. Tema pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 meliputi tahapan yaitu (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - n. 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - o. Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 - p. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142);
 - q. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
 - r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
 - s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 - v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - x. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - y. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - z. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 187);
 - aa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - bb. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 - cc. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
 - dd. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
 - ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - oo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - pp. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
 - qq. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
 - rr. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 - ss. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
 - tt. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 53012);
 - uu. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013);
 - vv. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 63003);
 - ww. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 51006);
 - xx. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027);
 - yy. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 62009).

- zz. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- aaa. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 168 Tahun 2024 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimaksudkan sebagai:
- a. Arah pembangunan tahunan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024;

b. Pedoman bagi para pemangku kepentingan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan tahun 2024 dengan perkembangan kondisi pada tahun 2024;

c. Acuan dalam pelaksanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan perkembangan kondisi pada tahun 2024.

d. Instrumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai kendali penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah di tahun 2025.
- Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah:
- a. Menyediakan arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan tahun 2024 disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada tahun 2024;

b. Menjadi landasan dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan

c. Menyediakan acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024

2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bagian ini dijelaskan mengenai evaluasi terhadap kebijakan RKPD Tahun 2024 yang meliputi evaluasi kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, serta evaluasi kinerja program pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Pada tahap penyusunan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD tahun berkenaan. Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Lebih lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi yang merupakan proses pemantauan serta supervisi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk memastikan target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara efektif, efisien, serta ekonomis.

Secara umum, evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017, sehingga pengendalian dan evaluasi dalam konteks RKPD dijelaskan ke dalam 3 (tiga) tahapan:

- a. Tahap I: Memastikan bawa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- b. Tahap II: Menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi yang dimulai sejak tahap penyusunan RKA PD dan Raperda APBD sampai dengan penetapan Perda/Pergub APBD.
- c. Tahap III: Memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan

prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud, Bappeda Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan data pengukuran kinerja dan anggaran yang ada pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, dimana Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan penginputan data realisasi kinerja dan anggaran pada aplikasi sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja.

Kebenaran data pada data yang diinput dan/atau divalidasi pada sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja merupakan tanggung jawab mutlak dari pejabat pengampu kinerja, atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan. Aplikasi tersebut dikelola oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024 merupakan data yang bersumber dari sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja berdasarkan capaian triwulan II tahun 2024. Mengingat sistem informasi monev kinerja juga digunakan untuk pengelolaan data perjanjian kinerja dan pada target kinerja perjanjian kinerja dapat berbeda dengan target pada dokumen rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya Pergub 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa indikator kinerja utama harus memiliki prinsip SMART-C.

2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024

Pada hakekatnya, tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, dalam peraturan yang sama disebutkan juga bahwa tujuan dan sasaran

jangka menengah daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. RPD Provinsi DKI Jakarta tahun

2023-2026 dirumuskan mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan 6 (enam) isu-isu strategis 2023-2026 4 (empat) dimensi fokus perencanaan yaitu *built environment* (lingkungan bangun), *economic* (dimensi perekonomian), *human* (dimensi manusia) dan *governance* (dimensi pemerintahan). Ke-empat fokus perencanaan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 sasaran.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran I

Tujuan Pertama: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kota Layak Huni (Most Livable City Index). Studi Most Livable City Index (MLCI) dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dengan mengukur persepsi warga tentang prinsip-prinsip Kota Layak Huni yaitu:

- a. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik);
- b. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan);
- c. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat;
- d. Keamanan;
- e. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota; dan
- f. Sanitasi.

Pengukuran MLCI yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) yang menghasilkan dokumen MLCI 2009, 2011, 2014, 2017 dan 2022. Mulai pada tahun 2017, DKI Jakarta berada dalam kelompok top tier city (kota dengan nilai index livability di atas rata-rata).

Tujuan pertama dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

- a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, adalah pemenuhan layanan dasar perkotaan merupakan pengukuran terhadap capaian 3 (tiga) sub indikator layanan dasar perkotaan yaitu:
 - 1. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi;

- 2. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta
- 3. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak.

Adapun Data persentase indikator pemenuhan layanan dasar perkotaan dirilis oleh BPS.

- b. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, adalah Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik. Public transportation mode share adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar prevalensi warga untuk menggunakan transportasi umum dalam bermobilisasi; yang diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk dengan angkutan umum (12 moda) dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu. Data ini dirilis oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- c. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas terdapat 2 (dua), yaitu:
 - 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup. Penghitungan IKLH dilakukan melalui agregasi terhadap empat komponen pembentuk indeks (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut) yang telah dibobot. Bobot dari masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) berdasarkan penilaian pakar. Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 - 2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai baseline-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor

Energi, Limbah, AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use), dan IPPU (Industrial Processes and Product Use). Data indikator ini dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

d. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Indikator untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Pengkajian risiko bencana merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat

suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Hasil pengukuran IRB diterbitkan oleh BNPB.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran I pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.1
Capaian Tujuan dan Sasaran I Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	2024				Keterangan
						Target Indikator	Target TW II	Realisasi Indikator TW II	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6 (2017)	N/A	71	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	68,76 (2021)	77,24	77,24	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
1.2	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	14,76 (2021)	18,86	20,97	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,43 (2021)	54,57	55,43	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5 (2022)	25,40	25,40	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
1.4	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,43 (2021)	61,31	59,66	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2024 (diolah)

2.1.2 Tujuan dan Sasaran II

Tujuan Kedua : Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak, dan Pemerataan Kesejahteraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan. Indeks pembangunan ekonomi inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Tujuan kedua dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

- a. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis oleh BPS.
- b. Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja - 15 tahun ke atas). TPT dirilis oleh BPS.
- c. Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran di atas terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh dengan nilai berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 (null) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan bernilai 1 (satu), saat 1 (satu) individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa. Rasio Gini yang dijadikan acuan adalah yang diterbitkan oleh BPS pada bulan September.

- 2. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data yang digunakan adalah yang diterbitkan oleh BPS pada bulan September.
- 3. Tingkat kemiskinan ekstrem merupakan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan internasional dengan pendapatan kurang dari USD \$1,9 pada PPP (Purchasing Power Parity). Data ini diterbitkan oleh BPS.
- d. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi
Indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 (empat) aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator. IDSD diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran II pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.2
Capaian Tujuan dan Sasaran II Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	2024				Keterangan
						Target Indikator	Target TW II	Realisasi Indikator TW II	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18 (2020)	N/A	7,81	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,56 (2021)	4,96	4,8	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51 (2021)	6,53	6,53	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Rasio Gini	Koefisien	0,411 (2021)	0,431	0,41	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
		Tingkat Kemiskinan	Persen	4,67 (2021)	4,44	3,79	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
		Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,37 (2021)	0,57	0,5	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,962 (2021)	3,97	4,01	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2024 (diolah)

2.1.3 Tujuan dan Sasaran III

Tujuan Ketiga: Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia, yang terdiri dari 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (diwakili indikator Angka Harapan Hidup), pengetahuan (diwakili indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (diwakili indikator pengeluaran per kapita). Pengukuran IPM dilakukan dan dirilis oleh BPS.

Tujuan ketiga dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

- a. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Dimensi Pendidikan (IDP). Indeks ini merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dua data tersebut dirilis oleh BPS.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas, terdapat 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
 - 1. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan lama hidup yang dapat dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Angka ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat dan dirilis oleh BPS.
 - 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita. Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur

berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar WHO. Prevalensi stunting diukur pada anak umur 0 sampai 59 bulan, dengan mengkonversi data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ke dalam nilai terstandar(Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita. Data ini dirilis melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau survei lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- c. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut di atas adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Hasil indeks ini diterbitkan BPS setiap tahun.
- d. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah Indeks Demokrasi. Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100 yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. Hasil indeks ini diterbitkan oleh BPS setiap tahun.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran III pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.3
Capaian Tujuan dan Sasaran III Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	2024				Keterangan
						Target Indikator	Target TW II	Realisasi Indikator TW II	Capaian Indikator Tujuan/Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81.11 (2021)	83,55	83,55	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,12 (2021)	12,39	12,16	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,01 (2021)	75,81	75,81	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
		Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,8 (2021)	17,6	13,2	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
3.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94.84 (2021)	95,24	95,14	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
3.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76.07 (2020)	82,13	82,13	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2024 (diolah)

2.1.4 Tujuan dan Sasaran IV

Tujuan Keempat: Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan tersebut di atas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan,
- b. Penguatan pengawasan,
- c. Penguatan akuntabilitas,
- d. Penataan Organisasi,
- e. Penataan tatalaksana,
- f. Penataan manajemen SDM,
- g. Deregulasi Kebijakan,
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian IRB ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB).

Tujuan keempat dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pengukuran IKM Provinsi DKI Jakarta.
- b. Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Pusat

dan Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek, dan 35 indikator sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2018. Hasil pengukuran indeks ini diterbitkan ataupun melalui pendampingan oleh Kementerian PAN-RB.

- c. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut di atas terdapat 2 (dua), yaitu:
 - 1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Besaran hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran ini diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB.
 - 2. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/DPD). Pedoman dan hasil pengukuran SPI diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
- d. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Opini Laporan Keuangan Daerah. Opini ini merupakan pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan.
- e. Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur
Indikator yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut di atas adalah Indeks Sistem Merit. Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada

Instansi Pemerintah dengan dasar hukum yaitu:

- a) Permen PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
- b) Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019

tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian tujuan dan sasaran IV pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.4
Capaian Tujuan dan Sasaran IV Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Realisasi 2023	2024				Keterangan
						Target Indikator	Target TW II	Realisasi Indikator TW II	Capaian Indikator Tujuan/ Sasaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,54 (2020)	82,47	83	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,5 (2021)	91,08	91.08	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,47 (2021)	4,21	4,21	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	80,10 (A) (2021)	81,06 (A)	84 (A)	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	68.70	76,96	75	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP	N/A	N/A	Data belum disampaikan oleh BPK kepada Pemprov DKI Jakarta
4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	310.5 (2021)	335,5	350,5	N/A	N/A	N/A	Target bukan pada TW II

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2024 (diolah)

2.2 Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dilakukan setiap triwulan. Penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi meliputi:

- a. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
- b. Realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Dalam melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, digunakan formulir E.19 dan kriteria Tabel T-E.1. untuk menentukan predikat kinerja. Untuk indikator program yang memiliki target pada triwulan II namun realisasi sebesar 0 (nol) maka dianggap tidak ada realisasi.

Sedangkan indikator program yang tidak memiliki target pada triwulan II maka capaiannya tidak diperhitungkan.

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Capaian	Kategori Capaian
(1)	(2)	(3)
1.	$\geq 100\%$	Mencapai Target
2.	$91\% \leq x < 100\%$	Sangat Tinggi
3.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
4.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
5.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
6.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Berikut ini disajikan evaluasi capaian program pembangunan daerah pada triwulan II tahun 2024 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Capaian Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g jawab									
												I				II													III		IV						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)					
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp				
1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan																																					
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas																																					
1.1	Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/ detik	25.232	TLK	1.267.216.219.655	20.836,36	22.713.617.101	22984	23.540.920.956	-	-	784.620.795	141,94%	-	-	2.253.717.293	170,04%	-	-	-	-	-	TLK	-	3.038.338.088	12,91%	10418,18	25.751.955.189	41,29%	2,03%	Dinas SDA			
	Peningkatan Akses Pengelolaan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/hari	5.636,7	Sum	4.077.009.666.933	2.768,8	382.847.448.021	1370	680.148.129.002	-	-	4.291.641.643	158,57%	-	-	45.946.855.096	34,41%	-	-	-	-	-	TLK	-	50.238.496.739	7,39%	2768,80	433.085.944.760	49,12%	10,62%	Dinas SDA			
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,95	TLK	11.720.001.482.309	1,32	337.103.398.216	1,35	445.206.954.424	-	-	182.960.869	148,64%	-	-	95.969.245.680	15139,82 %	-	-	-	-	-	TLK	-	96.152.206.549	21,60%	0,66	433.255.604.765	33,85%	3,70%	Dinas PRKP			
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	% Penataan dan Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	%	84,88	TLK	1.000.000.000	81,17	*	81,38	*	*	-	-	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	TLK	-	*	*	40,59	*	47,81%	*	Dinas PRKP		
	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan pemukiman	%	100	Sum	12.800.000.000	10	2.544.200.000	20	2.563.377.046	2	100,00%	903.967.500	98,44%	5	100,00%	1.338.315.000	97,28%	-	-	-	-	5	TLK	25,00%	2.242.282.500	87,47%	15,00	4.786.482.500	15,00%	37,39%	Dinas CKTRP			
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	14,19	TLK	3.285.252.066.650	7,227	629.183.555.995	9,67	419.513.849.705	-	-	844.784.499	180,30%	-	-	4.324.830.011	17,11%	-	-	-	-	-	TLK	-	5.169.614.510	1,23%	3,61	634.353.170.505	25,47%	19,31%	Dinas PRKP			
	Optimalisasi Pengurangan dan Peningkatan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/ hari	7.262	TLK	9.806.191.559.491	3159	1.734.993.123.223	2750	-	-	264.078.942.632	156,45%	-	-	653.540.623.770	165,99%	-	-	-	-	-	TLK	-	917.619.566.402	30,98%	1579,50	2.652.612.689.625	21,75%	27,05%	DLH				
				Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	13	TLK		9,06		9,15	114,38%	156,45%		9,59	119,90%	653.540.623.770	165,99%	-	-	-	-	9,59	TLK	106,56%	9,33		71,73%	0,00%								
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit																																					
1.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	4	TLK	12.078.133.565.695	4	1.791.497.540.931	4	1.763.647.067.807	-	-	7.324.681.274	100,00%	3	100,00%	161.470.686.717	529,19%	-	-	-	-	3	TLK	75,00%	168.795.367.991	9,57%	3,50	1.960.292.908.922	87,50%	16,23%	DBM			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
								I				II				III		IV																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp		%K	%Rp
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	4	TLK	73.768.205.803	4	22.743.748.290	4	11.946.862.808	-	-	185.466.141	168,88%	4	100,00%	5.405.278.456	862,99%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	5.590.744.597	46,80%	4,00	28.334.492.887	100,00%	38,41%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	%	90	TLK	369.038.329.755	91,6	97.425.867.794	90	135.660.508.627	-	-	8.700.450.740	122,91%	-	-	23.292.995.160	86,64%	-	-	-	-	-	TLK	-	31.993.445.900	23,58%	45,80	129.419.313.694	50,89%	35,07%	Dinas CKTRP
		1.03.12		Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	%	90	Average	97,5	90	90	100,00%	90	100,00%	-	-	-	-	90	100,00%	-	-	-	-	90	AVG	100,00%	93,75	104,17%						
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang melayani per hari	Penumpang per hari	4.386.163	TLK	4.102.277	3972800	-	-	133,20%	-	-	133,20%	-	-	277.984.168.682	97,15%	-	-	-	-	-	TLK	-	2051138,50	46,76%	5.575.579.727.594	11,57%	Dishub			
				Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	1,3	TLK	48.206.427.176.620	0	5.230.072.323.484	1,49	5.399.180.623.948	0	200,00%	133,20%	0	200,00%	-	-	0	AVG	200,00%	345.507.404.110	6,40%	0,00	200,00%								
				Kecepatan rata-rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan pembatasan lalu lintas pada jam sibuk	km/ jam	29	TLK	26	27	23,51	89,56%	133,20%	26,19	98,80%	-	-	-	-	26,19	TLK	97,00%	26,10	89,98%											
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayanan	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	11	TLK	766.537.504.072	5	222.847.349.623	7	47.336.081.430	5	100,00%	3.336.820.025	117,34%	5	100,00%	8.962.924.762	180,91%	-	-	-	-	5	TLK	71,43%	12.299.744.787	25,98%	5,00	235.147.094.410	45,45%	30,68%	Dishub
				Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	70,47	TLK	766.537.504.072	40	49,52	41,9	100,00%	44,76	100,00%	-	-	-	-	44,76	TLK	90,39%	42,38	60,14%											
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomen dasi	8	Sum	8.088.674.633.538	2	3.078.207.323	2	3.939.602.119	-	-	147.982.403	103,85%	-	-	308.643.268	105,07%	-	-	-	-	-	SUM	-	456.625.671	11,59%	2,00	3.534.832.994	25,00%	0,04%	Dishub
Tercapaiannya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon																																		
1.3	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	%	99	TLK	4.400.734.000.000	100	100.539.160.337	97	943.374.082.609	-	-	3.183.101.350	130,19%	-	-	17.188.464.813	197,12%	-	-	-	-	-	TLK	-	20.371.566.163	2,16%	50,00	120.910.726.500	50,51%	2,75%	Dinas CKTRP
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	Average	13.219.823.723	100	2.402.712.792	100	1.434.537.918	-	-	-	-	-	-	6.350.000	100,00%	-	-	-	-	-	AVG	-	6.350.000	0,44%	50,00	2.409.062.792	50,00%	18,22%	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	77,5	TLK	150.395.440.889	72,26	44.994.594.017	76,5	67.950.929.546	-	-	604.712.200	155,87%	-	-	849.263.772	19,90%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.453.975.972	2,14%	36,13	46.448.569.989	46,62%	30,88%	DLH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab		
												I				II				III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp	(16)
(5)																																		
	Pengendalian yang Intensif		Kerusakan Lingkungan Hidup																															
	Peningkatan Sebaran Ruang Terbuka Hijau	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	%	100	TLK	7.540.604.806.363	100	952.107.067.944	100	884.801.728.266	100	100,00%	147.510.916.839	164,60%	100	100,00%	172.065.723.763	87,46%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	319.576.640.602	36,12%	100,00	1.271.683.708.546	100,00%	16,86%	Distamhut
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	TLK	113.428.673.158	100	10.954.364.643	100	10.541.337.062	100	100,00%	1.028.565.945	295,77%	100	100,00%	1.199.788.654	87,69%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	2.228.354.599	21,14%	100,00	13.182.719.242	100,00%	11,62%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	ton	74	TLK	19.229.089.840	89,88	2.552.805.923	65	2.824.494.835	9.923	152,66%	16.150.000	100,00%	30,9	118,80%	392.316.000	174,93%	-	-	-	-	40,823	SUM	62,80%	408.466.000	14,46%	65,35	2.961.271.923	88,31%	15,40%	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	13,5	TLK	12.794.166.291	25,57	2.513.796.500	12,5	2.665.258.298	-	-	33.529.000	60,55%	35,99	287,90%	452.702.650	66,78%	-	-	-	-	35,99	TLK	287,92%	486.231.650	18,24%	30,78	3.000.028.150	228,00%	23,45%	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	58	TLK	16.045.597.993	46	4.095.977.935	50	5.125.402.333	-	-	591.889.960	1095,08%	93	186,00%	1.276.415.098	425,35%	-	-	-	-	93	TLK	186,00%	1.868.305.058	36,45%	69,50	5.964.282.993	119,83%	37,17%	DLH
	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	%	18,53	TLK	66.431.887.405	18,49	5.475.646.151	18,49	4.731.890.068	-	-	153.414.000	1727,64%	-	-	863.863.725	106,41%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.017.277.725	21,50%	9,25	6.492.923.876	49,89%	9,77%	Dinas KPKP
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan kan Berlebihan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	124.960	TLK	344.735.292.111	181352,08	27.454.854.450	120107	8.976.472.238	43905,08	166,16%	727.574.282	135,25%	42592,49	141,80%	1.421.178.530	57,74%	-	-	-	-	86497,57	SUM	72,02%	2.148.752.812	23,94%	133924,83	29.603.607.262	107,17%	8,59%	Dinas KPKP
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	Average	942.038.029	100	159.454.500	100	648.084.872	100	100,00%	11.750.000	100,00%	100	100,00%	32.615.000	11,25%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	44.365.000	6,85%	100,00	203.819.500	100,00%	21,64%	DLH
	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	73	TLK	13.850.000.000	82	626.222.599	71	1.024.770.580	-	-	126.051.607	78,80%	-	-	203.550.973	77,64%	-	-	-	-	-	TLK	-	329.602.580	32,16%	41,00	955.825.179	56,16%	6,90%	Dinas KPKP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab									
											I				II													III		IV						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp			
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan ikan Berlebihan	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	4.588	TLK	48.391.623.500	4931,03	8.343.478.434	4498	10.273.899.684	1259,73	127,37%	2.125.043.928	106,94%	1232,03	109,50%	3.326.887.707	97,15%	-	-	-	-	2491,76	SUM	55,40%	5.451.931.635	53,07%	3711,40	13.795.410.069	80,89%	28,51%	Dinas KPKP		
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan ikan Berlebihan	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk plahan hasil perikanan	Ton	16.265,54	TLK	70.127.435.041	24839,18	8.013.240.377	15331,8	7.866.536.227	6417,48	190,27%	478.290.443	141,71%	5493,28	143,30%	1.307.186.259	86,70%	-	-	-	-	1191,076	SUM	77,69%	1.785.476.702	22,70%	18374,97	9.798.717.079	112,97%	13,97%	Dinas KPKP		
				Angka konsumsi ikan	Kg/ Kapita/Ta hun	47,3	TLK		48,61		48		-	-		141,71%	-	-		-	-	-	-	-	-	-	TLK		-	24,31						
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	%	100	TLK	193.795.050.539	100	43.383.470.472	100	30.056.130.246	100	100,00%	5.430.226.864	161,01%	100	100,00%	5.535.665.329	73,19%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	10.965.892.193	36,48%	100,00	54.349.362.665	100,00%	28,04%	Distamhut		
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	%	90	Average	1.670.760.000	100	258.518.892	90	142.021.356	100	111,11%	-	-	100	111,10%	-	-	-	-	-	-	100	AVG	111,11%	0	0,00%	100,00	258.518.892	111,11%	15,47%	Distamhut		
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	%	80	Average	6.888.715.486	81,54	1.098.820.311	80	588.914.786	80,83	101,04%	23.805.000	100,00%	96,67	120,80%	95.399.000	254,86%	-	-	-	-	88,75	AVG	110,94%	119.204.000	20,24%	85,15	1.218.024.311	106,43%	17,68%	Distamhut		
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	4	TLK	2.000.000.000	1	471.274.750	2	348.131.101	2	100,00%	-	-	2	100,00%	18.200.000	23,24%	-	-	-	-	2	AVG	100,00%	18.200.000	5,23%	1,50	489.474.750	37,50%	24,47%	Distamhut		
	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	1.431	TLK	190.230.686.000	610,7472	15.856.683.078	262,944	7.576.671.509	-	-	71.960.000	169,36%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	TLK	-	71.960.000	0,95%	305,37	15.928.643.078	21,33%	8,37%	Dinas TKTE		
	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	%	100	Average	34.149.261.500	100	1.443.896.835	100	6.870.974.454	100	100,00%	7.725.000	100,00%	100	100,00%	20.137.088	9,42%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	27.862.088	0,41%	100,00	1.471.758.923	100,00%	4,31%	Dinas TKTE		
				Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	%	100	TLK		10,5		30		-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-			-				TLK	-	5,25
				Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang zinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	%	60	Average		107		60		-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-			-				-	TLK	-
Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota																																				
1.4	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kapasitas jampungan air	m3	2.783.100	Sum	8.359.926.916.139	269355	1.479.037.286.187	682000	1.696.027.024.358	-	-	34.762.265.724	100,62%	-	-	146.393.280.142	140,76%	-	-	-	-	-	TLK	-	181.155.545.866	10,68%	269355,00	1.660.192.832.053	9,68%	19,86%	Dinas SDA		
				Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	%	12,12	Sum		1,36		8,78		-	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-			-					-	TLK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g jawab									
											I				II													III		IV						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)				
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp		%K	%Rp		
				Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	56,8	TLK			63,99	54,4	-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-		32,00		56,33%						
				Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	%	75	TLK			92,61	49	-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-		46,31		61,74%						
	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	89	TLK	1.940.849.455.480		87,12	809.019.876.107	87	907.767.487.599	-	-	72.262.847.680	154,87%	77,89	89,50%	98.793.474.535	117,84%	-	-	-	-	77,89	AVG	89,53%	171.056.322.215	18,84%	82,51	980.076.198.322	92,70%	50,50%	Dinas SDA	
	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara harmonis dan humanis dan	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	94,75	Average	1.384.537.388.954		94,33	271.090.661.798	94,5	264.135.935.008	98,18	103,89%	43.933.842.459	109,76%	95,27	100,80%	69.460.387.388	107,55%	-	-	-	-	95,27	TLK	100,81%	113.394.229.847	42,93%	94,80	384.484.891.645	100,05%	27,77%	Satpol PP	
	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	1,08	TLK			0,855	0,92	-	-			0,171	100,00%			-	-	-	-	0,171	SUM	18,59%		0,51		47,50%						
				Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100	Average	198.321.750.235		100	38.489.225.995	100	84.782.697.952	100	100,00%	5.632.919.674	133,69%	100	100,00%	25.809.119.389	167,26%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	31.442.039.063	37,09%	100,00	69.931.265.058	100,00%	35,26%	BPBD	
				Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100	Average			100	100	100	100,00%			100	100,00%			-	-	-	-	100	AVG	100,00%		100,00		100,00%						
	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	%	60	TLK	1.941.282.705.126		61,18	485.871.660.310	55	346.684.822.172	63,67	120,13%	28.573.487.914	142,71%	60,2	112,50%	37.708.257.723	82,30%	-	-	-	-	60,2	TLK	109,45%	66.281.745.637	19,12%	60,69	552.153.405.947	101,15%	28,44%	Dinas Gulkamat	
	Pengendalian Penurunan Muka Tanah Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Terkendali	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	%	100	Average	63.768.000.000		100	14.832.029.920	100	17.699.999.922	100	100,00%	14.190.000	100,00%	100	100,00%	42.570.000	100,00%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	56.760.000	0,32%	100,00	14.888.789.920	100,00%	23,35%	Dinas SDA	
2. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan																																				
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah																																				
2.1	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Jsaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan	Usaha pariwisata	19.345	TLK			18735	17345	19301	111,28%			19821	114,30%			-	-	-	-	19821	TLK	114,28%			19278,00		99,65%					
				Jumlah pengunjung event	Orang	1.365.074	Sum	391.507.149.851		6830166	78.223.204.749	324008	86.929.946.945	1071	107,85%	1.116.298.272	87,97%	591150	579,20%			-	-	-	-	592221	SUM	182,78%			7422387,00		543,74%		22,40%	Dinas Parekrat
				Nilai kepuasan pengunjung objek wisata	Nilai	85	TLK			85,65	75	-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			42,83		50,38%					
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung e-tourism	Pengunjur g website dan medsos	13.064.317	Sum	543.410.120.595		8810929	69.412.215.454	3216410	73.132.762.705	3864982	600,82%	625.055.140	197,74%	6698915	833,10%	4.912.543.231	27,69%	-	-	-	-	10563897	SUM	328,44%	5.537.598.371	7,57%	19374826,00	74.949.813.825	148,30%	13,79%	Dinas Parekrat	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab							
												I				II													III		IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp	
	Jsaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi			Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta	Nilai	85	TLK		93,3		75		-	-		-	-		27,69%	-	-	-	-	-	TLK	-		46,65		54,88%					
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Jsaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	produk	850	TLK	162.826.829.879	267	56.467.096.322	450	38.436.999.815	292	106,18%	462.531.631	34,22%	317	105,70%	4.826.267.126	46,33%	-	-	-	-	317	TLK	70,44%	5.288.798.757	13,76%	292,00	61.755.895.079	34,35%	37,93%	Dinas Parekraf	
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Jsaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	orang	7.088	TLK	47.138.840.596	4688	6.429.264.862	5488	6.024.141.910	4788	100,84%	466.215.666	82,42%	5038	103,50%	1.332.885.481	96,77%	-	-	-	-	5038	TLK	91,80%	1.799.101.147	29,86%	4863,00	8.228.366.009	68,61%	17,46%	Dinas Parekraf	
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	50	Average	25.206.517.545	69,2	9.746.224.319	50	9.134.741.265	77,57	155,14%	2.023.723.431	148,29%	76,41	152,80%	2.412.927.468	79,11%	-	-	-	-	76,99	AVG	153,98%	4.436.650.899	48,57%	73,10	14.182.875.218	146,19%	56,27%	Dinas KPKP	
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	65	TLK	561.437.620.828	58,33	14.568.121.077	55	12.642.187.894	-	-	913.856.376	100,25%	-	-	3.463.255.853	78,08%	-	-	-	-	-	TLK	-	4.377.112.229	34,62%	29,17	18.945.233.306	44,87%	3,37%	Dinas KPKP	
				Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	80	TLK		90		70		-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			45,00		56,25%			
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (rabies)	%	100	Average	28.134.931.349	100	8.718.627.050	100	9.595.050.445	-	-	1.671.817.147	110,43%	100	100,00%	2.688.047.819	93,54%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	4.359.864.966	45,44%	100,00	13.078.492.016	100,00%	84,29%	46,48%	Dinas KPKP
				Persentase pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	%	75	TLK		88,6		70		-	-			37,84	151,40%			-	-	-	-	37,84	TLK	54,06%			63,22					
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	TLK		20		5		-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			10,00		200,00%			
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase area lahan yang terkendali	%	85	Average	1.572.992.565	85	636.665.691	85	979.433.720	136	160,00%	346.599.510	137,76%	136,99	161,20%	259.221.504	61,65%	-	-	-	-	136,495	AVG	160,58%	605.821.014	61,85%	110,75	1.242.486.705	130,29%	78,99%	Dinas KPKP	
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian dan peternakan	%	2,5	TLK	28.773.363.640	3,35	9.286.539.252	2,5	11.696.361.289	-	-	1.572.687.408	148,31%	-	-	2.586.475.846	65,22%	-	-	-	-	-	TLK	-	4.159.163.254	35,56%	1,68	13.445.702.506	67,00%	46,73%	Dinas KPKP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
												I				II				III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)	
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp
	Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.07		Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	80	Average	28.773.363.640	100		80		100	125,00%		148,31%	100	125,00%			-	-	-	-	100	AVG	125,00%		100,00		125,00%			
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemanfaatan SKA	Persen	63	TLK	2.720.500.000	63	**	**	**	**		**	**	**				-	-	-	-	**	**	**		**		**	**	Dinas PPKUKM	
				Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui Online Single Submission Risk Based Approachd (OSS-RBA)	Persen	85	TLK	2.720.500.000	77	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	-	-	-	-	**	**	**		**	**	**
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	TLK	130.000.000	14	*	14	254.161.378	-	-	-	-	-	-	81.127.400	279,75%	-	-	-	-	-	TLK	-	81.127.400	31,92%	7,00	81.127.400	50,00%	62,41%	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	11.774.067.998	TLK	31.121.256.730	12085560000	6.241.238.500	11542100000	6.115.532.175	-	-	-	-	-	-	28.350.000	10,32%	-	-	-	-	-	TLK	-	28.350.000	0,46%	604278000,00	6.269.588.500	51,32%	20,15%	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	TLK		100		100	100,00%				100	100,00%			-	-	-	-	100	AVG	100,00%		100,00			100,00%		Dinas PPKUKM	
				Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	%	83	TLK	86.822.384.942	95,24	7.049.958.998	81	7.871.097.189	95,61	118,04%	1.366.311.693	191,65%	94,93	117,20%	1.907.426.472	78,66%	-	-	-	-	95,27	AVG	117,62%	3.273.738.165	41,59%	95,26	10.323.697.163	114,77%	11,89%	Dinas PPKUKM
				Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan fitera ulang	%	100	Average		100		100	100,00%				100	100,00%			-	-	-	-	100	AVG	100,00%		100,00			100,00%			Dinas PPKUKM
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	%	50	TLK	158.967.030.231	56	32.972.631.826	30	29.786.217.179	-	-	3.023.769.900	864,45%	11,18	111,80%	3.628.882.636	165,06%	-	-	-	-	11,18	TLK	37,27%	6.652.652.536	22,33%	33,59	39.625.284.362	67,18%	24,93%	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan omzet industri kecil dan menengah	%	5	TLK	529.019.915.536	9,503	102.721.621.369	4	65.587.797.475	-	-	5.302.211.024	196,33%	-	-	7.349.356.246	123,02%	-	-	-	-	-	TLK	-	12.651.567.270	19,29%	4,75	115.373.188.639	95,03%	21,81%	Dinas PPKUKM
				Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	%	65	TLK		83,72		55		-	-		-	-			-	-	-	-	-	-	TLK	-			41,86		64,40%	Dinas PPKUKM	
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri tertib perizinan	%	70	TLK	791.956.484	55	4.229.655	60	9.807.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0,00%	27,50	4.229.655	39,29%	0,53%	Dinas PPKUKM	
Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja																																		
2.2	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%	70	Average	399.600.000	97,95	96.900.000	70	105.718.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	0	0,00%	48,98	96.900.000	69,96%	24,25%	Dinas TKTE	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab							
											I				II													III		IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp		%K	%Rp
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	%	91,5	Average	174.471.787.850	87,89	40.211.148.899	90	30.746.444.121	90,06	100,07%	3.773.403.925	202,00%	90,04	100,00%	6.397.912.540	106,15%	-	-	-	-	90,05	AVG	100,06%	10.171.316.465	33,08%	88,97	50.382.465.364	97,23%	28,88%	Dinas TKTE
				Persentase tenaga kerja mandiri yang berwira usaha, berdaya saing dan berkelanjutan.	%	90	Average		90	40.211.148.899	90		-	-		202,00%	92,5	102,80%		-	-	-	-	92,5	AVG	102,78%	91,25		101,39%	0,00%				
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	%	71,25	Average	12.704.522.099	68,47	2.188.577.000	70	2.089.165.000	-	-	288.005.000	122,58%	-	-	448.455.000	93,59%	-	-	-	-	-	TLK	-	736.460.000	35,25%	34,24	2.925.037.000	48,05%	23,02%	Dinas TKTE
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	65	TLK	62.400.000	57	9.000.000	60	7.800.000	-	-	-	-	56,37	187,90%	-	-	-	-	-	56,37	TLK	93,95%	-	0,00%	56,69	9.000.000	87,21%	14,42%	Dinas PPKUKM	
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	80	Average	617.189.280.321	90,92	98.037.272.956	80	90.960.049.241	-	-	12.906.584.289	347,28%	89	111,30%	22.853.983.022	126,17%	-	-	-	-	89	AVG	111,25%	35.760.567.311	39,31%	89,96	133.797.840.267	112,45%	21,68%	Dinas TKTE
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	411.825.849	TLK		400700509	403711253	-	-	-	-		347,28%	-	-		-	-	-	-	TLK	-	39,31%	200350254,50		48,65%					
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.	%	80	Average	7.939.182.457	97	2.984.245.135	80	3.422.020.180	-	-	233.354.740	123,45%	-	-	856.476.529	106,12%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.089.831.269	31,85%	48,50	4.074.076.404	60,63%	51,32%	Dinas TKTE
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	70	TLK	4.098.015.017	80	209.312.517	60	1.000.250.643	-	-	-	-	65,96	109,90%	529.077.390	233,09%	-	-	-	-	65,96	TLK	109,93%	529.077.390	52,89%	72,98	738.389.907	104,26%	18,02%	Dinas PPKUKM
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	TLK	1.300.000.000	4,62	116.976.000	2	654.077.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0,00%	2,31	116.976.000	115,50%	9,00%	Dinas PPKUKM		
				Persentase koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	%	0,5	TLK		0,595		0,48		-	-			-	-			-	-	TLK	-	0,00%		0,30	59,50%						
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	4	TLK	365.438.667.878	3,06	41.830.624.162	3	65.139.768.551	-	-	9.118.938.650	157,44%	8,65	432,50%	9.468.173.030	74,11%	-	-	-	-	8,65	TLK	288,33%	18.587.111.680	28,53%	5,86	60.417.735.842	146,38%	16,53%	Dinas PPKUKM
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	%	100	TLK	5.852.105.922	91,2	140.356.095	80	233.596.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TLK	-	-	0,00%	45,60	140.356.095	45,60%	2,40%	Dinas PPKUKM		
Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial																																		
2.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80,3	TLK	127.295.956.201	79,77	19.469.216.536	79,8	19.473.052.798	-	-	2.033.692.920	57,37%	-	-	5.482.731.350	134,00%	-	-	-	-	-	TLK	-	7.516.424.270	38,60%	39,89	26.985.640.806	49,67%	21,20%	Dinsos

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g jawab							
												I				II													III		IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp	
	Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			yang mampu melakukan pemberdayaan sosial																															
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial	Indeks	100	TLK	1.343.709.857.425	99,925	274.351.799.257	100	290.816.255.506	99,53	99,53%	53.814.218.694	126,14%	99,71	99,70%	72.399.111.272	90,79%	-	-	-	-	99,62	AVG	99,62%	126.213.329.966	43,40%	99,77	400.565.129.223	99,77%	29,81%	Dinsos	
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	%	100	TLK	4.443.284.258.338	96,78	921.133.435.676	100	860.792.291.786	40	40,00%	51.929.968.207	107,35%	74,63	74,60%	314.912.683.138	83,11%	-	-	-	-	74,63	TLK	74,63%	366.842.651.345	42,62%	85,71	1.287.976.087.021	85,71%	28,99%	Dinsos	
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks pencapaian SPM penanganan bencana	Indeks	100	TLK	402.713.937.964	99,89	29.202.533.044	100	28.307.733.939	100	100,00%	3.380.358.550	114,53%	99,82	99,80%	8.783.470.763	90,71%	-	-	-	-	99,82	TLK	99,82%	12.163.829.313	42,97%	99,86	41.366.362.357	99,86%	10,27%	Dinsos	
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	%	95	Average	7.328.899.872	100	94.493.600	95	204.798.467	100	105,26%	-	-	100	105,30%	-	-	-	-	-	-	100	AVG	105,26%	-	0,00%	100,00	94.493.600	105,26%	1,29%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	Average	4.183.828.667.563	100	1.048.134.122.561	100	795.188.175.882	-	-	91.732.056.555	107,56%	-	-	233.272.765.380	119,35%	-	-	-	-	-	TLK	-	325.004.821.935	40,87%	50,00	1.373.138.944.496	50,00%	32,82%	Dinas KPKP	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah jahan pangan	%	97,72	TLK	830.640.000	100	*	95,45	*	-	-	*	*	-	-	*	*	-	-	-	-	-	TLK	*	*	*	50,00	*	51,17%	*	Dinas KPKP	
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	%	99,8	Average	14.106.121.144	99,94	3.039.042.360	99,8	2.866.106.653	100	100,20%	333.186.570	115,14%	100	100,20%	529.116.394	152,43%	-	-	-	-	100	AVG	100,20%	862.302.964	30,09%	99,97	3.901.345.324	100,17%	27,66%	Dinas KPKP	
	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	97,41	TLK	2.171.116.081.149	95,218	465.818.037.592	93,63	468.217.958.592	-	-	73.847.221.153	101,09%	-	-	118.851.124.887	106,51%	-	-	-	-	-	TLK	-	192.698.346.040	41,16%	47,61	658.516.383.632	48,87%	30,33%	Dinas PPAPP	
2.4	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab								
													I				II				III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp				
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai kemudahan investasi	Nilai	80,1	TLK	7.476.999.222	72,82	951.822.300	75	2.390.606.032	-	-	129.778.400	111,88%	-	-	335.751.500	46,96%	-	-	-	-	-	TLK	-	465.529.900	19,47%	36,41	1.417.352.200	45,46%	18,96%	Dinas PMPTSP			
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	100	Average	39.983.856.857	100	6.505.863.490	100	9.473.642.465	100	100,00%	502.080.000	116,42%	100	100,00%	771.400.000	61,62%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	1.273.480.000	13,44%	100,00	7.779.343.490	100,00%	19,46%	100,00%	Dinas PMPTSP		
				Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100	Average		100		100		100	100,00%		116,42%	100	100,00%		-	-	-	-	100	AVG	100,00%	100,00%										
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50	90	TLK	7.749.897.902	103	1.496.989.464	75	2.794.386.163	-	-	94.700.000	81,64%	51	170,00%	420.062.567	178,75%	-	-	-	-	51	TLK	68,00%	514.762.567	18,42%	77,00	2.011.752.031	85,56%	25,96%	Dinas PMPTSP			
	Terwujudnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkaya Kebudayaan Nasional	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	%	9,89	TLK	1.012.603.736.233	8,75	145.637.800.356	8,98	109.155.517.838	-	-	4.850.620.031	195,05%	-	-	31.374.917.729	202,36%	-	-	-	-	-	TLK	-	36.225.537.760	33,19%	4,38	181.863.338.116	44,24%	17,96%	Disbud			
	Terwujudnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkaya Kebudayaan Nasional	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	%	46,11	TLK	362.720.138.549	44,9	13.627.454.464	46,8	13.321.906.121	-	-	571.597.520	213,92%	-	-	865.615.016	103,82%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.437.212.536	10,79%	22,45	15.064.667.000	48,69%	4,15%	Disbud			
	Memperkuat peran museum sebagai tempat pelestarian dan pusat informasi benda cagar budaya dan koleksi.	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	%	25	TLK	163.806.739.047	24,55	70.590.128.203	24,7	61.189.878.816	-	-	153.650.000	202,17%	-	-	2.887.662.052	93,84%	-	-	-	-	-	TLK	-	3.041.312.052	4,97%	12,28	73.631.440.255	49,10%	44,95%	Disbud			
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	25,5	TLK	363.565.765.112	34,8	75.512.618.584	25	102.705.994.491	6,25	100,00%	6.090.248.727	112,54%	13,4	107,20%	33.106.500.987	91,30%	-	-	-	-	13,4	TLK	53,60%	39.196.749.714	38,16%	24,10	114.709.368.298	94,51%	31,55%	Dispusip			
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0714	TLK		0,0605		0,0625		0,0588	100,00%		0,0588	100,00%	-			-	-	-	0,0588	TLK	94,08%	0,06			83,54%							
				Rasio ketercukupan jenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0006	TLK		0,000498		0,0004		-	-		-	-	-			-	-	-	TLK	-	0,00	41,50%										
				Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	14,9	TLK		8,14		9,9		2,9	116,00%		5,9	118,00%	-			-	-	-	5,9	TLK	59,60%	7,02			47,11%							
				Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	73,51	TLK		72,68		72,91		-	-		-	-	-			-	-	-	TLK	-	36,34	49,44%										
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	15	TLK	6.688.769.283	16,84	1.088.308.888	14	1.471.011.296	3,71	106,00%	232.303.941	97,45%	7,2	102,90%	264.848.609	81,26%	-	-	-	-	7,2	TLK	51,43%	497.152.550	33,80%	12,02	1.585.461.438	80,13%	23,70%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
											I				II													III		IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)	
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp	
	Dan Pelayanan Di Wilayah Yang Optimal																																	
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase capaian serah simpan karya cetak dan karya rekam yang menjadi koleksi daerah	%	32,5	TLK	7.652.653.750	26,75	631.365.406	27,5	890.107.782	7,1	104,41%	16.115.000	63,12%	13,6	100,00%	106.774.475	99,86%	-	-	-	-	13,6	TLK	49,45%	122.889.475	13,81%	20,18	754.254.881	62,08%	9,86%	Dispusip
				Persentase capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	%	100	Sum		10		20		-	-			-	-			-	-	-	-	SUM	-	10,00			10,00%				
	Peningkatan Fasilitas Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase proyek kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	%	100	Average	10.889.826.648	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***	Dinas PMPTSP
	Menciptakan Kluster Inovasi Melalui Kolaborasi Pentahelix	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	%	100	TLK	6.716.605.000	40	1.546.940.600	60	4.169.253.050	-	-	219.540.000	91,72%	-	-	322.510.000	76,09%	-	-	-	-	-	TLK	-	542.050.000	13,00%	20,00	2.088.990.600	20,00%	31,10%	Bappeda
3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan																																		
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat																																		
3.1	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentas e	55	TLK	43.569.025.310.912	83,07	7.817.604.359.221	91,58	9.172.910.258.852	50,69	112,64%	387.088.895.037	101,49%	90,01	163,70%	1.891.456.928.449	72,21%	-	-	-	-	90,01	TLK	98,29%	2.278.545.823.486	24,84%	86,54	10.096.150.182.707	157,35%	23,17%	Dinas Pendidikan
				Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentas e	100	TLK		72,37		100		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	36,19			36,19%				
				Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentas e	100	TLK		98,83		100		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	49,42			49,42%				
				Persentase guru profesional	Persentas e	90,7	TLK		87,49		88,5		-	-			91,46	103,30%			-	-	-	-	91,46	TLK	103,34%			89,48		98,65%		
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentas e	72,94	TLK		82,84		72,56		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	41,42			56,79%				
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	72,25	TLK		81,95		69,92		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	40,98			56,71%				
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	64,83	TLK		65,24		62,5		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	32,62			50,32%				
				Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentas e	100	TLK		72,5		100		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	36,25			36,25%				
				Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentas e	100	TLK		66,87		100		-	-			-	-			-	-	-	-	TLK	-	33,44			33,44%				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
											I				II													III		IV				
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)					(11)		(12)		(13)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp	

3.2	Meningkatkan layanan, nfrastruktur, akses, dan integrasi Transportasi	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100	TLK		100		****		****	****			****	****			-	-	-	-	****	***	***		****		****	
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	%	100	TLK		67		67		67	1340,00%			67	670,00%			-	-	-	-	67	TLK	100,00%		67,00		67,00%	
				Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100	TLK		100		100		61,14	203,80%			66,66	222,20%			-	-	-	-	66,66	TLK	66,66%		83,33		83,33%	
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,64	TLK		0,6		0,58		0,59	107,27%			0,61	108,90%			-	-	-	-	0,61	TLK	105,17%		0,61		94,53%	
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	70	TLK		43,56		74		3,83	195,15%			17,73	177,27%			-	-	-	-	17,73	TLK	176,04%		30,65		156,22%	
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1,28	TLK		2,6		1,3		0,72	146,27%			1,09	118,05%			-	-	-	-	1,09	TLK	116,15%		1,85		55,86%	
				Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	100	TLK		100		100		100	100,00%			100	100,00%			-	-	-	-	100	TLK	100,00%		100,00		100,00%	
				Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan	%	100	TLK		105		100		104	104,00%			105	105,00%			-	-	-	-	104,5	AVG	104,50%		104,75		104,75%	
				Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	%	80	TLK		96,33		40		96,3	240,75%			96,3	240,80%			-	-	-	-	96,3	TLK	240,75%		96,32		120,39%	
				Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	%	100	TLK		95,47		100		95,47	381,88%			94	188,00%			-	-	-	-	94	TLK	94,00%		94,74		94,74%	
	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98	TLK		98,56		98		98,56	100,57%			98,68	100,70%			-	-	-	-	98,68	TLK	100,69%		98,62		100,63%				
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase implementasi hospitality dalam pelayanan	%	100	TLK		100		100		36,97	147,88%			59,4	118,80%			-	-	-	-	59,4	TLK	59,40%		79,70		79,70%	
				Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia	%	65	TLK		82,84		60		82,5	275,00%			75,2	188,00%			-	-	-	-	75,2	TLK	125,33%		79,02		121,57%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
													I				II				III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)						(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp							
	Continuum of Care)			Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)																																				
				Persentase pemenuhan umlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kecamatan	%	100	TLK			97,22		89		91,92	122,56%			93,43	116,80%							93,43	TLK	104,98%			95,33			95,33%						
				Persentase pemenuhan kriteria penyelenggara pelatihan bidang kesehatan berskala nasional	%	100	TLK			50		60		75,6	604,80%			75,6	100,00%							75,6	TLK	126,00%			62,80			62,80%						
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	55	TLK			40		45		10	100,00%			20	100,00%						20	TLK	44,44%			30,00			54,55%							
				Persentase sarana alat kesehatan yang memenuhi ketentuan cara pengelolaan dan distribusi alat kesehatan yang baik	%	55	TLK	2.547.347.676		44,61	258.024.000	45	384.467.544	14,89	297,80%	10.840.000	280,10%	17	170,00%	71.711.000	59,10%	-	-	-	-	17	TLK	37,78%	82.551.000	21,47%	30,81	340.575.000	56,01%	13,37%			Dinkes			
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	73	TLK			80,3		69		19,8	132,00%			42,1	140,30%							42,1	TLK	61,01%			61,20			83,84%						
Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.02		Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	100	TLK	79.749.793.623		97,86	7.759.444.451	92	8.596.093.683	-	-	885.580.900	250,96%	-	-	2.146.974.545	72,93%	-	-	-	-	-	TLK	-	3.032.555.445	35,28%	48,93	10.791.999.896	48,93%	13,53%			Dinas PPAPP			
Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	23,2	TLK	12.117.750.000		23,8	2.357.355.439	22,5	1.844.110.457	-	-	27.722.000	151,49%	-	-	342.740.750	94,48%	-	-	-	-	-	TLK	-	370.462.750	20,09%	11,90	2.727.818.189	51,29%	22,51%			Dinas PPAPP			
Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	2.19.02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	%	50	TLK	185.005.524.518		50	17.244.040.995	50	22.605.165.400	-	-	1.485.483.940	1005,37%	-	-	5.803.223.786	249,58%	-	-	-	-	-	TLK	-	7.288.707.726	32,24%	25,00	24.532.748.721	50,00%	13,26%			Dispora			
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.19.02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	75	TLK	4.983.147.032		80	626.000.808	65	274.732.326	-	-	-	-	-	-	17.885.585	135,34%	-	-	-	-	-	TLK	-	17.885.585	6,51%	40,00	643.886.393	53,33%	12,92%			Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu			
Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	2.19.03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	96	TLK	8.894.206.966.786		96,3	753.364.573.758	91	719.281.416.840	-	-	21.614.793.088	639,34%	-	-	435.766.379.307	1009,06%	-	-	-	-	-	TLK	-	457.381.172.395	63,59%	48,15	1.210.745.746.153	50,16%	13,61%			Dispora			
Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	2.19.03		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	90	TLK	11.868.711.113		100	354.396.424	80	488.108.185	-	-	-	-	-	-	48.876.832	55,59%	-	-	-	-	-	TLK	-	48.876.832	10,01%	50,00	403.273.256	55,56%	3,40%			Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
												I				II				III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)			
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp		
	Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal																																			
	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	%	2,49	TLK	60.427.649.599	2,04	8.690.671.266	2,18	4.465.204.841	-	-	389.825.450	100,00%	-	-	3.190.869.227	100,00%	-	-	-	-	-	TLK	-	3.580.694.677	80,19%	1,02	12.271.365.943	40,96%	20,31%	Dispora		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urutan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	%	6	TLK	2.456.764.176	8	*	5	202.013.613	-	-	11.420.000	190,33%	-	-	46.345.040	109,04%	-	-	-	-	-	SUM	-	57.765.040	28,59%	4,00	57.765.040	66,67%	2,35%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu		
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif	%	67	TLK		94,88	62		94,67	157,78%		94,78	158,00%		-	-	-	-	94,78	TLK	152,87%		26,24%	94,83		141,54%							
				Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melaksanakan revitalisasi pelayanan	Unit	176	TLK	903.530.994	115	470.214.000	88	705.798.455	138	1533,33%	35.360.000	234,95%	190	431,80%	149.838.000	145,87%	-	-	-	-	190	TLK	215,91%	185.198.000	26,24%	152,50	655.412.000	86,65%	72,54%	Dinkes		
	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat (keluarga) yang memperoleh informasi program Bangga Kencana dengan cara memperoleh/mendengar melihat pesan/informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan petugas.	%	63,6	TLK		79,19	58,6		-	-		-	-		-	-			-	-	-	-	TLK	-		39,60		62,26%					
				Persentase kebutuhan per-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	12,8	TLK	44.725.904.539	11,7	7.016.603.910	13,8	8.432.806.602	-	-	178.202.780	78,18%	-	-	1.598.578.037	65,89%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.776.780.817	21,07%	5,85	8.793.384.727	154,30%	19,66%	Dinas PPAPP		
				Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	60,32	TLK		60,2	58,99		-	-		-	-		-	-			-	-	-	-	TLK	-		30,10		49,90%					
				Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15- 19 tahun	19,85	TLK		5,4	20,85		-	-		-	-		-	-			-	-	-	-	TLK	-		2,70		186,40%					
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan ayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	4	TLK	34.882.369.525.858	3	6.224.883.197.659	3	6.337.449.788.227	3	100,00%	1.085.327.287.023	110,99%	3	100,00%	1.440.272.249.787	100,39%	-	-	-	-	3	AVG	100,00%	2.525.599.536.810	39,85%	3,00	8.750.482.734.469	75,00%	25,09%	Dinkes		
Menurunnya Kesenjangan dan Pembangunan Responsif Gender																																				
3.3	Pemulaian, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan embaga masyarakat yang melaksanakan PUG dan pemberdayaan perempuan	%	85	TLK	12.819.261.276	97	2.322.812.927	75	2.284.740.730	-	-	1.399.303.000	951,00%	-	-	294.116.053	85,34%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.693.419.053	74,12%	48,50	4.016.231.980	57,06%	31,33%	Dinas PPAPP		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)				Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I				II				III																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)				(14) =(7)+(13)				(15)=(14)/(6)x100%				(16)
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp								
	Jalam Pembangunan																																								
	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	TLK	69.598.416.932	100	13.094.538.232	100	17.299.716.644	100	100,00%	3.096.018.998	146,75%	100	100,00%	3.332.450.498	99,62%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	6.428.469.496	37,16%	100,00	19.523.007.728	100,00%	28,05%	Dinas PPAPP							
	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	%	30	TLK	20.892.573.340	15	2.897.013.050	20	3.196.817.540	-	-	472.725.000	99,41%	-	-	582.125.000	80,25%	-	-	-	-	-	TLK	-	1.054.850.000	33,00%	7,50	3.951.863.050	25,00%	18,92%	Dinas PPAPP							
	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi pemmasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	TLK	657.629.700	100	45.100.000	100	7.855.000	-	-	-	-	-	-	6.655.000	84,72%	-	-	-	-	-	TLK	-	6.655.000	84,72%	50,00	51.755.000	50,00%	7,87%	Dinas PPAPP							
	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	TLK	6.349.427.693	79,62	767.224.320	60	1.076.394.905	-	-	31.625.000	170,49%	-	-	161.990.000	71,90%	-	-	-	-	-	TLK	-	193.615.000	17,99%	39,81	960.839.320	49,76%	15,13%	Dinas PPAPP							
	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	81	TLK	16.367.920.158	80	2.155.693.070	77	2.028.221.547	-	-	3.575.000	137,50%	-	-	448.632.665	209,06%	-	-	-	-	-	TLK	-	452.207.665	22,30%	40,00	2.607.900.735	49,38%	15,93%	Dinas PPAPP							
3.4	Memperkuatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat																																								
	Peningkatan Efektivitas Layanan dan Fasilitasi Lembaga Legislatif	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	Average	1.907.765.114.409	4	460.253.052.565	4	473.219.552.144	4	100,00%	135.105.840.145	143,99%	4	100,00%	106.434.898.669	141,23%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	241.540.738.814	51,04%	4,00	701.793.791.379	100,00%	36,79%	Sekretariat DPRD							
	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	52	TLK	94.971.312.902	50,5	6.729.568.400	51	17.109.494.492	51	100,00%	1.449.333.552	75,71%	51	100,00%	5.147.805.771	85,12%	-	-	-	-	51	AVG	100,00%	6.597.139.323	38,56%	50,75	13.326.707.723	97,60%	14,03%	Bakesbangpol							
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	52	TLK	1.781.888.444	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu						
	Peningkatan Partisipasi Pemilu	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik,	%	52	TLK	256.184.249.262	50,5	523.958.272.820	51	746.716.329.051	51	100,00%	2.524.772.859	96,22%	51	100,00%	709.327.955.140	1686,26%	-	-	-	-	51	AVG	100,00%	711.852.727.999	95,33%	50,75	1.235.811.000.819	97,60%	482,39%	Bakesbangpol							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I				II				III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)	
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp
			Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	etika dan budaya politik serta peningkatan peran partai politik																														
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Perar Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	52	TLK	402.155.310	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	***	***	***	***	***	0,00	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Pembinaan deologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat pemahaman organisasi kemasyarakatan terkait peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	%	52	TLK	97.119.667.985	50,5	10.043.988.000	51	9.752.196.664	51	100,00%	36.596.000	87,03%	51	100,00%	2.238.496.184	23,92%	-	-	-	-	51	AVG	100,00%	2.275.092.184	23,33%	50,75	12.319.080.184	97,60%	12,68%	Bakesbangpol
	Pembinaan deologi, Kerukunan, kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	52	TLK	20.568.119.689	50,5	1.340.802.600	51	1.880.829.888	51	100,00%	379.998.960	152,61%	51	100,00%	988.390.852	87,89%	-	-	-	-	51	AVG	100,00%	1.368.389.812	72,75%	50,75	2.709.192.412	97,60%	13,17%	Bakesbangpol
	Pembinaan deologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pemantauan orang asing	%	52	TLK	130.022.623.874	50,5	650.902.687.400	51	153.883.491.086	51	100,00%	1.277.847.728	112,66%	51	100,00%	1.858.291.480	1,25%	-	-	-	-	51	AVG	100,00%	3.136.139.208	2,04%	50,75	654.038.826.608	97,60%	503,02%	Bakesbangpol
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauar Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	52	TLK	1.703.744.259	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	-	-	-	-	***	***	***	***	***	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu	
4. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas																																		
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat																																		
4.1	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	99	TLK	174.413.336.068	99,93	61.390.898.028	99	63.757.787.697	99,25	100,25%	14.264.021.868	151,22%	99,44	100,40%	14.580.215.067	85,66%	-	-	-	-	99,44	TLK	100,44%	28.844.236.935	45,24%	99,69	90.235.134.963	100,69%	51,74%	Dinas Dukcapil

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
											I				II													III		IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%	(16)			
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K		Rp	%K	%Rp
	Perundang-undangan																																	
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,88	TLK	22.588.546.991	99,99	4.409.288.593	99,75	6.254.522.640	99,91	100,16%	736.525.295	136,29%	99,92	100,20%	1.064.557.321	105,80%	-	-	-	-	99,92	TLK	100,17%	1.801.082.616	28,80%	99,96	6.210.371.209	100,08%	27,49%	Dinas Dukcapil
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	%	100	Average	861.096.408	100	278.354.800	100	328.156.506	25	100,00%	17.700.000	124,74%	50	100,00%	36.456.750	86,51%	-	-	-	-	50	TLK	50,00%	54.156.750	16,50%	75,00	332.511.550	75,00%	38,61%	Dinas Dukcapil
	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	Average	833.530.672.487	100	149.437.581.318	100	144.846.916.306	100	100,00%	30.831.190.568	136,72%	100	100,00%	31.672.888.853	77,72%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	62.504.079.421	43,15%	100,00	211.941.660.739	100,00%	25,43%	Dinas PMPTSP
	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Indeks	90	TLK	73.679.200.881	92,29	13.382.227.687	88	17.399.505.340	92,1	104,66%	1.312.727.890	113,80%	92,76	105,40%	1.847.090.000	101,66%	-	-	-	-	92,43	AVG	105,03%	3.159.817.890	18,16%	92,36	16.542.045.577	102,62%	22,45%	Dinas PMPTSP
	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	2.24.02 2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip siap layanan	%	45,45	TLK		37,97		39,36		-	-		-	-			-	-	-	-	-	TLK	-		18,99		41,77%				
				Persentase lembaga (OPD, BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	%	100	TLK	456.267.931.008	61,11	24.049.442.564	74,07	21.695.431.168		-	-	1.583.243.510	134,99%		4.762.378.451	45,99%						6.345.621.961	29,25%		30.395.064.525		6,66%	Dispusip		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layanan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	50	TLK	3.090.000.000	25,03	25.542.000	30	57.046.969	-	-	-	-	10,75	107,50%	10.115.112	100,00%	-	-	-	-	10,75	TLK	35,83%	10.115.112	17,73%	17,89	35.657.112	35,78%	1,15%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	TLK	11.906.893.225	4	2.719.097.324	4	2.533.275.174	-	-	377.212.218	117,04%	4	100,00%	604.353.346	97,97%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	981.565.564	38,75%	4,00	3.700.662.888	100,00%	31,08%	Kota Adm. Jakpus
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	Average	8.083.781.655	4	1.824.325.079	4	1.458.354.046	-	-	164.375.639	120,38%	4	100,00%	294.130.260	70,38%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	458.505.899	31,44%	4,00	2.282.830.978	100,00%	28,24%	Kota Adm. Jakut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
												I				II				III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)	
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp
	Administrasi Jakarta Utara yang Optimal																																	
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan ketertiban umum	Indeks	4	Average	11.201.066.533	4	2.499.790.066	4	3.126.309.248	-	-	352.348.850	94,26%	4	100,00%	561.044.640	76,50%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	913.393.490	29,22%	4,00	3.413.183.556	100,00%	30,47%	Kota Adm. Jakbar
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan ketertiban umum	Indeks	4	Average	8.392.686.441	4	3.063.943.703	4	3.092.087.805	-	-	413.807.875	112,43%	4	100,00%	674.518.330	88,39%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	1.088.326.205	35,20%	4,00	4.152.269.908	100,00%	49,47%	Kota Adm. Jaksel
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan ketertiban umum	Indeks	4	Average	22.152.232.020	4	4.153.018.999	4	7.673.179.918	-	-	1.139.012.340	125,88%	4	100,00%	1.776.905.961	116,63%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	2.915.918.301	38,00%	4,00	7.068.937.300	100,00%	31,91%	Kota Adm. Jaktim
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan ketertiban umum	Indeks	4	Average	2.437.590.432	4	430.632.400	4	484.093.108	-	-	85.636.480	103,43%	4	100,00%	105.046.650	86,92%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	190.683.130	39,39%	4,00	621.315.530	100,00%	25,49%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang- undangan	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	100	TLK	1.624.167.092	113,6	1.158.842.704	92,86	2.174.981.201	110,77	123,77%	185.709.642	75,66%	112,31	124,80%	499.751.259	88,25%	-	-	-	-	112,31	TLK	120,95%	685.460.901	31,52%	112,96	1.844.303.605	112,96%	113,55%	Dinas Dukcapil
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	Average	197.842.101.885	4	74.060.987.210	4	80.782.559.268	-	-	12.551.096.942	118,18%	4	100,00%	17.385.554.335	87,39%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	29.936.651.277	37,06%	4,00	103.997.638.487	100,00%	52,57%	Kota Adm. Jakpus
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	Average	372.552.212.905	4	95.843.861.720	4	94.075.997.465	-	-	18.908.653.088	132,61%	4	100,00%	22.996.385.097	79,80%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	41.905.038.185	44,54%	4,00	137.748.899.905	100,00%	36,97%	Kota Adm. Jakut

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab							
													I				II				III		IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)				(7)		(8)		(9)				(10)				(11)				(12)				(13)				(14) =(7)+(13)				(15)=(14)/(6)x100%		(16)
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp							
	Jakarta Utara yang Optimal																																							
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	Average	407.394.396.821	4	98.131.724.793	4	103.374.460.246	-	-	16.743.835.871	115,14%	4	100,00%	23.219.834.199	84,25%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	39.963.670.070	38,66%	4,00	138.095.394.863	100,00%	33,90%	Kota Adm. Jakbar						
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	Average	284.715.587.294	4	110.678.715.574	4	115.046.916.964	-	-	18.182.426.941	115,83%	4	100,00%	25.152.711.694	86,49%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	43.335.138.635	37,67%	4,00	154.013.854.209	100,00%	54,09%	Kota Adm. Jaksel						
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	Average	548.135.015.955	4	136.259.194.417	4	140.571.596.056	-	-	22.187.956.987	123,99%	4	100,00%	31.508.245.720	93,57%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	53.696.202.707	38,20%	4,00	189.955.397.124	100,00%	34,65%	Kota Adm. Jaktim						
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	Average	20.214.532.753	4	7.274.866.271	4	7.126.537.472	-	-	1.251.551.000	124,47%	4	100,00%	1.496.162.851	74,97%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	2.747.713.851	38,56%	4,00	10.022.580.122	100,00%	49,58%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu						
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	Average	1.645.190.934.455	4	346.396.776.280	4	360.728.853.673	-	-	85.426.904.430	152,14%	4	100,00%	85.193.029.352	88,66%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	170.619.933.782	47,30%	4,00	517.016.710.062	100,00%	31,43%	Kota Adm. Jakpus						
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average	1.645.190.934.455	4	346.396.776.280	4	360.728.853.673	-	-	85.426.904.430	152,14%	4	100,00%	-			-	-	-	4	AVG	100,00%														
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	Average	1.750.730.602.261	4	406.833.435.447	4	428.689.045.944	-	-	100.087.273.110	136,05%	4	100,00%	99.790.624.386	74,52%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	199.877.897.496	46,63%	4,00	606.711.332.943	100,00%	34,65%	Kota Adm. Jakut						
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average	1.750.730.602.261	4	406.833.435.447	4	428.689.045.944	-	-	100.087.273.110	136,05%	4	100,00%	-			-	-	-	4	AVG	100,00%														
	Meningkatnya Kinerja Melalui	7.01.02		Indeks kepuasan terhadap pengelolaan	Indeks	4	Average	2.076.925.357.078	4	502.792.469.844	4	528.106.635.928	-	-	121.567.053.215	131,27%	4	100,00%	124.065.605.997	80,55%	-	-	-	-	4	AVG	100,00%	245.632.659.212	46,51%	4,00	748.425.129.056	100,00%	36,04%							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab			
												I				II				III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)			
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K	%Rp		
	Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal		Program Pengelolaan Kecamatan	kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)																														Kota Adm. Jakbar	
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average		4		4			-	-	131,27%	4	100,00%							4	AVG	100,00%		4,00		100,00%				
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	Average	2.221.599.197.846	4	540.725.723.795	4	568.616.956.931	4	568.616.956.931	-	-	125.796.560.031	134,50%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	Kota Adm. Jaksel
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average	2.221.599.197.846	4	540.725.723.795	4	568.616.956.931	4	568.616.956.931	-	-	125.796.560.031	134,50%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	Average	2.633.506.336.858	4	607.512.109.845	4	641.177.750.730	4	641.177.750.730	-	-	146.030.138.873	139,32%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	Kota Adm. Jaktim
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average	2.633.506.336.858	4	607.512.109.845	4	641.177.750.730	4	641.177.750.730	-	-	146.030.138.873	139,32%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Jurusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	Average	186.178.374.784	4	38.178.435.834	4	42.046.168.867	4	42.046.168.867	-	-	9.589.279.578	125,45%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap ayanan PPSU	Indeks	4	Average	186.178.374.784	4	38.178.435.834	4	42.046.168.867	4	42.046.168.867	-	-	9.589.279.578	125,45%	4	100,00%					4	AVG	100,00%		4,00		100,00%			100,00%	
	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas																																		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan ayanan informasi dan komunikasi publik	%	100	Average	231.402.160.533	100	53.915.825.625	100	62.553.786.427	100	100,00%	7.474.463.384	209,67%	100	100,00%	13.153.771.897	101,67%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	20.628.235.281	32,98%	100,00	74.544.060.906	100,00%	32,21%	Diskominfotik	
4.2	Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah pemenuhan ayanan teknologi informatika dan komunikasi	Perangkat Daerah	51	Average	2.642.120.812.914	51	440.993.320.947	51	574.168.614.157	20	100,00%	7.234.324.139	27,90%	30	100,00%	127.019.405.760	120,04%	-	-	-	-	30	TLK	58,82%	134.253.729.899	23,38%	40,50	575.247.050.846	79,41%	21,77%	Diskominfotik	
	Peningkatan Penggunaan Data dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Daerah	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas	%	100	Average	55.577.678.336	100	5.879.373.700	100	8.110.929.674	100	100,00%	604.200.000	205,65%	100	100,00%	861.600.000	98,69%	-	-	-	-	100	TLK	100,00%	1.465.800.000	18,07%	100,00	7.345.173.700	100,00%	13,22%	Diskominfotik	
	Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan ayanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	100	TLK	65.278.242.348	100	14.710.520.000	98	8.514.626.840	100	102,04%	425.323.570	192,10%	100	102,00%	632.728.690	103,92%	-	-	-	-	100	TLK	102,04%	1.058.052.260	12,43%	100,00	15.768.572.260	100,00%	24,16%	Diskominfotik	
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah																																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab									
										I				II												III		IV						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)		
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konsol idasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp		%K	%Rp
	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	4.01.02	Program Penataan Organisasi	Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan dan penguatan organisasi	Nilai	7,28	TLK	3.138.213.478	N/A	7,2	877.387.740	-	-	69.300.000	92,65%	-	-	253.500.000	93,80%	-	-	-	-	-	TLK	-	N/A	1.557.722.010	N/A	49,64%	Biro ORB			
				Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai	12,14	TLK		N/A	1.234.922.010		12,12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		N/A	N/A				
				Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan manajemen perubahan	Nilai	4,9	TLK		N/A	4,85		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		TLK	-		N/A	N/A	
	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	4.01.05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	70	TLK	19.100.586.084	100	90	2.507.510.483	90	100,00%	190.072.599	118,81%	90	100,00%	433.999.608	104,73%	-	-	-	-	90	AVG	100,00%	95,00	3.174.647.989	135,71%	16,62%	Biro Hukum			
				Persentase penanganan perkara litigasi yang diselesaikan	%	100	TLK		100	100,00%		100	100,00%		-	-	-	-	100	AVG	100,00%	100,00	100,00%											
				Persentase penanganan perkara non litigasi yang diselesaikan	%	100	TLK		100	100,00%		100	100,00%		-	-	-	-	100	AVG	100,00%	100,00	100,00%											
				Nilai capaian pelaksanaan aksi HAM daerah	Nilai	94	TLK		91	92		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,50	48,40%								
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan pembangunan lingkup provinsi pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	90	TLK	146.098.966.000	97,22	80	24.412.149.723	-	-	3.338.784.900	171,83%	-	-	1.983.060.196	44,70%	-	-	-	-	-	TLK	-	48,61	20.154.736.223	54,01%	13,80%	Bappeda			
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan pada ndeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	90	TLK		88,46	80		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,23	49,14%								
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan pembangunan daerah lingkup perangkat daerah	Nilai	90	TLK	7.781.499.000	97,05	80	3.509.672.562	-	-	231.925.000	99,78%	-	-	925.830.500	117,60%	-	-	-	-	-	TLK	-	48,53	3.897.916.500	53,92%	50,09%	Bappeda			
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup perangkat daerah		90	TLK		87,5	80		-	-		99,78%	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	43,75		48,61%					
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian TL LHP internal dan eksternal	%	95	TLK	348.200.596.774	91	11.829.787.500	92	53.934.431.002	-	-	103.710.000	246,93%	-	-	2.306.687.500	343,63%	-	-	-	-	-	TLK	-	2.410.397.500	4,47%	45,50	14.240.185.000	47,89%	4,09%	Inspektorat
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	4	TLK	79.580.930.043	N/A	10.337.736.299	3,5	17.043.329.533	-	-	2.998.927.500	176,37%	-	-	3.444.256.500	268,54%	-	-	-	-	-	TLK	-	6.443.184.000	37,80%	N/A	16.780.920.299	N/A	21,09%	Inspektorat
	Percepatan, Pengendalian,	4.01.06	Program Perekonomian	Persentase kebijakan sesuai dengan peraturan	%	100	TLK	640.053.563	100	2.770.371.300	100	145.136.400	100	100,00%	-	-	100	100,00%	48.125.000	100,00%	-	-	-	-	100	TLK	100,00%	48.125.000	33,16%	100,00	2.818.496.300	100,00%	440,35%	Biro Perkeu

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung g jawab								
												I				II													III		IV					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)			
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp		
	dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan		dan Pembangunan																																	
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel																																				
4.4	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pruden dan Berkelanjutan	5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD	%	100	TLK	15.989.942.352.329		100		100		-	-			-	-			-	-	-	-	-	AVG	-			50,00		50,00%			
				Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	%	100	TLK	15.989.942.352.329		100	650.826.794.148	100	1.692.689.141.104	100	100,00%	57.069.457.145	86,22%	100	100,00%	230.934.207.172	368,85%	-	-	-	-	100	AVG	100,00%	288.003.664.317	17,01%	100,00	938.830.458.465	100,00%	5,87%		BPKD
				Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100	TLK	15.989.942.352.329		100		100		100	100,00%			N/A	N/A			-	-	-	-	50	AVG	50,00%			75,00		75,00%			
	Perbaikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Menerapkan Prinsip Value For Money	4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	90	TLK	20.776.460.915		92,39	3.215.047.740	85	6.940.691.102	95,6	115,88%	262.296.000	67,08%	87,6	104,90%	766.970.000	92,10%	-	-	-	-	87,6	TLK	103,06%	1.029.266.000	14,83%	90,00	4.244.313.740	99,99%	20,43%		BPPBJ
	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pruden dan Berkelanjutan	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu	%	100	TLK	6.428.418.497		100	1.570.601.800	100	2.016.377.940	-	-	21.500.000	100,00%	-	-	215.315.000	83,91%	-	-	-	-	-	AVG	-	236.815.000	11,74%	50,00	1.807.416.800	50,00%	28,12%		BPKD
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset, Penagihan Putang, Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Jinum, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%	25	TLK	331.947.585.316		10		15		29,84	1989,33%			35,4	1011,40%			-	-	-	-	65,24	SUM	434,93%			22,40%	37,62		150,48%		
				Indeks kepatuhan tertib aset	Indeks	4	TLK	331.947.585.316		4		4		4	100,00%			4	100,00%			-	-	-	-	4	AVG	100,00%			22,40%	4,00		100,00%		
				Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset				99.862.368.174				94.803.095.345			7.006.665.933	192,69%			14.232.474.404	67,10%			-	-	-	-	100	AVG	-			22,40%	100,00		100,00%	
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	Average	415.713.775.380		101,25	234.264.359.692	100	221.965.291.888	16,45	131,60%	60.834.398.767	3617,39%	36,72	111,30%	102.407.136.696	139,65%	-	-	-	-	36,72	TLK	36,72%	163.241.535.463	73,54%	68,99	397.505.895.155	71,65%	68,99%	95,62%	Bapenda
				Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	%	100	Average			100		19,18		153,44%	43,29			173,20%	-			-	-	-	43,29	TLK	43,29%	71,65			71,65%					
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur																																				
4.5	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit	Nilai	110	TLK			110		110		-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			55,00		50,00%			
				Nilai aspek promosi dan mutasi pada indeks sistem merit	Nilai	25	TLK	135.204.377.494		37,5	16.613.802.813	37,5	28.527.024.200	-	-	1.139.523.390	83,19%	-	-	3.629.104.660	118,14%	-	-	-	-	-	TLK	-	4.768.628.050	16,72%	18,75	21.382.430.863	75,00%	15,81%		BKD
				Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	69,53	TLK			52,5		59,53		-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			26,25		37,75%			
				Nilai aspek manajemen kinerja serta penggajian,	Nilai	110	TLK			112,5		112,5		-	-			-	-			-	-	-	-	-	TLK	-			56,25		51,14%			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD provinsi pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggun g jawab				
											I				II				III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)		(8)		(9)				(10)				(11)		(12)		(13)				(14) =(7)+(13)		(15)=(14)/(6)x100%		(16)	
				Indikator	satuan	K	Konso lidasi	Rp	K	R	K	Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	%K	Rp	%Rp	K	Rp	K	Rp	K	konso lidasi	%K	Rp	%Rp	K	Rp	%K		%Rp
				penghargaan dan disiplin pada indeks sistem merit																														
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	4	TLK	156.000.000	3,5	39.000.000	3	39.000.000	3	100,00%	-	-	4	133,30%	9.750.000	100,00%	-	-	-	-	3,5	AVG	116,67%	9.750.000	25,00%	3,50	48.750.000	87,50%	31,25%	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai tugas belajar yang lulus tepat waktu	%	95	TLK	79.652.368.796	100	13.413.245.541	100	17.090.017.169	-	-	2.752.087.536	100,00%	-	-	2.703.499.206	56,45%	-	-	-	-	-	TLK	-	5.455.586.742	31,92%	50,00	18.868.832.283	52,63%	23,69%	BPSDM
	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS	Nilai	6	TLK	234.328.305.480	8	36.348.935.244	6	42.439.525.772	-	-	2.917.835.805	535,02%	-	-	6.488.263.405	90,80%	-	-	-	-	-	TLK	-	9.406.099.210	22,16%	4,00	45.755.034.454	66,67%	19,53%	BPSDM
				Nilai sistem merit pada sub aspek ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10	TLK		10		-		-	-			-	-			-	-	TLK	-	5,00	50,00%								
				Nilai sistem merit pada sub aspek penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan	Nilai	7,5	TLK		10		7,5		-	-			-	-			-	-	TLK	-	5,00	66,67%								
				Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5	TLK		10		7,5		-	-			-	-			-	-	TLK	-	5,00	66,67%								
				Persentase diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	%	66	TLK		74,58		62		-	-			-	-			-	-	TLK	-	37,29	56,50%								
	Rata-rata capaian kinerja (%)												99,28%	3.872.016.484.504	122,00%		99,73%	9.721.747.343.663	108,27%															
	Rata-rata capaian kinerja												SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI															

Sumber: Sistem informasi monitoring evaluasi (monev) kinerja, 2024 (diolah)

Keterangan: * Program tidak menggunakan APBD
** Didukung oleh anggaran Program Penunjang
*** Perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah
**** Tidak memiliki data kinerja (N/A)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2024, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dari seluruh tujuan dan sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran yang memiliki target indikator kinerja pada triwulan II tahun 2024, yaitu sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah. Namun, laporan hasil pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (LKPD TA 2023) sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Rata-rata capaian kinerja program prioritas pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk triwulan II tahun 2024 berada di angka 99,73% atau predikat kinerja organisasi sangat tinggi. Namun, terdapat beberapa program prioritas yang masih memerlukan upaya keras dalam memenuhi capaian realisasi tahunan, antara lain:
 - a. Program Penatagunaan Tanah;
 - b. Program Penanggulangan Bencana;
 - c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
 - d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
3. Realisasi serapan anggaran berada di angka Rp. 9.721.747.343.663 atau 108,27% dari target Triwulan II sebesar Rp. 8.979.563.710.126,-. Dengan demikian realisasi serapan anggaran masuk kategori sangat tinggi.
4. Salah satu indikator kinerja di Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu persentase penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi tidak memiliki data kinerja.
5. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang tidak ditrajektorikan di triwulan I dan II tahun 2024 dan pelaksanaan programnya menggunakan/ dibiayai dengan dana dekonsentrasi APBN. Selain itu, hal ini juga terjadi pada Program Kawasan Permukiman yang pelaksanaannya dibiayai melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan dan/ atau dana konversi kewajiban pengembang.
6. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan tidak memiliki target maupun trajektori capaian kinerja sepanjang tahun. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan melalui program penunjang.
7. Indikator kinerja Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu Persentase Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan, tidak memiliki target pada RKPD 2024. Hal ini dikarenakan terdapat perpindahan tupoksi dari DPMPSTP ke Bappeda sesuai dengan Pergub Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja, dimana Pergub tersebut disahkan setelah Pergub tentang renstra perangkat daerah disahkan.
8. Terdapat tiga indikator kinerja program Kab. Adm. Kep. Seribu yang tidak lagi diakomodasi dalam renja Kab. Adm. Kep. Seribu tahun 2024. Hal ini dikarenakan program tersebut telah dipindahkan ke Suku Badan Kesbangpol Kab. Adm. Kep. Seribu sesuai Pergub nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja.
9. Faktor penghambat capaian kinerja program pemprov DKI Jakarta triwulan II 2024 disebabkan antara lain:
 - a. Pada tahun 2023 sudah dilakukan penghentian kegiatan pelaksanaan PMPRB menindaklanjuti adanya perubahan instrumen evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - b. Adanya Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa penilaian Kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari level 1 s.d. 5 dan tidak menyajikan skoring, sedangkan target indikator program pada RPD adalah Tingkat kapabilitas APIP dengan nilai 3,5.
10. Rekomendasi untuk evaluasi hasil RKPD triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Perlu upaya yang lebih keras oleh perangkat daerah untuk mencapai target tahunan program-program prioritas yang belum memenuhi

- capaian realisasi triwulan II atau memiliki kriteria penilaian kinerja sangat rendah.
- b. Pada setiap tahapan perencanaan, disediakan mekanisme baik teknis maupun non teknis perihal kelengkapan dan kualitas atribut kinerja pada semua level kinerja (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan).
 - c. Penentuan trajektori target kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada setiap triwulan sebaiknya mempertimbangkan tren realisasi kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan setiap triwulan pada periode tahun sebelumnya.
 - d. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja organisasi maka, seluruh program yang merupakan turunan dari kinerja tersebut dapat dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah/ pejabat administrator/ pejabat pengawas. Kinerja tersebut harus memiliki target maupun trajektori capaian kinerja sepanjang tahun, sehingga pelaporan realisasi kinerjanya dapat direkam dan dipantau secara rutin dan berkala.
 - e. Sebaiknya dalam penyusunan aturan tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah agar memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan (RPD/ RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah). Hal ini didasarkan pada prinsip *performance based organization*.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas kondisi serta proyeksi perekonomian global dan nasional, arah kebijakan ekonomi daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Di tengah dinamika perekonomian global yang berubah cepat dengan tingginya risiko dan ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tetap tumbuh positif di tahun 2024. Masih solidnya proyeksi ekonomi dunia bersumber dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan akan tetap tumbuh kuat dan pertumbuhan ekonomi di Eropa yang diperkirakan juga tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi dengan laju yang berbeda antarnegara, dimana terjadi perlambatan ekonomi seperti antara lain di Tiongkok, India, dan Jepang. Kuatnya ekonomi AS terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, termasuk kebijakan fiskal akomodatif dan juga kenaikan ekspor. Namun, inflasi AS masih tinggi, sehingga ketidakpastian kemungkinan penurunan suku bunga (*Fed Funds Rate*) akan terus berlanjut. Keputusan The Fed pada pertemuan ke-5 pada Maret 2024 adalah mempertahankan suku bunga tetap pada kisaran 5,25-5,50 persen. The Fed menambahkan bahwa mereka akan mulai mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga apabila inflasi turun menjadi 2 persen.

Selain suku bunga, tensi geopolitik juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, menimbulkan dampak materiil terhadap tingginya harga energi serta pangan global dan menyebabkan terganggunya rantai pasokan yang berdampak pada kenaikan inflasi global. Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok juga mempengaruhi penurunan ekspor-impor kedua negara dan volume perdagangan dunia. Konflik Israel-Palestina menambah ketegangan geopolitik, memberi dampak signifikan di Timur Tengah dan dunia. Sementara itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara di dunia. Lebih dari 50 negara menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan regional. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan global karena investor cenderung akan lebih berhati-hati.

Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan global seperti dampak perubahan iklim, penuaan populasi (*aging population*), serta digitalisasi yang turut menentukan dinamika ekonomi global. Perubahan iklim menjadi faktor penghambat proses pemulihan ekonomi global.

Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun memperburuk dampak terbatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El Nino, sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya.

Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua (*aging population*) kian memberikan beban pada anggaran fiskal, sementara kenaikan tabungan masyarakat makin terbatas. Sementara negara berkembang yang masih menikmati bonus demografi belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja maupun kemampuan teknis bekerja. Berbagai tantangan tersebut mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta ketatnya pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju.

Sementara itu, kecepatan digitalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan *financial technology* (*FinTech*), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi *blockchain* dan perdagangan internasional hingga penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Namun di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber. Kinerja ekonomi global pada tahun 2023 diwarnai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan disertai divergensi pertumbuhan antar negara yang semakin melebar (Tabel 3.1). Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,2 persen (yoy), melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,5 persen (yoy). Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil sebesar 3,2 persen.

Ekonomi negara maju melambat secara signifikan dari 2,6 persen pada tahun 2022 menjadi 1,6 persen pada tahun 2023, namun diproyeksikan meningkat menjadi 1,7 persen pada tahun 2024. Di negara maju, pertumbuhan ekonomi didorong oleh AS yang tumbuh 2,5 persen pada tahun 2023, kemudian diproyeksikan meningkat menjadi 2,7 persen

pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang meningkat pada tahun 2023 sebesar 4,3 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,1 persen. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan diperkirakan melambat sebesar

4,2 persen. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat dari 5,2 persen pada 2023 menjadi 4,6 persen pada tahun 2024, dipengaruhi oleh pelemahan konsumsi dan penurunan kinerja sektor properti.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global

Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy)	2022	2023	Proyeksi
			2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Dunia	3,5	3,2	3,2
Negara Maju	2,6	1,6	1,7
Amerika Serikat	1,9	2,5	2,7
Kawasan Euro	3,4	0,4	0,8
Jepang	1,0	1,9	0,9
Negara Berkembang	4,1	4,3	4,2
Tiongkok	3,0	5,2	4,6
India	7,2	7,8	6,8
ASEAN-5	5,5	4,2	4,7
Amerika Latin	4,2	2,3	2,0
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,2	3,1
Timur Tengah dan Asia Tengah	5,5	2,0	2,8

Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO), April 2024

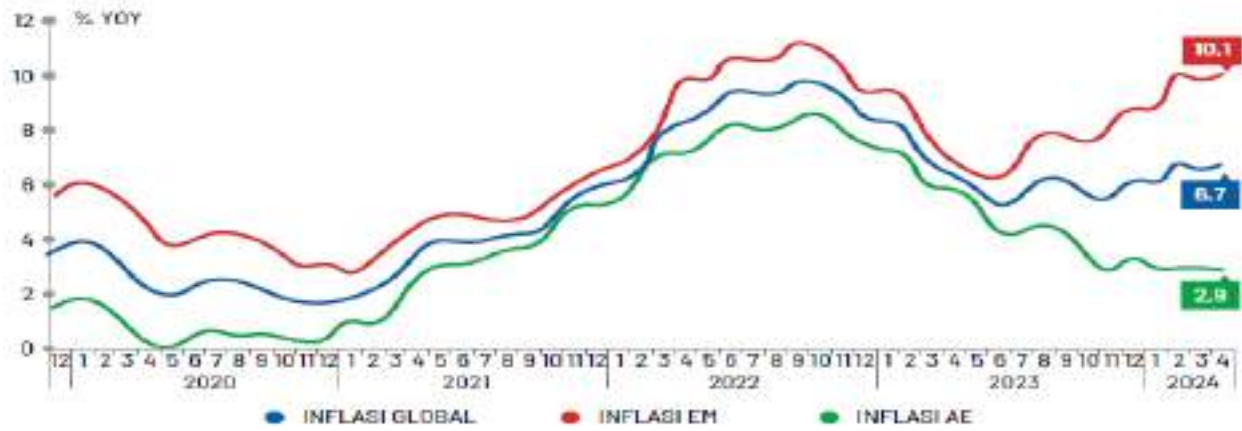
Di antara negara Asia, ASEAN-5 diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2024. Di samping tetap kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan ASEAN-5 juga didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi yang tetap terbuka di tengah fragmentasi geopolitik.

Gejolak geopolitik dan ekonomi akibat ketegangan Rusia-Ukraina mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi kebijakan ekonomi untuk program pemulihan ekonomi. Situasi ini berkaitan dengan peran krusial Rusia sebagai salah satu pemasok energi terbesar di dunia, dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu, Ukraina menduduki posisi sebagai pemasok gandum terbesar bagi beberapa negara. Besarnya peran kedua negara tersebut secara langsung mempengaruhi lonjakan harga energi dan pangan secara global, yang selanjutnya memicu inflasi di beberapa negara.

Inflasi, sebagaimana diketahui, sampai dengan saat ini lebih tinggi jika dibandingkan beberapa dekade sebelumnya sebagai dampak dari kebijakan moneter yang ketat dan cepat. Hal

ini mengakibatkan kesehatan masa depan perekonomian dunia tergantung dari sukses atau tidaknya kebijakan moneter dalam merespon tekanan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Sebagaimana terlihat dalam Grafik 3.1, tekanan inflasi di beberapa negara masih cukup tinggi walaupun sudah menunjukkan tren penurunan. Inflasi dunia turun menjadi sebesar 6,7 persen pada April 2024 dari level tertinggi 9,7 persen pada triwulan II 2022. Pada negara maju, inflasi April 2024 sebesar 2,9 persen, turun dibandingkan angka tertinggi tahun 2022 yang mencapai 8,4 persen. Sementara inflasi di negara berkembang masih cukup tinggi mencapai 10,1 persen, perlahan menurun dibanding tahun 2022 dengan inflasi tertinggi mencapai 11 persen. Tingginya tingkat inflasi didorong oleh peningkatan permintaan global sebagai efek dari kebijakan sebelumnya, terhambatnya rantai pasok, serta berkurangnya suplai. Selain itu, inflasi di beberapa negara juga dipengaruhi oleh kondisi yang ketat di pasar tenaga kerja yang berdampak pada kenaikan upah dan tingginya harga produksi, serta terdepresiasi nilai tukar mata uang domestik terhadap Dollar AS.

Grafik 3.1
Inflasi Global



Sumber: Bloomberg dan IMF, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta,

Prospek ekonomi global dalam jangka menengah diperkirakan butuh waktu lebih lama untuk mencapai keseimbangan antarnegara dan bahkan belum tentu dapat pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Dalam WEO Oktober 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2028 hanya 3,1 persen atau lebih rendah dari proyeksi sebesar 3,6 persen sebelum Covid-19 tahun 2020, dan dari proyeksi 4,9 persen sebelum krisis keuangan global tahun 2008 (Grafik 3.2A). Sekitar 80 persen penurunan pertumbuhan dimaksud disebabkan oleh penurunan pendapatan per kapita dan pertumbuhan produktivitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja.

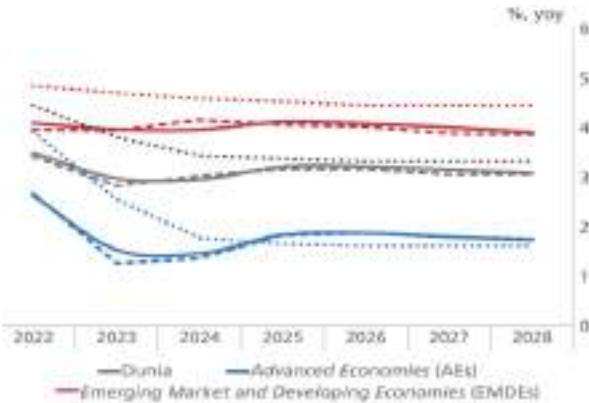
Di negara maju, sekitar sepertiga dari penurunan pendapatan juga didorong oleh

perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi. Di negara berkembang, penurunan pendapatan per kapita menyebabkan lebih lamanya jangka waktu untuk mengejar ketertinggalan kemajuan ekonominya dari negara maju.

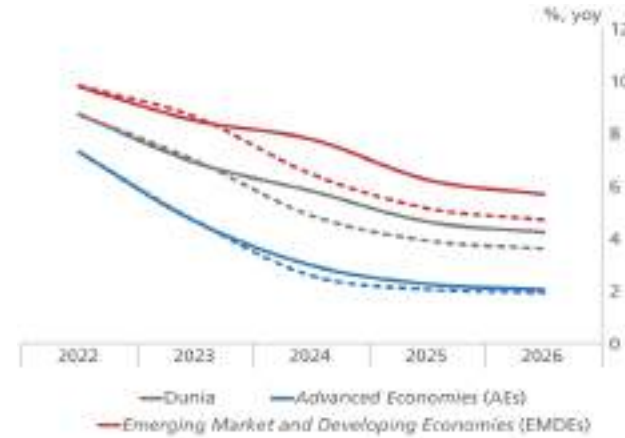
Sementara itu, fragmentasi geopolitik dan ekonomi menyebabkan proses penurunan inflasi global diperkirakan berjalan lambat (Grafik 3.2B). Pada tahun 2023, sekitar 72 negara (34 negara maju dan 38 negara berkembang) masih akan mengalami inflasi di atas sasarannya. Demikian pula pada tahun 2024, inflasi di sekitar 89 persen negara masih akan melebihi sasarannya. Inflasi di sebagian besar negara diperkirakan baru akan kembali stabil ke sasaran pada tahun 2025.

Grafik 3.2
Prospek Ekonomi Global Jangka Menengah

A. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Global Jangka Menengah



B. Prospek Inflasi Global Jangka Menengah



Sumber: IMF, World Economic Outlook (WEO) Oktober 2023, dalam Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia, 2023
Garis putus-putus = WEO April 2023, Titik-titik = WEO Januari 2022

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan global makin tinggi seiring dengan

meningkatnya ketegangan geopolitik. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan respons kebijakan serta penguatan kerja sama

internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi baik global maupun domestik, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia di triwulan I 2024 tetap kuat dan membaik. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi terus berlanjut. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi domestik pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (yoy).

Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik yang baik di konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan program bantuan sosial. Konsumsi Pemerintah juga membaik didorong oleh dampak positif pelaksanaan Pemilu 2024 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Investasi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkembangnya properti swasta. Investasi nonbangunan tetap terjaga, meskipun perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Namun, kinerja ekspor belum kuat sejalan dengan harga komoditas yang turun dan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama, seperti Tiongkok.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,63	2,01	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91
Konsumsi LNPRT	-4,21	1,62	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29
Konsumsi Pemerintah	2,12	4,25	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90
Investasi (PMTDB)	-4,96	3,8	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,4	3,79
Ekspor	-8,42	17,99	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50
Impor	-17,6	24,86	15	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77
PDB	-2,07	3,7	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11

Sumber: BPS, 2024

Perbaikan ekonomi nasional juga tercermin pada pertumbuhan positif seluruh Lapangan Usaha (LU) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh kinerja positif dengan

pertumbuhan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin), serta Informasi dan Komunikasi (Infokom) seiring dengan meningkatnya mobilitas.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,77	1,87	2,25	0,44	2,03	1,49	1,12	1,3	-3,54
Pertambangan dan Penggalian	-1,95	4	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,51
Industri Pengolahan	-2,93	3,39	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64	4,13

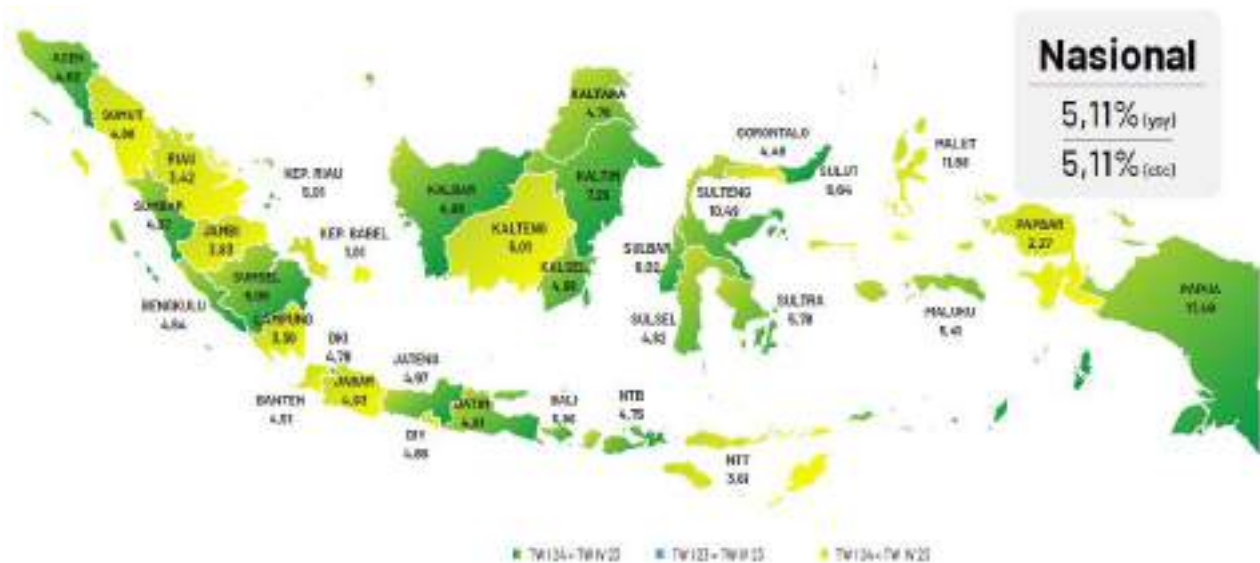
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,34	5,55	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	4,97	3,23	5,69	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44
Konstruksi	-3,26	2,81	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	4,63	5,53	4,94	5,29	5,1	4,09	4,85	4,58
Transportasi dan Pergudangan	-15,05	3,24	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,26	3,88	11,94	11,54	9,91	10,94	7,89	10,01	9,39
Informasi dan Komunikasi	1,61	6,82	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	1,56	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,91
Real Estate	2,32	2,78	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54
Jasa Perusahaan	-5,44	0,73	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-1,29	2,51	2,1	8,16	-6,24	1,61	1,50	18,88
Jasa Pendidikan	2,61	-1,41	0,57	1,02	5,43	-2,07	2,63	1,78	7,34
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,56	4,52	2,75	4,77	8,28	2,91	3,09	4,66	11,64
Jasa Lainnya	-4,1	8,25	9,47	8,9	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92
PDB	-2,07	3,7	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11

Sumber: BPS, 2024

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga (Gambar 3.1). Sebagian besar wilayah Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan dan Jawa. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama didorong oleh ekspor dan hilirisasi minerba, serta konsumsi swasta yang kuat. Ekonomi wilayah Jawa juga tumbuh kuat didukung oleh konsumsi dan investasi bangunan seiring dengan terus berlanjutnya penyelesaian PSN di tengah tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi didukung oleh investasi bangunan terkait pembangunan IKN dan

konsumsi swasta yang tetap kuat, namun terjadi pelemahan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) akibat penurunan permintaan dari mitra dagang utama, khususnya Tiongkok. Ekonomi wilayah Sumatera juga tumbuh baik karena ditopang konsumsi swasta dan investasi bangunan seiring dengan berlanjutnya PSN yang mampu menahan dampak kinerja ekspor komoditas SDA yang melambat. Sementara itu, wilayah Balinusra juga tetap tumbuh positif terutama bersumber dari konsumsi swasta sejalan dengan kembali pulihnya pariwisata dan investasi di sektor pertambangan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus membaik di sebagian besar wilayah di tengah normalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan sejalan dengan normalisasi belanja modal IKN, serta Sulampua karena selesainya realisasi investasi modal pada beberapa proyek hilirisasi nikel.

Gambar 3.1
Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2024

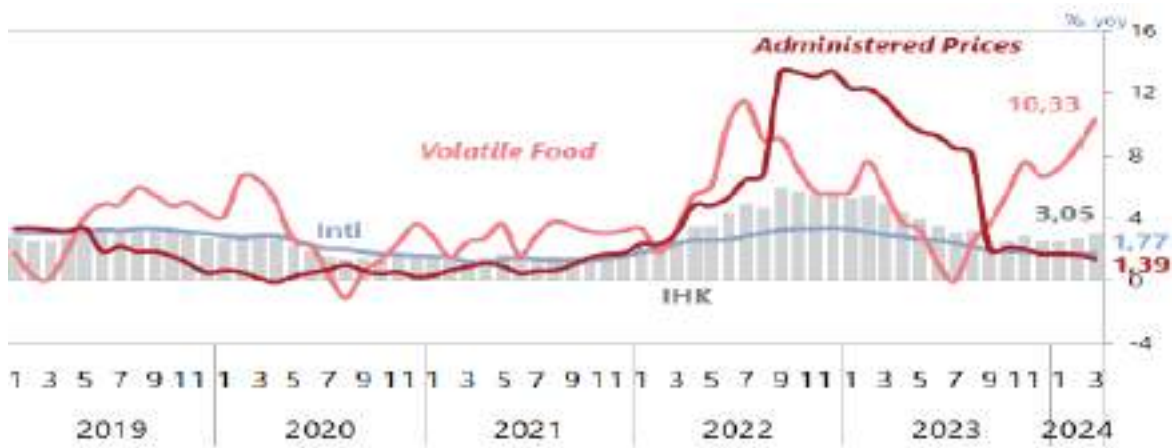


Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional menunjukkan tren menurun dan tetap terkendali dalam kisaran sasaran (Grafik 3.4). Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2024 tercatat sebesar 3,05 persen (yoy), jauh lebih rendah dari inflasi IHK akhir 2022 sebesar 5,51 persen (yoy). Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter yang *pro-stability*. Inflasi inti terjaga rendah sebesar 1,77 persen (yoy) dipengaruhi oleh *imported inflation* yang rendah, ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, dan kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik. Inflasi *volatile food* juga meningkat menjadi sebesar 10,33 persen (yoy) dari 8,47

persen (yoy) pada bulan sebelumnya, didukung oleh faktor musiman periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, dan pergeseran musim tanam dampak dari El Nino. Inflasi kelompok *administered prices* juga menurun menjadi 1,39 persen (yoy), sejalan dengan kebijakan fiskal Pemerintah yang tetap diarahkan menjadi *shock absorber* dari dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap ketahanan ekonomi domestik.

Grafik 3.3
Inflasi Nasional

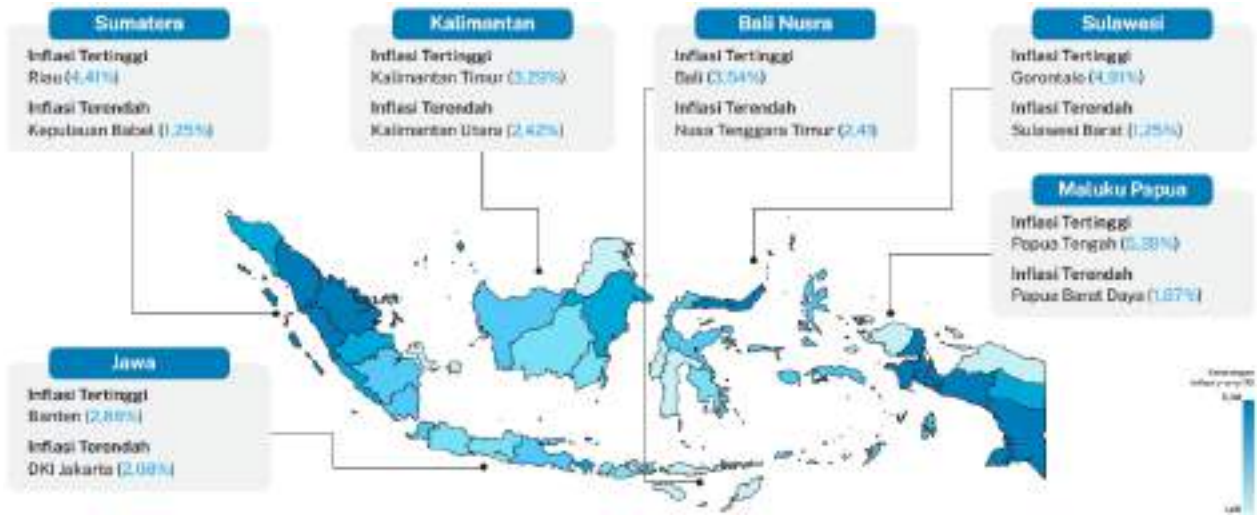


Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Secara spasial, sebagian besar daerah mengalami inflasi pada bulan Mei 2024 (Gambar 3.2). Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah yang mencapai 5,39 persen (yoy) dan

Provinsi Gorontalo sebesar 4,91 persen (yoy). Sedangkan, inflasi terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,25 persen (yoy).

Gambar 3.2
Peta Inflasi Daerah Bulan Mei 2024



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Dengan tren perbaikan kinerja perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2023 tercapai sebesar 5,05 persen. Ke depan, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7-5,5 persen (yoy) pada 2024 (Tabel 3.4). Prospek ini dipengaruhi oleh permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh meningkat dipengaruhi keyakinan pelaku ekonomi yang tetap optimis terhadap perbaikan kondisi ekonomi ke depan serta dampak positif pengaruh dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Inflasi yang diperkirakan tetap terkendali juga diperkirakan akan memberikan dampak positif pada terjaganya daya beli

masyarakat. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh membaik didorong perbaikan prospek bisnis, peningkatan aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi nasional juga diperkirakan mengalami perbaikan pada kinerja ekspor, khususnya pada ekspor jasa. Adanya pelaksanaan berbagai *event* skala internasional diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor jasa pada tahun 2024. Kinerja impor pada tahun 2024 masih akan tumbuh positif ditopang oleh impor barang konsumsi dan bahan baku sejalan dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan perbaikan kinerja ekspor. Impor barang modal juga diperkirakan meningkat, seiring dengan berlanjutnya berbagai PSN.

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

Indikator	2023	Proyeksi
		2024
(1)	(2)	(3)
Pertumbuhan ekonomi (persen, yoy)	5,05	4,7 - 5,5
Inflasi (persen, yoy)	2,61	2,5 ± 1

Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, dalam “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Sejalan dengan perbaikan perekonomian nasional, tingkat inflasi nasional secara keseluruhan pada 2023 tercatat sebesar 2,61 persen dan terkendali dalam target $3,0 \pm 1$ persen. Pemerintah perlu terus mencermati risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap tetap terkendalnya inflasi, termasuk dampak kenaikan harga energi dan pangan global untuk memastikan inflasi tetap terkendali

dalam kisaran $2,5 \pm 1$ persen pada 2024 sesuai target inflasi yang ditetapkan.

Dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2023, Bank Indonesia menyebutkan bahwa prospek perbaikan ekonomi nasional akan terus berlanjut dengan stabilitas yang tetap terjaga sehingga mendukung kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju. Dalam jangka menengah panjang, pertumbuhan

ekonomi Indonesia akan terus membaik ditopang oleh konsumsi swasta yang meningkat sejalan dengan terjaganya daya beli, dukungan kebijakan fiskal dan moneter, serta makin besarnya peran generasi muda milenial. Investasi akan meningkat seiring dengan peningkatan ekspor dan juga berlanjutnya PSN. Kinerja ekspor juga akan makin meningkat seiring dengan perbaikan prospek ekonomi global dan makin maraknya program hilirisasi di berbagai sektor.

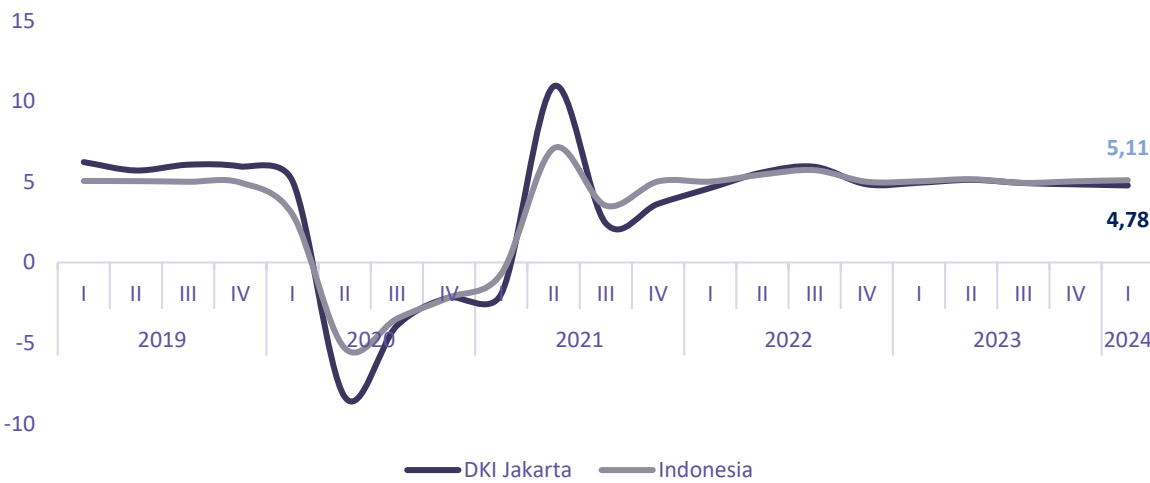
Konsistensi implementasi reformasi struktural, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, berbagai program hilirisasi, akselerasi digitalisasi, dan penguatan sumber daya manusia akan mampu memperkuat kapasitas perekonomian sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi tanpa memberikan tekanan yang signifikan pada stabilitas. Untuk itu, perlu difokuskan perhatian pada penguatan bauran kebijakan nasional sebagai upaya memperkuat

stabilitas eksternal dari rambatan global, termasuk dampaknya terhadap pengendalian inflasi domestik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju.

3.1.3 Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Sejalan dengan nasional, perekonomian DKI Jakarta menunjukkan tren perbaikan pasca mengalami kontraksi akibat pandemi global yang berimbas pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2021. Grafik 3.4 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan DKI Jakarta kembali bangkit sejak triwulan IV 2021. Pada triwulan I 2024, perekonomian DKI Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 4,78 persen (yoy), walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,85 persen (yoy). Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,11 persen (yoy).

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS, dalam Bank Indonesia “Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Mei 2024”

Dari sisi pengeluaran, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2024 terutama disumbang oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponennya, kecuali

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Ekspor yang mengalami kontraksi, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Pengeluaran

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Konsumsi Rumah Tangga	-2,23	3,54	5,64	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25
Konsumsi LNPRT	-4,06	0,10	6,25	7,95	9,53	6,27	15,45	9,84	19,70

Komponen	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Konsumsi Pemerintah	14,05	9,77	-9,55	1,79	6,06	-15,87	-5,04	-3,86	30,30
Investasi (PMTB)	-6,98	1,05	4,51	1,32	4,22	4,17	5,17	3,89	4,36
Ekspor	-9,70	11,26	12,60	11,89	8,93	5,82	4,46	7,67	3,23
Impor	-10,74	12,45	8,48	7,01	8,19	2,82	3,16	5,25	6,30
PDRB	-2,39	3,55	5,25	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96	4,78

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sejalan dengan masih kuatnya permintaan domestik. Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga sebesar 5,25 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,23 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi RT yang meningkat terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi kelompok hotel dan restoran, transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya sejalan dengan berlangsungnya bulan Ramadan dan penyelenggaraan MICE di DKI Jakarta. Selain itu, meningkatnya konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh penyaluran THR lebih awal.

Dari sisi konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), kinerjanya tercatat sebesar 19,70 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 15,45 persen (yoy). Tingginya konsumsi LNPR pada triwulan I 2024 didorong oleh meningkatnya aktivitas partai politik pada Pemilu serta meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat pada bulan Ramadan. Pertumbuhan yang signifikan juga terjadi dari sisi konsumsi pemerintah, dimana pada triwulan I 2024 pertumbuhan tercatat sebesar 30,30 persen (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,04 persen (yoy). Membaiknya konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN. Belanja pegawai pada triwulan I 2024 didorong oleh peningkatan gaji ASN dan penyaluran THR lebih awal.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau PMTB DKI Jakarta pada triwulan I 2024 tertahan, menjadi sebesar 4,36 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17 persen (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh kontraksi pada investasi nonbangunan

dipengaruhi perilaku *wait and see* investor pada periode Pemilu. Di sisi lain, investasi bangunan masih tumbuh positif yang terutama didorong oleh masih berlangsungnya pembangunan proyek strategis multitalahun Pemerintah, seperti MRT, LRT, kawasan *Transit on Development* (TOD), *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan jalan tol.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih tertahan dan tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 4,46 persen (yoy). Melambatnya kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh penurunan pada ekspor barang yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi , tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor (Laut Merah), adanya permasalahan kualitas dan keamanan produk ekspor, serta pembatasan ekspor di beberapa negara tujuan ekspor. Berdasarkan komoditasnya, penurunan pada kinerja ekspor barang, utamanya dipengaruhi oleh penurunan ekspor mesin dan peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewan/nabati. Adapun dari sisi ekspor jasa, kinerja ekspor jasa pada triwulan I 2024 juga tumbuh melambat yang tercermin dari menurunnya kedatangan wisata mancanegara ke Jakarta.

Berbeda dengan pertumbuhan ekspor yang melambat, kinerja impor tumbuh meningkat pada triwulan I 2024 sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Impor pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 6,30 persen (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 3,16 persen (yoy). Meningkatnya kinerja impor terutama bersumber dari perdagangan antardaerah sehubungan dengan pemenuhan untuk kebutuhan Pemilu dan HKBN Ramadan-Idul Fitri. Selain itu, meningkatnya impor jasa (masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri) sejalan dengan berlangsungnya

berbagai *event* di luar negeri yang menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya impor.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan serta LU Jasa Keuangan yang termasuk dalam LU Utama Jakarta tumbuh melambat dan menjadi penahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I 2024

(Tabel 3.6). Struktur PDRB Jakarta menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku pada triwulan I-2024 masih didominasi oleh lima lapangan usaha, yaitu Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; serta Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Tabel 3.6
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Sisi Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023					2024
				TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,49	4,14	2,59	0,15	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19
Pertambangan dan Penggalian	-6,43	-4,06	-5,43	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43
Industri Pengolahan	-10,36	11,05	5,88	1,58	1,15	2,13	2,54	1,86	-0,53
Pengadaan Listrik dan Gas	-10,95	-16,30	-2,31	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,68	4,07	0,51	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22
Konstruksi	-5,55	0,09	1,69	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,04	5,46	7,78	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,46
Transportasi dan Pergudangan	-7,63	12,75	7,17	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-16,21	8,99	9,31	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56
Informasi dan Komunikasi	11,05	4,65	6,96	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	0,12	1,23	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02
Real Estate	1,57	1,77	2,04	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31
Jasa Perusahaan	-2,07	-0,21	5,96	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,56
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-5,79	-2,82	2,35	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16
Jasa Pendidikan	2,64	0,81	-0,12	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,85	8,10	9,28	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09
Jasa Lainnya	-4,08	-1,90	15,27	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45
PDRBL	-2,39	3,55	5,25	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96	4,78

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Setelah mengalami perlambatan kinerja pada triwulan IV 2023, LU Perdagangan Besar dan Eceran mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,46 persen (yoy) pada triwulan I 2024, lebih

tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (3,78 persen, yoy). Hal ini sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang meningkat. LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 mengalami

kontraksi sebesar 0,53 persen (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,54 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang juga melambat.

Selain itu, LU Jasa Keuangan pada triwulan I 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,02 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang cukup tinggi mencapai 10,24 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Jasa Keuangan utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja jasa penunjang keuangan, jasa keuangan lainnya, serta asuransi. Sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan berbagai proyek strategis Pemerintah di Jakarta yang bersifat multitalahun, LU Konstruksi kembali mencatatkan peningkatan kinerja dengan tumbuh 6,27 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,53 persen (yoy). Sementara itu pada LU Infokom tercatat tumbuh sebesar 6,38 persen (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,57 persen (yoy). Kembali meningkatnya pertumbuhan LU Infokom seiring dengan peningkatan penggunaan paket data dan internet serta meningkatnya jumlah penonton bioskop yang sejalan pula dengan kinerja konsumsi RT yang meningkat.

Selanjutnya, LU Jasa Perusahaan mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,56 persen (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,03 persen (yoy). Kinerja LU Jasa Perusahaan meningkat seiring dengan maraknya penyelenggaraan MICE di Jakarta

pada triwulan I 2024. Pada triwulan I 2024, LU Akmamin juga mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 9,56 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,40 persen (yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang juga meningkat pada kelompok hotel dan restoran. Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perlambatan kinerja sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,76 persen (yoy). Penyebab perlambatan ini utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Perbaikan kinerja perekonomian DKI Jakarta juga terlihat dari tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta. Pada triwulan I 2024, tingkat inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 2,18 persen (yoy), tetap terkendali dalam sasaran target inflasi, lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,28 persen (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,05 persen (yoy). Relatif terkendalinya inflasi tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi sebagai hasil sinergi TPID melalui program pengendalian inflasi yang mengacu pada pedoman 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) yang tertuang pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024. Upaya pengendalian terus dilakukan agar tekanan inflasi tidak mengalami akselerasi lebih lanjut dan sebagai antisipasi dampak tekanan inflasi global.

Grafik 3.5
Inflasi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024

Lebih rendahnya tekanan inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2024 bersumber dari penurunan tekanan inflasi pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya di tengah kelompok lainnya yang mengalami tekanan kenaikan inflasi. Kelompok dengan andil inflasi tertinggi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan.

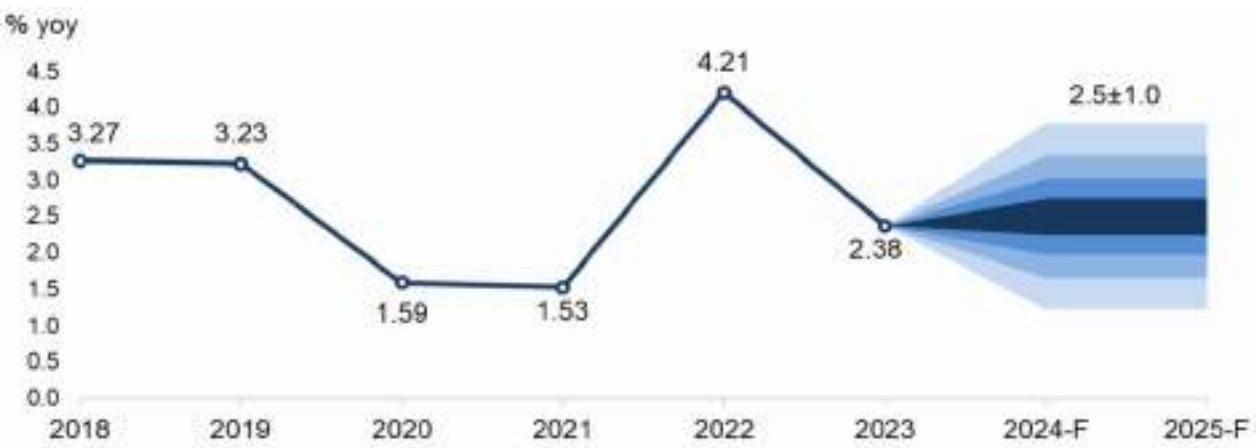
Ke depan, inflasi DKI Jakarta untuk keseluruhan tahun 2024 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran yaitu $2,5 \pm 1\%$. Prakiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang akan lebih kondusif pasca berlangsungnya El Nino pada 2023 dan didukung oleh sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang kuat dalam TPID

dengan tetap berfokus pada strategi 4K, utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi utamanya dilakukan melalui:

- a. Penyaluran bansos antara lain Program Pangan Bersubsidi berkolaborasi dengan BUMD Pangan;
- b. Menahan kenaikan tarif transportasi dan layanan publik;
- c. Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah komoditas yang masih mengalami tekanan harga khususnya beras dan minyak goreng bekerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan; serta

memperluas kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah produsen potensial yang surplus serta memperkuat kerja sama dengan TPID Bodetabek yang mempunyai hubungan ekonomi kuat dengan Jakarta. Proyeksi tersebut juga sudah memasukkan profil pergeseran komoditas terkait penggunaan Survei Biaya Hidup 2022.

Grafik 3.6
Proyeksi Inflasi DKI Jakarta



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

Sejalan dengan proyeksi terkendalnya tingkat inflasi di DKI Jakarta, berdasarkan asesmen Bank Indonesia, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan masih akan melanjutkan pertumbuhan yang tinggi pada 2024 (4,8 – 5,6 persen). Prakiraan ini terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi seiring kuatnya optimisme konsumen dan daya beli yang tetap terjaga. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi Jakarta pada tahun 2024 oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan penghasilan (UMP dan gaji ASN) serta terkendalnya laju inflasi. Meningkatnya aktivitas MICE dan event baik skala nasional maupun internasional di Jakarta

juga turut mendorong konsumsi RT tumbuh meningkat. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi, sejalan dengan perbaikan postur APBN dan APBD serta kenaikan belanja untuk mendukung Pemilu 2024. Adapun kinerja investasi juga diperkirakan masih akan tumbuh meningkat didorong terutama oleh masuknya investasi untuk berbagai pembangunan proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta yang bersifat multitahun. Di sisi lain, kinerja ekspor diperkirakan masih akan tertahan dipengaruhi terutama oleh dinamika perkembangan ekonomi global pada tahun 2024 dan pembatasan kuota ekspor di beberapa negara.

Dari sisi Lapangan Usaha, perekonomian DKI Jakarta diproyeksikan bertumbuh lebih baik dari tiga sektor utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. Ketiga sektor tersebut diperkirakan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2024. LU Perdagangan Besar dan Eceran diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kenaikan UMP dan gaji ASN pada tahun 2024. Kondisi ini juga terindikasi dari proyeksi penjualan mobil Gaikindo pada tahun 2024 yang juga diperkirakan lebih baik dibanding tahun lalu. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu semakin masifnya pelaksanaan MICE dan *event* skala internasional di DKI Jakarta, termasuk MICE dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2024 juga diperkirakan tumbuh meningkat yang terutama didorong untuk pemenuhan permintaan domestik. Beberapa jenis industri yang diperkirakan akan tumbuh meningkat yaitu industri makan dan minum, industri tekstil, dan industri kimia. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan yang lebih baik diperkirakan akan tertahan sejalan dengan penurunan kinerja industri terutama industri otomotif sejalan dengan penurunan kinerja ekspor akibat adanya permasalahan kualitas dan keamanan serta pembatasan kuota ekspor. LU Konstruksi pada tahun 2024 juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yang terutama didorong oleh masih berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis Pemerintah DKI Jakarta yang bersifat multitalun, yaitu antara lain NCICD, 6 ruas jalan tol dalam kota, MRT, LRT Jakarta, serta kawasan TOD. Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan jaringan tol JORR 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di wilayah Jabodetabek.

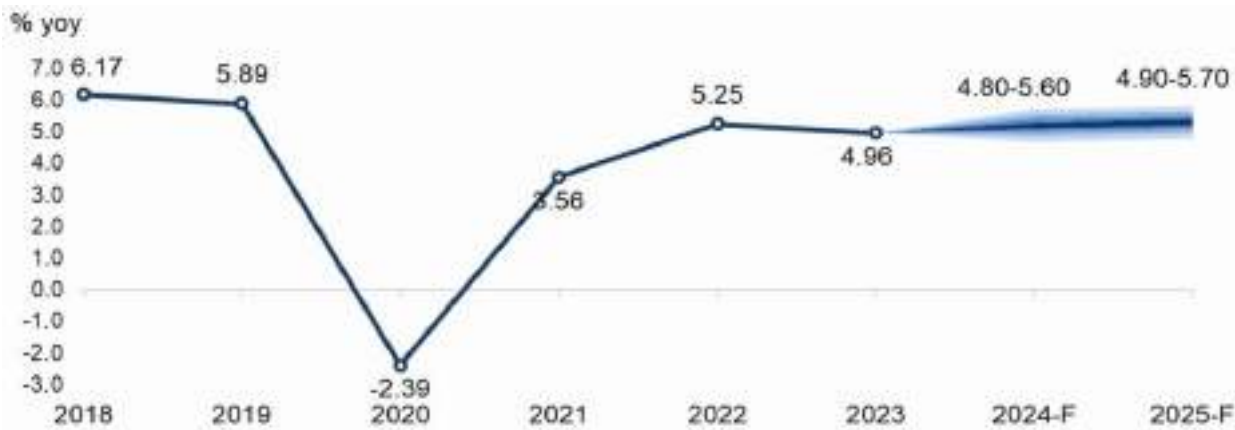
Sementara itu, LU utama lainnya seperti LU Infokom juga diperkirakan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif didorong oleh tingginya produksi film dan permintaan film di berbagai kanal (bioskop dan beberapa aplikasi *mobile streaming*), meningkatnya

penggunaan paket data periode Pemilu dan Pilkada serentak, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital sejalan dengan perkembangan digitalisasi yang terus berlangsung. Adapun, LU Jasa Keuangan dan Asuransi juga diperkirakan masih akan tumbuh positif di tahun 2024 seiring dengan intermediasi perbankan yang diperkirakan masih tetap kuat terutama dipengaruhi oleh masih tingginya penyaluran kredit.

Sektor LU Jasa lainnya seperti LU Akmamin diperkirakan juga akan tetap tumbuh positif, sejalan dengan berlangsungnya beberapa *event* berskala nasional dan internasional yang diselenggarakan di Jakarta termasuk MICE dalam rangka mendukung aktivitas Pemilu. Berdasarkan data terkini, terdapat 19 konser musik yang sudah terjadwal dan akan dilaksanakan di DKI Jakarta. Jumlah ini kemungkinan besar akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun 2024. Beberapa konser musik khususnya skala internasional yang dilaksanakan di DKI Jakarta, yaitu antara lain *The 38th Golden Disc Awards*, *Jonas Brother Concert*, *Ed Sheeran*, dan *Bruno Mars*. Untuk *event* olahraga terdapat 9 *event* yang saat ini sudah terjadwal dilaksanakan di Jakarta, dengan mayoritas berskala internasional, yaitu antara lain *Indonesia Master 2024 (Super 500)*, *Jakarta International Marathon*, *Indonesia International Open 2024*, *Asian Rifle/Pistol Championship 2024*, dan *UFC 2024*. Sama halnya dengan konser musik dan *event* olahraga, kegiatan MICE di DKI Jakarta yang sudah sampai dengan saat ini berjumlah masing-masing sebesar 299 *event* untuk pameran dan 1.822 *event* untuk konferensi. Jumlah tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan jumlah pameran dan konferensi di tahun 2023.

Kendati demikian, LU Transportasi dan Pergudangan yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Jakarta, mengalami perlambatan kinerja dengan tumbuh sebesar 6,48 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,68 persen (yoy). Perlambatan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan utamanya berasal dari komponen transportasi barang yang juga sejalan dengan penurunan kinerja ekspor.

Grafik 3.7
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta



Sumber: BPS dan Proyeksi Bank Indonesia, 2024

Di tengah berbagai indikasi positif perekonomian Jakarta yang disertai dengan inflasi yang masih terjaga, perlu dicermati sejumlah faktor risiko yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan tekanan inflasi yaitu:

Dari sisi pertumbuhan ekonomi:

- a. Perlambatan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi yang lebih dalam di negara tujuan ekspor Jakarta;
- b. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tetap tinggi dan tensi geopolitik yang meluas;
- c. Pembangunan proyek strategis Pemerintah yang mundur dari *timeline*; serta
- d. Tahapan transisi perpindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara, terutama dari sisi fiskal.

Dari sisi inflasi:

- a. Dampak lanjutan El Nino terhadap pergeseran musim tanam dan musim panen yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pasokan pangan;
- b. Kenaikan harga bahan pangan untuk mendukung aktivitas Pilkada serentak;
- c. Tensi geopolitik yang meluas sehingga berdampak pada volatilitas harga energi dan pangan global;
- d. Potensi berlanjutnya kenaikan tarif kontrak dan sewa rumah seiring dengan permintaan yang meningkat;
- e. Kenaikan tarif pendidikan seiring dengan tahun ajaran baru anak sekolah;
- f. Berlanjutnya kenaikan tarif angkutan udara;
- g. Rencana kenaikan berbagai tarif layanan publik;
- h. Kembali meningkatnya harga emas perhiasan seiring dengan meningkatnya harga emas global.

Berbagai resiko tersebut berpotensi dapat memberikan dampak pada tertahannya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2024. Di samping itu, periode jelang Pilkada 2024 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih lanjut apabila tidak diiringi dengan pembangunan iklim politik yang positif. Oleh karena itu, untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah masih adanya berbagai tantangan dan risiko, penguatan perekonomian Jakarta penting untuk dilakukan antara lain melalui arah kebijakan berikut.

- a. Penguatan Peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional
 - 1. Optimalisasi sektor ekonomi utama, termasuk mendorong hilirisasi dan mendorong iklim investasi;
 - 2. Pengembangan sektor potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
- b. Penguatan sinergi pengendalian inflasi
 - 1. Penguatan program TPID Jakarta dalam 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP);
 - 2. Pertimbangan kembali terhadap rencana penyesuaian tarif layanan publik antara lain dengan memperhatikan besaran dan waktu yang tepat termasuk penerapan tarif secara bertahap dan progresif dengan memperhatikan kemampuan/golongan konsumen dan jumlah penggunaan hingga komunikasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat;
 - 3. Sinergi pengendalian inflasi dengan TPID Bodetabek, utamanya melalui rapat koordinasi, penguatan KAD, penguatan dan pertukaran data dan

- informasi hingga komunikasi bersama (*press release* Jabodetabek dan Iklan Layanan Masyarakat bersama); serta
4. Monitoring potensi dan dampak rambatan global.
 - c. Percepatan program sinkronisasi (pengelolaan sampah, penanganan banjir, pengelolaan infrastruktur, air minum, dan energi) Jabodetabekpunjur melalui kawasan aglomerasi.
 - d. Penguatan digitalisasi Pemerintah Daerah dan masyarakat
 1. Inklusi dan resiliensi SP Non Tunai (terutama QRIS) di beberapa sektor seperti sektor pariwisata, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan;
 2. Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS;
 3. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dalam mempertahankan status Pemda Digital dan peningkatan Indeks ETPD dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi melalui QRIS;
 4. Akselerasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah; serta
 5. Penguatan sinergi dan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Dalam rangka memperkuat Jakarta sebagai kontributor utama nasional dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, maka salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah optimalisasi sektor utama dengan pangsa terbesar, melalui *focusing* di tiap-tiap sektor serta pengembangan sektor potensial untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis pemetaan sektor ekonomi (*Forward and Backward Linkage* serta Penggolongan Sektor Basis dan Progresif) di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bank Indonesia, 5 (lima) sektor ekonomi utama yang memiliki pangsa terbesar dalam ekonomi DKI Jakarta antara lain: Industri Pengolahan (*Green HighTech*, otomotif dan kimia), Jasa Keuangan (Digitalisasi dan IFC-Regional), Informasi Komunikasi (Data Center dan Ekosistem *Startup*), Perdagangan (Hub dan Ecommerce), serta Konstruksi (TOD dan Infrastruktur Hijau). Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor-sektor ini

mencakup Transportasi dan Pergudangan, Pariwisata dan Akomodasi Makan Minum, Industri Kreatif, Jasa Kesehatan, Jasa Pendidikan, serta Pemberdayaan UMKM.

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, diperlukan strategi yang terencana dengan baik, antara lain:

- a. Peningkatan sinergi dan kerja sama
Peningkatan sinergi dan kerja sama perlu dilakukan dengan melibatkan penguatan kerja sama yang sudah ada dan pengembangan kerja sama dengan mitra baru. Kerja sama yang erat antara sektor-sektor ekonomi dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing.
- b. Penguatan regulasi dan *business environment*
Regulasi yang jelas dan mendukung serta lingkungan bisnis yang kondusif akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Birokrasi yang efisien dan perbaikan kebijakan bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pelaku usaha.
- c. Perluasan implementasi digital
Penerapan teknologi digital juga menjadi elemen kunci dalam strategi pengembangan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan produksi dan promosi, sektor ekonomi dapat meningkatkan daya saingnya.
- d. Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar
Pengembangan sinergi dengan daerah sekitar, terutama sebagai megapolitan Jabodetabek, dapat memperluas peluang kerja sama dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat. Kerja sama lintas daerah dapat meningkatkan konektivitas, pertukaran sumber daya, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan pengembangan sektor ekonomi utama dan potensial dapat melampaui kendala kritikal yang dihadapi dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi Jakarta secara keseluruhan dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan global.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah, kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, serta prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD DKI Jakarta Tahun 2024, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana berikut.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta

merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kebijakan pajak daerah di DKI Jakarta untuk Perubahan RKPD tahun 2024 adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Implementasi Kebijakan Pajak Daerah perihal pemberian Insentif Pajak Daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa strategi untuk mendukung kebijakan pajak daerah sebagai berikut :

- 1. Intensifikasi
 - a. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
 - c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment;
 - d. Penegakan hukum/law enforcement dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;

- e. Pemberdayaan Juru Sita, PPNS, Intel Pajak Daerah dalam upaya penegakan hukum;
 - f. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
 - g. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - h. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, tax clearance, law enforcement, sosialisasi, dan pendataan).
2. Ekstensifikasi
- Penguakuan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan retribusi daerah di DKI Jakarta untuk tahun 2024 adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut beberapa strategi untuk mendukung kebijakan retribusi daerah sebagai berikut :

- 1. Pengembangan retribusi daerah pada Retribusi *Online* Sistem (R.O.S) sebagai sarana pemungutan retribusi;
- 2. Digitalisasi pemungutan retribusi berbasis tiket atau dokumen yang dipersamakan;
- 3. Melakukan integrasi aplikasi yang dimiliki oleh SKPD pemungut retribusi ke dalam R.O.S;
- 4. Mendorong SKPD yang memiliki Laboratorium agar mempunyai akreditasi dari KAN;
- 5. Monitoring langsung ke SKPD pemungut retribusi untuk mendapatkan objek retribusi yang kemungkinan belum dijadikan objek retribusi;
- 6. Pencairan piutang dan mendorong SKPD pemungut retribusi untuk memastikan piutang semakin mengecil;

7. Penyusunan Draft Rapergub Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah sebagai amanat dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Sosialisasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Monitoring dan Evaluasi secara periodik/bulanan objek retribusi.

Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil laba (Dividen) Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan atas investasi modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 PT Patungan. Namun demikian dari total 23 Perusahaan, terdapat 2 perusahaan yaitu PT Ratax Armada dan PT. Grahasahari Suryajaya yang sudah tidak beroperasi. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diamanatkan bahwa atas perolehan laba dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tahunnya BUMD dan PT Patungan yang memperoleh laba dan tidak ada akumulasi kerugian (akumulasi saldo laba negatif) menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang atau pemilik saham.

Pada periode 2023, pendapatan daerah yang berasal dari Dividen BUMD dan PT Patungan tumbuh dengan 35,65 persen terhadap tahun 2022. Pertumbuhan Dividen BUMD setiap tahunnya didukung dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMD yang membuat perusahaan semakin efektif, efisien, dan berkembang.

Setoran dividen tahun 2024 merupakan hasil kinerja perusahaan pada tahun 2023 dimana tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi setiap negara dan pelaku bisnis. Salah satu tantangan yang dihadapi diantaranya adalah ketidakpastian ekonomi global akibat dampak ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa negara Eropa dan Timur Tengah. Hal tersebut yang menyebabkan terganggunya rantai pasok bahan baku industri perdagangan dan mengakibatkan kenaikan harga. Namun demikian, meskipun terdapat ketidakpastian

kondisi ekonomi global, terdapat peluang yang dapat dioptimalisasi oleh para pelaku usaha di beberapa sektor diantaranya ekonomi digital, pariwisata, ekonomi hijau, serta makanan dan minuman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (dividen) BUMD memiliki target sebesar Rp.823 Miliar dimana angka tersebut merupakan angka optimis yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Jakarta tumbuh 4,8 – 5,6 persen.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penyertaan modal sampai dengan triwulan I 2024, arah kebijakan pengembangan BUMD yaitu untuk penguatan inovasi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung ketahanan BUMD dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pada tahapan ini setiap BUMD sudah memiliki rancangan inovasi baru untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi setelah memiliki kapabilitas, resiliensi dan manajemen risiko yang telah mumpuni. Untuk meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat meningkatkan kinerja komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan status rasio kesehatan serta tata kelola BUMD;
2. Menghadirkan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
4. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerja sama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta;
5. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
6. Alokasi PMD diutamakan untuk program yang mendukung prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
7. Mendorong skema alternatif pembiayaan lainnya dalam pembiayaan korporasi.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD;
2. Pengembangan serta integrasi sistem terkait monitoring dan evaluasi laporan bulanan dan rekonsiliasi;
3. Melakukan pendataan potensi kepada SKPD Pengampu Penerimaan LLPAD.

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan strategi dalam hal optimalisasi pemanfaatan aset, pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi, serta pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame, yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Optimalisasi pemanfaatan aset
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pemanfaatan aset yang optimal adalah meningkatnya manfaat finansial dan/atau non finansial bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan/atau pendayagunaan tanah dan/atau bangunan adalah:
 - a. Melakukan identifikasi konsep dan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
 - b. Membuat kajian *Highest Best And Used* atas aset non kelolaan yang dapat dioptimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan;
 - c. Menyusun daftar prioritas pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
 - d. Mengembangkan *database* dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame;
 - f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame berbasis digital;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan;
 - h. Melakukan pengembangan skema pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan seiring dengan perkembangan ekonomi, bisnis dan perdagangan termasuk perluasan pengelolaan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang; dan
 - i. Pengembangan layanan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah dan/atau bangunan berbasis digital.
2. Optimalisasi pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa
Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan rekomendasi Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tanah Kota Praja dan Eks Desa yang optimal adalah:
 - a. Melakukan identifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tanah HPL meliputi dokumen kepemilikan, perjanjian kerja sama diatas HPL, dan dokumen lainnya yang sejenis;
 - b. Mengembangkan database HPL;
 - c. Mengintegrasikan data HPL dengan BPN, Jakartasatu, dan data pajak;
 - d. Melakukan identifikasi bidang tanah HPL secara geospasial pada peta jakartasatu;
 - e. Melakukan komunikasi dengan para pihak yang bekerja sama diatas HPL;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan dan pendayagunaan tanah HPL; dan
 - g. Pengembangan layanan rekomendasi Hak Guna Bangunan di atas HPL berbasis digital.
 3. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi
Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi seperti Menara Telekomunikasi, Jaringan Mikro Seluler dan Serat Optik yang optimal adalah:

- a. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi data infrastruktur telekomunikasi dengan Dinas Teknis;
 - b. Melakukan komunikasi dengan *provider* infrastruktur telekomunikasi;
 - c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
 - d. Mengembangkan *database* dan sistem informasi pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi; dan
 - f. Pengembangan layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur telekomunikasi berbasis digital.
 4. Optimalisasi pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame
Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame sebagai media informasi dan publikasi yang optimal adalah :
 - a. Menyusun regulasi terkait pemanfaatan ruang, infrastruktur reklame;
 - b. Melakukan komunikasi dengan *provider* infrastruktur reklame;
 - c. Mengembangkan tarif layanan pemanfaatan ruang untuk infrastruktur reklame.
- b. Kebijakan Pendapatan Transfer**
- Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada pengelolaan Pendapatan Transfer melalui sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk pemenuhan penggunaan dan penyampaian pelaporan sebagai syarat salur pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, antara lain:
1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
 2. Berupaya agar menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan berkoordinasi dan sinergi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi DAU;
3. Penyerapan secara optimal atas Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 4. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 tahun terakhir serta Perda APBD tepat waktu agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat; dan
 5. Optimalisasi Penggunaan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.
- c. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berfokus pada penerimaan hibah, sebagai berikut:
1. Hibah dari Pemerintah Pusat merupakan kebutuhan pendanaan untuk membiavai Kegiatan proyek MRT Jakarta.
 2. Hibah dari Badan/Lembaga di dalam negeri merupakan hibah yang didapatkan dari PT Jasa Raharja.
- Adapun perubahan target pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Uraian	RKPD Tahun 2024*	Penetapan APBD Tahun 2024**	Pergeseran II APBD Tahun 2024***	Perubahan RKPD Tahun 2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah	52.369.769.998.956	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991
Pajak Daerah	46.240.000.000	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000
Retribusi Daerah	483.034.270.805	483.034.270.805	699.689.605.850	666.766.726.052
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	823.000.000.000	823.000.000.000	823.000.000.000	634.395.407.063
Lain-lain PAD yang Sah	4.823.735.728.151	4.852.046.769.820	4.635.391.434.775	4.216.115.711.876
Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	19.251.184.573.606	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.961.479.749.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.251.184.573.606	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.961.479.749.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	722.122.303.636	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623
Pendapatan Hibah	722.122.303.636	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623
TOTAL PENDAPATAN	72.343.076.876.198	72.446.382.571.261	73.636.074.253.888	76.161.605.054.614

Sumber *) Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
**) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
***) Pergub DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
****) Perubahan RKPD Tahun 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan, Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci

menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan Belanja Daerah untuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2/SE/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah;
2. Menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial;
3. Penyelesaian prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2024, antara lain :
 - a. Penanggulangan Banjir;
 - b. Penanganan Kemacetan;
 - c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
 - d. Pencegahan Stunting;
 - e. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. Penguatan Nilai Demokrasi;
4. Kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun anggaran 2024;
5. Kegiatan yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan lainnya yang merupakan *ear marking* dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

Adapun perubahan target belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perubahan Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Uraian	RKPD Tahun 2024*	Penetapan APBD Tahun 2024**	Pergeseran II APBD Tahun 2024***	Perubahan RKPD Tahun 2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Operasi	59.304.720.193.007	59.655.768.655.772	59.750.927.904.191	61.360.236.092.597
Belanja Pegawai	19.919.981.160.398	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949
Belanja Barang dan Jasa	26.582.712.001.964	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551
Belanja Bunga	206.000.000.000	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000
Belanja Subsidi	5.628.502.081.062	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601
Belanja Hibah	2.939.747.991.930	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994
Belanja Bantuan Sosial	3.569.455.432.495	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502
Belanja Modal	11.475.877.599.372	11.554.909.926.952	11.554.911.590.706	13.234.176.899.646
Belanja Tidak Terduga	1.174.611.326.132	1.072.006.625.640	2.166.537.396.094	1.319.446.127.895
Transfer Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	318.312.154.164	385.033.285.520
TOTAL BELANJA + TRANSFER	71.815.199.747.517	72.600.997.362.528	73.790.689.045.155	76.298.892.405.658

Sumber *) Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
**) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
***) Pergub DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
****) Perubahan RKPD Tahun 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Pembiayaan Daerah adalah pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah muncul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam anggaran daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan Penerimaan Pinjaman Daerah untuk kegiatan pembangunan proyek MRT Jakarta.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada BUMD di Provinsi DKI Jakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembatasan atas pengusulan PMD melalui pemberian persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain mendukung program prioritas Provinsi DKI Jakarta, penyerapan PMD sebelumnya mencapai 75 persen, terdapat dalam rencana bisnis, serta adanya persetujuan dari Dewan Pengawas/Komisaris perusahaan. Pembatasan tersebut bertujuan agar setiap BUMD lebih fokus dalam memanfaatkan dana PMD yang telah diberikan sebelumnya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta *good corporate governance* (GCG).

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk pembayaran pokok utang yaitu pinjaman JEDI, pinjaman MRT Jakarta, dan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk Program PEN.

Adapun perubahan pembiayaan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Perubahan Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Uraian	RKPD Tahun 2024*	Penetapan APBD Tahun 2024**	Pergeseran II APBD Tahun 2024***	Perubahan RKPD Tahun 2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pembiayaan	9.237.698.534.850	9.270.190.454.798	9.270.190.454.798	10.255.502.731.787
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	3.827.366.479.019	3.859.858.398.967	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718
Pengeluaran Pembiayaan	9.765.575.663.531	9.115.575.663.531	9.115.575.663.531	10.118.215.380.743
Penyertaan Modal Daerah	7.903.905.829.467	7.253.905.829.467	7.253.905.829.467	8.256.545.546.679
1. PT MRT Jakarta (Perseroda)	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	5.120.505.829.467	4.706.954.786.512
2. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	2.583.400.000.000	1.933.400.000.000	1.933.400.000.000	3.122.400.000.000
3. PT Penjamin Kredit Daerah	-	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
4. PT JIEP	-	-	-	225.000.000.000
5. PT Bank DKI	-	-	-	2.190.760.167
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064
TOTAL PEMBIAYAAN	(527.877.128.681)	154.614.791.267	154.614.791.267	137.287.351.044

Sumber *) Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
**) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
***) Pergub DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024
****) Perubahan RKPD Tahun 2024

Ringkasan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, Ringkasan Penetapan APBD Tahun 2024, Ringkasan Pergeseran III APBD Tahun 2024, dan Ringkasan Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah beserta rinciannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.10
Ringkasan Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	RKPD Tahun 2024*	Penetapan APBD Tahun 2024**	Pergeseran II APBD Tahun 2024***	Perubahan RKPD Tahun 2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Pendapatan Daerah	72.343.076.876.198	72.446.382.571.261	73.636.074.253.888	76.161.605.054.614
4.1	Pendapatan Asli Daerah	52.369.769.998.956	52.398.081.040.625	52.398.081.040.625	50.497.277.844.991
4.1.01	Pajak Daerah	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	46.240.000.000.000	44.980.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	483.034.270.805	483.034.270.805	699.689.605.850	666.766.726.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	823.000.000.000	823.000.000.000	823.000.000.000	634.395.407.063
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.823.735.728.151	4.852.046.769.820	4.635.391.434.775	4.216.115.711.876
4.2	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	19.251.184.573.606	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.961.479.749.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	19.251.184.573.606	19.326.007.889.000	20.515.699.571.627	24.961.479.749.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	722.122.303.636	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623
4.3.01	Pendapatan Hibah	722.122.303.636	722.293.641.636	722.293.641.636	702.847.460.623
5	Belanja Daerah	71.815.199.747.517	72.600.997.362.528	73.790.689.045.155	76.298.892.405.658
5.1	Belanja Operasi	59.304.720.193.007	59.655.768.655.772	59.750.927.904.191	61.360.236.092.597
5.1.01	Belanja Pegawai	19.919.981.160.398	20.065.594.901.085	20.059.079.471.852	20.105.510.340.949
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.582.712.001.964	27.309.645.709.375	27.332.258.237.027	27.882.366.981.551
5.1.03	Belanja Bunga	206.000.000.000	256.000.000.000	256.000.000.000	195.850.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	5.628.502.081.062	5.603.712.087.924	5.603.712.087.924	6.320.798.085.601
5.1.05	Belanja Hibah	2.939.747.991.930	3.306.327.319.994	3.357.237.469.994	3.358.509.284.994
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.569.455.432.495	3.114.488.637.394	3.142.640.637.394	3.497.201.399.502

No	Uraian	RKPD Tahun 2024*	Penetapan APBD Tahun 2024**	Pergeseran II APBD Tahun 2024***	Perubahan RKPD Tahun 2024****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.2	Belanja Modal	11.475.877.599.372	11.554.909.926.952	11.554.911.590.706	13.234.176.899.646
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.174.611.326.132	1.072.006.625.640	2.166.537.396.094	1.319.446.127.895
5.4	Transfer Bantuan Keuangan	318.312.154.164	318.312.154.164	318.312.154.164	318.312.154.164
	Total Surplus/(Defisit)	527.877.128.681	(154.614.791.267)	(154.614.791.267)	(137.287.351.044)
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	9.237.698.534.850	9.270.190.454.798	9.270.190.454.798	10.255.502.731.787
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	3.827.366.479.019	3.859.858.398.967	3.859.858.398.967	6.542.421.120.069
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	5.410.332.055.831	3.713.081.611.718
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.765.575.663.531	9.115.575.663.531	9.115.575.663.531	10.118.215.380.743
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.903.905.829.467	7.253.905.829.467	7.253.905.829.467	8.256.545.546.679
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064	1.861.669.834.064
	Pembiayaan Netto	(527.877.128.681)	154.614.791.267	154.614.791.267	137.287.351.044
	Jumlah Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan	81.580.775.411.048	81.716.573.026.059	82.906.264.708.686	86.417.107.786.401
	Jumlah Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	81.580.775.411.048	81.716.573.026.059	82.906.264.708.686	86.417.107.786.401

Sumber *) Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

**) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

***) Pergub DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024

****) Perubahan RKPD Tahun 2024



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang sudah dirumuskan. Arah kebijakan ini merupakan penerjemahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Dokumen RPD Provinsi DKI Jakarta disusun secara teknokratik tanpa mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah. Namun, rumusan konsep sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD tetap mempertimbangkan 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, 7 (tujuh)

Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dan 6 isu strategis 2023-2026. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen RPD 2023-2026 juga sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu “Mencapai Kota Jakarta yang Berdaya Saing Global Berlandaskan Kapasitas Sarana dan Prasarana yang Memadai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan serta Kapasitas Inovasi Daerah yang Terus Meningkat”. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD untuk tahun 2024 adalah:

Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar

Ketahanan kota itu sendiri didefinisikan sebagai kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem dari sebuah kota untuk bisa bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (stress). Fokus terhadap peningkatan ketahanan kota inilah yang dijadikan sebagai pedoman penyusunan RPKD Provinsi DKI Jakarta 2024.

Gambar 4.1 Pendekatan Perencanaan Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diimplementasikan dengan:

a. Menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 4 (empat) tujuan, 17 sasaran, dan 108 strategi utama pembangunan daerah yang ada dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

b. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;

c. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, hibah, dan lain-lain untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta

d. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mengacu dan memperhatikan:

- a. Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024;
- b. RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2030;
- c. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
- d. Hasil evaluasi kinerja RKPD;
- e. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah serta kerangka pendanaan pembangunan 2024;
- f. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
- g. Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka mencapai target setiap prioritas pembangunan, dirumuskan sejumlah sasaran (diindikasikan dengan indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah), kebijakan, strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah yang diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian setiap prioritas pembangunan daerah. Selain itu, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penetapan sasaran pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga keterkaitan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan merupakan tahun kedua terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan jangka menengah nasional periode terakhir, yaitu: (1)

Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (ProP).

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target dari 17 (tujuh belas) TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

- a. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**
Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - 1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan,

sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- 2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - 1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - 2. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - 3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - 4. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - 5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. **Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.**
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
 - 1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2. Pelaksanaan perlindungan sosial;
 - 3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - 4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 6. Pengentasan kemiskinan; dan
 - 7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

- d. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
 - 1. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - 2. Memajukan kebudayaan;
 - 3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - 4. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - 5. Meningkatkan budaya literasi.
- e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**
Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
 - 1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - 2. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
 - 3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - 4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - 5. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
- f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta

peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

g. **Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.2 **Pembangunan Rendah Karbon**

Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi untuk menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada tahun 2060. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Dalam konteks pembangunan di Indonesia, transformasi ekonomi menjadi ekonomi hijau dapat dijadikan sebagai salah satu strategi agar Indonesia dapat keluar dari “middle income trap”, yang mana ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon

akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Oleh sebab itu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, masyarakat sipil (CSO), dan warga lokal, sangat penting untuk mendorong suksesnya pembangunan rendah karbon.

Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar TPB, yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan. Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

- a. **Tujuan 1:** Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- b. **Tujuan 2:** Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. **Tujuan 6:** Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- d. **Tujuan 7:** Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- e. **Tujuan 8:** Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- f. **Tujuan 9:** Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- g. **Tujuan 11:** Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- h. **Tujuan 12:** Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- i. **Tujuan 13:** Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- j. **Tujuan 14:** Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara

berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan; dan

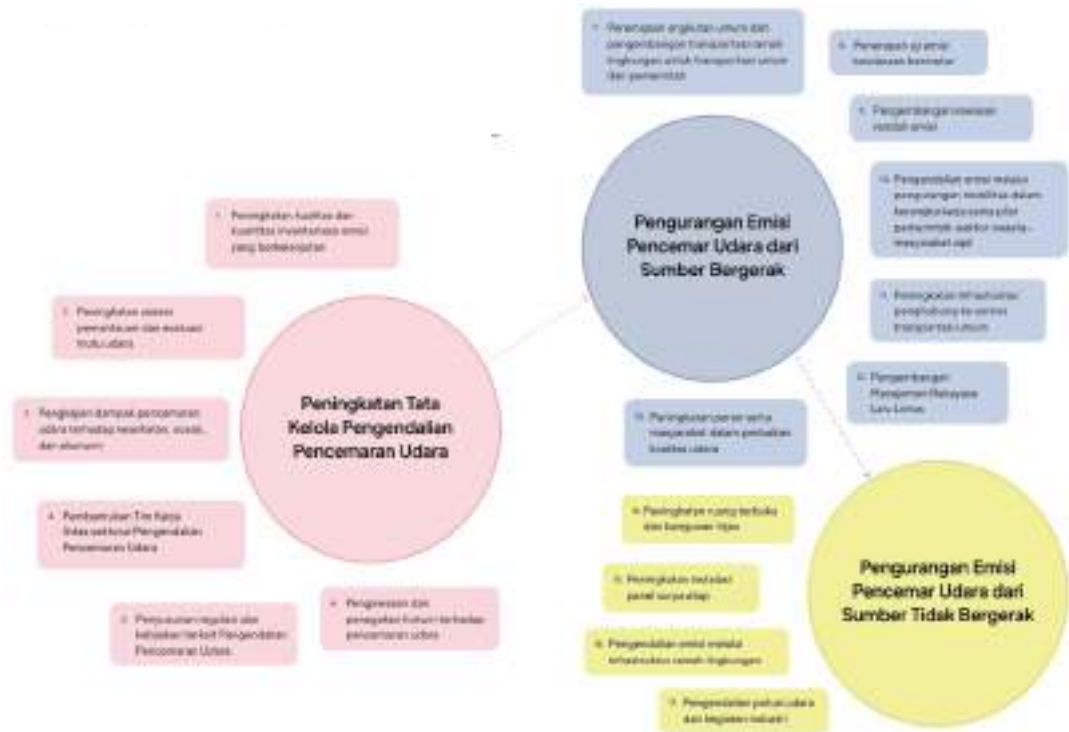
- k. **Tujuan 15:** Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagai implikasi dari penetapan undang-undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan

upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti Perpres tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) yang Berketahanan Iklim, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen dan 50 persen dengan skenario ambisius pada tahun 2030 dan nett zero emission pada tahun 2050 pada sektor energi, limbah, IPPU (Industrial Processes and Product Use) dan AFOLU (agriculture, forestry and other land use). Selain itu DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang berisi rencana aksi dan target pengendalian pencemaran udara hingga tahun 2030 berserta sektor pelaksanaannya.

Gambar 4.2
Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta



Sumber: KepGub Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara

Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 576 tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

- a. **Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara**, dengan 6 (enam) program, yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas inventarisasi emisi yang berkelanjutan.
- 2. Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara.
- 3. Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.
- 4. Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara.

5. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait Pengendalian Pencemaran Udara.
6. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara

b. **Pengurangan Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak**, dengan 7 (tujuh) program, yaitu:

1. Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah.
2. Penerapan uji emisi kendaraan bermotor.
3. Pengembangan kawasan rendah emisi.
4. Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerja sama pilar pemerintah - sektor swasta - masyarakat sipil.
5. Peningkatan infrastruktur penghubung sarana transportasi umum.
6. Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara.

c. **Pengurangan Emisi Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak**, dengan 3 (tiga) program, yaitu:

1. Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau.
2. Peningkatan instalasi panel surya atap.
3. Pengendalian polusi udara dan kegiatan industri.

Provinsi DKI Jakarta melalui dokumen RPD Tahun 2023-2026 juga mencoba menuangkan kebijakan pengendalian pencemaran udara ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu sasaran ke-3: **"Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon"** yang secara langsung mendukung tujuan pembangunan DKI Jakarta itu sendiri, yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan pada Dimensi Built Environment. Sasaran ini kemudian dicapai melalui 17 (tujuh belas) strategi dan 19 (sembilan belas) kegiatan prioritas.

Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon:

- a. Membangun orientasi pembangunan bangunan gedung hijau dan ramah

disabilitas seluruh pemangku kepentingan penyelenggara bangunan gedung.

- b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan.
- c. Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan.
- d. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau.
- e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi.
- f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha.
- g. Peningkatan keterlibatan dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap.
- j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- l. Melakukan Pembangunan/ Penataan/ Penghijauan Hutan untuk meningkatkan kualitas Hutan Kota.
- m. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan.
- n. Melaksanakan inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan diklat dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas sesuai dengan perkembangan teknologi.
- p. Melakukan inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS di Provinsi DKI Jakarta.
- q. Meningkatkan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.

Kegiatan Prioritas Provinsi DKI Jakarta dalam Pencapaian Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon:

- a. Penataan Bangunan Gedung.
- b. Perencanaan Lingkungan Hidup.

- c. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- e. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- f. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- g. Pelaksanaan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- h. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- i. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- j. Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- k. Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- l. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- m. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- n. Pengelolaan Hutan.
- o. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- p. Diklat, Penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
- q. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- r. Pengelolaan Energi Terbarukan dan Ketenagalistrikan.

Untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran ke-3: “Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon” dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja, pada kegiatan prioritas di atas ditetapkan melalui dirumuskan dua indikator di tahun 2024, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: dengan target kinerja sebesar 55,43 Indeks
- b. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: dengan target kinerja sebesar 25,40 persen

Target indikator tersebut akan dilaksanakan pada aksi mitigasi perubahan iklim yang terdiri dari 5 (lima) sektor yaitu (1) Energi; (2) AFOLU; (3) Limbah; (4) IPPU; (5) lainnya (diplomasi perubahan iklim dan aksi adaptasi perubahan iklim yang terdiri dari 6 (enam) sektor, yaitu: (1) Kesehatan; (2) Sumber Daya Air; (3) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (4) Energi; (5) Ketahanan Pangan; (6) Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam keenam sektor tersebut dibuat pengembangan dengan

menambahkan 10 bidang tambahan yaitu: (1) Infrastruktur Transportasi; (2) Limbah; (3) Tata Guna Lahan; (4) Pertanian; (5) Kehutanan; (6) Keamanan; (7) Pariwisata; (8) ITK serta Sosial; dan (9) Komunitas; dan (10) Budaya sebagaimana tertera di dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Tujuan dan Sasaran Pembangunan merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Namun, pada tahun 2024 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tidak tersedia visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. 6 (enam) misi RPJPD DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
- b. 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
- c. 5 (lima) misi RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
- d. 6 (enam) isu-isu strategis Tahun 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yaitu:

- a. **Lingkungan Bangun (*Built Environment*)**
Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan ruang fisik kota yang dibangun dalam rangka menyediakan sarana bagi segala kegiatan manusia dalam bertinggal dan berusaha.
- b. **Perekonomian (*Economic*)**
Dimensi perencanaan yang menyentuh upaya-upaya manusia dalam meningkatkan

derajat hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bernilai ekonomi.

c. **Manusia (Human)**

Dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kualitas kehidupan dan interaksi manusia dengan sesama.

d. **Pemerintahan (Governance)**

Dimensi perencanaan yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak warga dalam bertinggal di kota dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah:

JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA

Konsep tersebut memiliki makna bahwa DKI Jakarta sebagai kesatuan wilayah, warga, dan

pemerintahan dengan kekhususannya harus terus berupaya menjadi kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas, yang mana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Skema Tujuan dan Sasaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

a. Gegenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dengan 4 sasaran:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon;
3. Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota;
4. Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

b. Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dengan 4 sasaran:

1. Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi;

2. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial;
3. Peningkatan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

c. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, dengan 4 sasaran:

1. Pemerataan Kesempatan Pendidikan Untuk Semua dan Edukasi Terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat;
2. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan;

- 4. Penurunan Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
- d. Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas, dengan 5 sasaran:
 - 1. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas;
 - 2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel;
 - 3. Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur;
 - 4. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat;
 - 5. Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Adapun indikasi pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud ditandai dengan:

- a. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
- b. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
- c. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.
- d. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.
- e. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
- f. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
- g. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
- h. Terwujudnya penguatan struktur perekonomian kota.
- i. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas.
- j. Terwujudnya peningkatan investasi yang berkualitas dan berdaya saing.
- k. Terwujudnya ketahanan pangan.
- l. Terwujudnya sistem keuda yang mapan.
- m. Terwujudnya budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultural.
- n. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
- o. Terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.

- p. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
- q. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- r. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- s. Terkelolanya pengendalian dan manajemen kependudukan.
- t. Terwujudnya pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
- u. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri unggulan.
- v. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.
- w. Terwujudnya pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
- x. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreasi masyarakat Jakarta yang berdaya saing global.
- y. Terwujudnya pengembangan terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan berdaya saing.

Selanjutnya, 17 (tujuh belas) sasaran prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 juga diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

- a. **Sasaran nasional 1:** “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan”
Memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
 - 1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
 - 2. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
 - 3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
 - 4. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.
- b. **Sasaran nasional 2:** “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
2. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
3. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- c. **Sasaran nasional 3:** “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
3. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- d. **Sasaran nasional 4:** “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
2. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
3. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

- e. **Sasaran nasional 5:** “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
2. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

- f. **Sasaran nasional 6:** “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.

2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

- g. **Sasaran nasional 7:** “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
2. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

- h. **Sasaran nasional 8:** “Terwujudnya pengentasan kemiskinan”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
3. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
4. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

- i. **Sasaran nasional 9:** “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
3. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
4. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.
5. Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

- j. **Sasaran nasional 10:** “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

k. **Sasaran nasional 11:** “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

l. **Sasaran nasional 12:** “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”

Memiliki keterkaitan dengan 6 (enam) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
2. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
3. Meningkatkan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
4. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
5. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.
6. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

m. **Sasaran nasional 13:** “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

n. **Sasaran nasional 14:** “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat.

o. **Sasaran nasional 15:** “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
2. Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.
3. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.

p. **Sasaran nasional 16:** “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”

Memiliki keterkaitan dengan 5 (lima) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.
2. Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat.
3. Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial.
4. Meningkatkan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.
5. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.

q. **Sasaran nasional 17:** “Meningkatnya konektivitas wilayah”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
2. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

r. **Sasaran nasional 18:** “Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan”

Memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan DKI Jakarta, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.
2. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit.

s. **Sasaran nasional 19:** “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas.

t. **Sasaran nasional 20:** “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi”

Memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Akselerasi Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas.
2. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.
3. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

u. **Sasaran nasional 21:** “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Kota.
2. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

v. **Sasaran nasional 22:** “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
2. Meningkatkan Stabilitas dan Ketahanan Kota.

w. **Sasaran nasional 23:** “Pembangunan rendah karbon”

Memiliki keterkaitan dengan 1 (satu) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

x. **Sasaran nasional 24:** “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”

Memiliki keterkaitan dengan 4 (empat) sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah.
2. Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel.
3. Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur.

4. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat.

Seluruh tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun dari dukungan pemerintah Kota Administratif/Kabupaten Administratif di wilayah administrasi DKI Jakarta, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, strategi disusun sebagai langkah yang ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang berisi program indikasi untuk mewujudkan dimensi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD adalah “Terbangunnya Warga dan Ekosistem Warga Kota yang Setara, Sejahtera, dan Bahagia dengan Dilandasi Semangat Gotong-Royong”. Strategi jangka menengah tersebut diturunkan ke dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

a. **Keadilan dan Keberpihakan**, dijabarkan dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kesempatan yang Setara

Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.

2. Suara Warga

Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.

3. Kota Global

Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

4. Kelestarian Kota
- Memastikan kelestarian lingkungan (*sustainability*), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budidaya.
- b. Orientasi pada Warga dan Ruang Interaksi, dijabarkan dalam 4 (empat) hal, yaitu:
1. Pola Perilaku dan Ruang Interaksi
- Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, dan saling terhubung lintas segmen sehingga menciptakan lingkungan permukiman mandiri yang meminimalisasir kebutuhan mobilitas fisik. Begitu juga dengan penyediaan ruang interaksi pada ruang publik dan privat yang mencirikan budaya urban Jakarta.
2. Ekosistem Sosial
- Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.
3. Pelibatan Warga
- Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan, menangkap, dan berkolaborasi dalam mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.
4. Pelayanan Kebutuhan Personal Warga

Menyediakan layanan kesejahteraan yang inklusif dan dirancang khusus sesuai kebutuhan masing-masing personal warga dengan berbasiskan data kependudukan yang terintegrasi.

c. Birokrasi Efektif dan Penguatan Tata Kelola, dijabarkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kepercayaan Publik
- Mengedepankan etika, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan seluruh elemen kota, yang mana setiap aparat menjadi wakil hadirnya negara dan menjadi duta pemerintah untuk seluruh warga.
2. Profesionalisme Birokrasi
- Menerapkan sistem merit, prinsip akuntabilitas dan agilitas dalam tata kelola pemerintahan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang tangkas, efektif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kota.
3. Sistem dan Institusionalisasi Solusi
- Mengembangkan sistem automasi, prosedur operasional standar dan pemanfaatan teknologi berbasis data dalam perumusan kebijakan, layanan pemerintahan, dan pemecahan masalah untuk meminimalkan diskresi dan solusi spontan terhadap masalah yang dapat diantisipasi atau berulang.

3 (tiga) strategi utama tersebut kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 108 strategi pembangunan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		
1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	a. Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan. b. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau. c. Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan. d. Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan. e. Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya. f. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah. g. Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
2.	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	a. Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas. b. Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan. c. Penurunan beban pencemaran lingkungan. d. Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau. e. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi. f. Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha. g. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. h. Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. i. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. j. Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. k. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. l. Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan. m. Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. n. Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas. o. Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS. p. Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan. q. Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota.
3.	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	a. Pengurangan dampak banjir. b. Pengurangan genangan air. c. Penegakan perda/perkada secara yustisial dan non yustisial. d. Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun non alam. e. Optimalisasi perangkat kebijakan di bidang penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. f. Pengawasan dan pemantauan pemanfaatan air tanah dalam upaya pengendalian penurunan muka tanah.
4.	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga. b. Peningkatan kualitas penataan ruang. c. Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan. e. Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		
5.	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	a. Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. b. Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). c. Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). d. Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial. e. Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan. f. Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran. g. Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan. h. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur).
6.	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	a. Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata. b. Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif. c. Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. d. Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. e. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming. f. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached</i> (OSS-RBA). g. Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga. h. Peningkatan ekspor dan pengendalian impor. i. Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga. j. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. k. Peningkatan produktivitas industri dan IKM.
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	a. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. b. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. c. Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi. d. Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
8.	Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	a. Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal. b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal. c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal. d. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. e. Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya. f. Penguatan peran dan tata kelola permuseuman. g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi. h. Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalih mediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno. i. Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha. j. Penguatan tata kelola inovasi daerah.
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		
9.	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	a. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang.
10.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	a. Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi. b. Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i>. c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman. d. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. e. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai. f. Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat. g. Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan. h. Peningkatan daya saing olahraga. i. Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan.
11.	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO. c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. d. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu. e. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ <i>stakeholder</i>. f. Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

No	Sasaran Pembangunan	Strategi Pembangunan
(1)	(2)	(3)
12.	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	a. Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. b. Penguatan ideologi pancasila. c. Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi. d. Peningkatan pemberdayaan ormas. e. Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. f. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat.
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas		
13.	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	a. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan. c. Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan.
14.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	a. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik. b. Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi. c. Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah. d. Peningkatan manajemen keamanan informasi.
15.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	a. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. b. Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum. c. Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan. d. Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI). e. Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4.
16.	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	a. Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa. b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah. d. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
17.	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	a. Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN. b. Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 (diolah)

Seluruh sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Pencapaian 17 (tujuh belas) sasaran prioritas tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 dilaksanakan melalui

sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta maupun dari dukungan pemerintah Kota Administratif/Kabupaten Administratif di wilayah administrasi DKI Jakarta, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

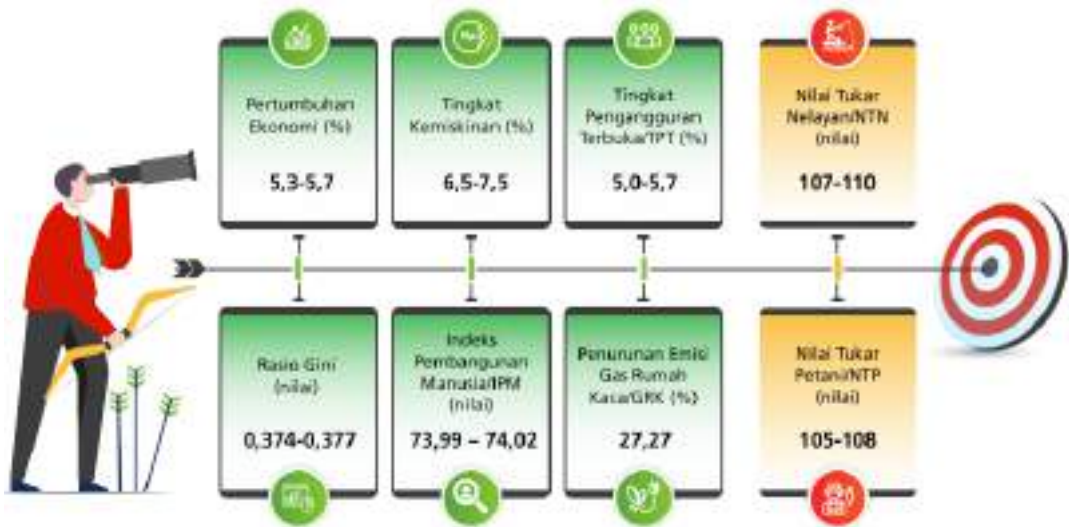
Guna memberikan arah bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan tema RKP Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029. Kemudian, tema RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud kemudian didukung dan diturunkan ke dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, 7 (tujuh) Prioritas

Nasional, 8 (delapan) Arah Kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 sebagaimana berikut:

- a. Sasaran Pembangunan
Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:
 - 1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator:
 - a) Pertumbuhan ekonomi.
 - b) Tingkat pengangguran terbuka.
 - c) Rasio gini.
 - d) Penurunan emisi gas rumah kaca.
 - 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator:
 - a) Indeks pembangunan manusia.
 - b) Tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan pada gambar di bawah.

Gambar 4.4
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024

- b. Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2024:
 - 1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
 - 3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
 - 4. Penguatan Daya Saing Usaha;

- 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
 - 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
 - 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
 - 8. Pelaksanaan Pemilu 2024.
- c. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024:
Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan

ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Gambar 4.5
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Sasaran PN 1:

 - a) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
 - b) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Program Prioritas PN 1:

 - a) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - b) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.
- c) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.
 - d) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan.
 - e) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi.
 - f) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.
 - g) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
 - h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan.

Sasaran PN 2:

 - a) Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

- b) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).

Program Prioritas PN 2:

- a) Pembangunan Wilayah Sumatera.
- b) Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.
- c) Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara.
- d) Pembangunan Wilayah Kalimantan.
- e) Pembangunan Wilayah Sulawesi.
- f) Pembangunan Wilayah Maluku.
- g) Pembangunan Wilayah Papua.

- 3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3:

- a) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
- b) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
- c) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
- d) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- e) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- f) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Program Prioritas PN 3:

- a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan.
- b) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- d) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.
- e) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.
- f) Pengentasan Kemiskinan.
- g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

- 4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4:

- a) Menguatnya revolusi mental dan

pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.

- b) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- c) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
- d) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
- e) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
- f) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Program Prioritas PN 4:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

- 5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran PN 5:

- a) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
- b) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.
- c) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan.
- d) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan.

- e) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
- Program Prioritas PN 5:
- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar.
 - b) Infrastruktur Ekonomi.
 - c) Infrastruktur Perkotaan.
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan.
 - e) Transformasi Digital.
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- Sasaran PN 6:
- a) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.
 - c) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap *baseline*.
- Program Prioritas PN 6:
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Sasaran PN 7:
- a) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal.
 - b) Optimalnya kebijakan luar negeri.
 - c) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap.
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - e) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Program Prioritas PN 7:
- a) Konsolidasi Demokrasi.
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri.
 - c) Penegakan Hukum Nasional.
 - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.
- d. Strategi Kebijakan Tahun 2024
1. Peningkatan Peran KTI dengan Menjaga Momentum Pertumbuhan KBI
 - a) Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari Wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) sejalan dengan proses hilirisasi komoditas mineral beberapa wilayah KTI.
 - b) Sementara, pertumbuhan di KBI dijaga momentumnya dengan terus memperkuat keterkaitan antara sektor industri dengan jasa.
 2. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 - a) Penajaman reformasi sistem perlindungan sosial, terutama upaya perbaikan atau peningkatan akurasi target melalui Registrasi Sosial Ekonomi dan penguatan integrasi program.
 - b) Perluasan akses pelayanan dasar berkualitas, akses terhadap pasar kerja, modal, dan kewirausahaan, terutama untuk kelompok miskin dan rentan.
 3. Pengurangan Pengangguran
 - a) Menciptakan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang diarahkan bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif.
 - b) Menyiapkan pekerjaan dan keahlian angkatan kerja, melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlintsos.

Dari 7 (tujuh) prioritas nasional, 8 (delapan) arah kebijakan, dan 3 (tiga) strategi kebijakan tahun 2024 terdapat 44 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang akan dilanjutkan di tahun 2024.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan

pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 MP pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 MP yang menjadi penekanan (*highlight*), yaitu:

- a. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- b. Pengelolaan Terpadu UMKM;
- c. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- e. Destinasi Pariwisata Prioritas;
- f. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
- g. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- h. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- i. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- j. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
- k. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting;
- l. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah);
- m. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga);
- n. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
- o. Transformasi Digital; dan
- p. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

4.2.2 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Untuk menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria: (1) Memiliki pengaruh

yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; (4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Perumusan isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun dengan memperhatikan isu strategis sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Isu strategis tersebut kemudian akan dilakukan pemfokusan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: (1) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan; (2) kondisi tahun 2023; (3) arah kebijakan RKP tahun 2024; (4) hasil capaian TPB/SDGs; dan (5) dinamika isu strategis global dan nasional seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19.

Kemudian dengan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka kedudukan, peran, dan fungsi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan beralih ke IKN. Berdasarkan hal tersebut DKI Jakarta saat ini sedang bertransformasi menjadi kota Global. Mengacu pada *Global Power City Index* tahun 2022, Kota Jakarta berada pada peringkat 45 dari 48 kota global di dunia. Untuk meningkatkan peringkat DKI Jakarta di antara kota global dunia, DKI Jakarta perlu melakukan upaya-upaya penyelesaian isu prioritas kota seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Adapun proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)
1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;	1. Pemantapan Pemulihan Ekonomi	1. Ketahanan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:
	2. Resesi		
	3. Daya Beli		

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Global	Isu Strategis RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026	Isu Utama Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(5)
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; 3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 4. Penguatan Daya Saing Usaha; 5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8. Pelaksanaan Pemilu 2024	4. Pasokan Pangan dan Energi		1. Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan 2. Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha.
	5. Tahun Politik		
	6. Pengangguran		
	7. Kemiskinan	2. Pemerataan Pembangunan	Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: 1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat; 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
	8. Pemerataan		
	9. Pelayanan Publik	3. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Nilai Demokrasi melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: 1. Perbaikan kualitas layanan publik; 2. Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan 3. Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	10. Stunting	4. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: 1. Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan 2. Intervensi pencegahan stunting.
	11. Transformasi Digital 12. Kemacetan	5. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	Macet Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: 1. <i>Transport Demand Management</i> ; dan 2. Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur.
	13. Perubahan Iklim	6. Ketahanan Terhadap Bencana	Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: 1. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan 2. Upaya Pencegahan Banjir.
	14. Bencana dan Daya Dukung Lingkungan		

Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024 (diolah); RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus sebagaimana dijelaskan pada Tabel di atas, maka 6 (enam) isu strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Ketahanan Ekonomi Inklusif;
- b. Pemerataan Pembangunan;
- c. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik;
- d. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara;
- e. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas;
- f. Ketahanan Terhadap Bencana.

6 (enam) isu strategis sebagaimana dimaksud secara langsung mendukung 4 (empat) dimensi perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta. Keterhubungan antara isu strategis dan dimensi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

a. **Dimensi Lingkungan Bangun (*Build Environment*)**

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas.
- 2. Ketahanan Terhadap Bencana.

b. **Dimensi Ekonomi (*Economics*)**

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1. Ketahanan Ekonomi Inklusif.
- 2. Pemerataan Pembangunan.

c. **Dimensi Manusia (*Human*)**

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara.

d. **Dimensi Pemerintahan (*Governance*)**

Isu strategis yang relevan adalah:

- 1. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis yaitu sebagai berikut:

a. **Ketahanan Ekonomi Inklusif**

Ekonomi inklusif merupakan ukuran untuk melihat inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Isu strategis ketahanan ekonomi inklusif memberikan pemahaman bahwa pemulihan dan peningkatan perekonomian DKI Jakarta tidak hanya melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor, namun juga harus

diimplementasikan secara luas dengan mempertimbangkan aspek ketimpangan dan kemiskinan secara inklusif.

Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi telah mempengaruhi kestabilan kota-kota besar dunia, tak terkecuali Jakarta yang dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan dan menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada berbagai aspek, salah satunya adalah ekonomi.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tetap tumbuh kuat sebesar 4,78 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2024, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,85 persen, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tetap kuat ditopang oleh meningkatnya konsumsi RT, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT. Di sisi lain, ekspor dan investasi tumbuh melambat. Adapun impor tumbuh meningkat sehingga turut menjadi penahan pertumbuhan. Sementara itu, dari sisi Lapangan Usaha (LU) utama, pertumbuhan terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU infokom. Namun, LU utama lainnya seperti industri pengolahan dan jasa keuangan tumbuh lebih rendah. Meskipun tetap tumbuh kuat, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh mencapai 5,11 persen (yoy).

Dari sisi ketimpangan, rasio gini DKI Jakarta pada periode Maret 2024 mencapai 0,423, membaik sebesar 0,008 poin dibandingkan periode Maret 2023 sebesar 0,431. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan golongan pengeluaran antar kelompok penduduk. Walaupun demikian, nilai indeks tersebut belum kembali ke nilai indeks sebelum pandemi COVID-19.

Lebih jauh lagi, ketahanan ekonomi inklusif berkorelasi erat dengan kemiskinan di DKI Jakarta, yang pada hakekatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat

pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan masyarakat, salah satunya melalui program peningkatan pendapatan masyarakat dan jaring pengaman sosial.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dalam berbisnis. Pada periode Februari 2024, terlihat bahwa penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di DKI Jakarta masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yakni lebih dari 2,9 juta orang. Kondisi tersebut didukung oleh kondisi belum optimalnya kemudahan berbisnis di DKI Jakarta.

Selain kemudahan dalam berbisnis, pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat DKI Jakarta penting juga untuk diperhatikan. Kondisi tersebut mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Melalui peta jalan ekonomi digital yang diadaptasi, harapannya DKI Jakarta akan mampu mendominasi transaksi ekonomi digital dalam lingkup ASEAN bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Selanjutnya, dalam menghadapi situasi ekonomi yang sangat kompetitif, sektor UKM dan industri kreatif dituntut lebih aktif dan dinamis sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sosial. Namun, di sisi lain menciptakan kerentanan dalam menghadapi tantangan pasar karena terkait dengan sumber daya manusia, kemampuan teknologi, dan akses keuangan.

Perhatian khusus harus diberikan DKI Jakarta dalam sektor industri kreatif maupun UKM, karena merupakan salah satu kontributor utama dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja. Setidaknya terdapat 14 subsektor industri kreatif yang dapat dikembangkan, yaitu *fashion*, pasar seni dan barang antik; permainan interaktif; film, video dan fotografi; kerajinan; musik; desain; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; riset dan pengembangan; layanan komputer dan piranti lunak; penerbitan dan percetakan, arsitektur bahkan kuliner.

Keberadaan sentra ekonomi UKM dan industri kreatif perlu didukung dengan pasar yang memadai baik secara *offline* maupun *online*. Melalui keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta melalui unit kerja pada urusan UMKM

dan pariwisata, selain merevitalisasi sarana prasarana usaha UKM/Pedagang, juga perlu menciptakan *platform* sentra ekonomi berbasis digital dan atau berkolaborasi dengan unicorn marketplace yang sudah ada, integrasi dengan pihak ketiga melalui kerjasama produk pariwisata, serta peningkatan kualitas dan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penetrasi pengetahuan IoT (*Internet of Things*) untuk mendorong kreativitas dan menciptakan inovasi bisnis yang mumpuni.

Berbicara tentang ekonomi, sektor pariwisata urban merupakan aspek strategis yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan dan investasi yang efektif, serta dapat dianggap sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta sampai saat ini dinilai belum optimal, karena DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf Internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta *Convention Centre* (JCC).

Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas dari keberagaman budaya yang terdapat di DKI Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain, namun masih terbatasnya pusat-pusat kuliner di Jakarta seperti Lenggang Jakarta, Pusat Jajanan Serba Ada di Melawai, Kantin PKL di Menara 165 dan Pusat Jajanan Blok S. Mayoritas festival makanan yang ada di Jakarta masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengembangan lokasi-lokasi wisata dengan konsep terkini merupakan salah satu kunci inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan, seperti wisata urban seperti *café*, ruang terbuka publik, restoran, *sport tourism*, rencana pengembangan *health tourism*, serta pengembangan kawasan Kepulauan Seribu yang telah ditetapkan sebagai Strategi Pariwisata Nasional Daerah (KSPN). Perwujudan prinsip kolaborasi melalui strategi bisnis lintas sektor dan pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik melalui BUMD maupun swasta dan mendorong pemilik serta pengelola cagar budaya untuk melestarikan dan memanfaatkannya sebagai tempat destinasi wisata.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 dalam hal ketahanan ekonomi inklusif akan difokuskan pada kegiatan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: (1) Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan (2) Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha.

b. Pemerataan Pembangunan

Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat adalah tuntutan klasik dan utama yang menjadi tantangan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pencapaiannya, antara lain pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Ketimpangan antar wilayah dapat terlihat secara jelas melalui besaran tingkat kemiskinan antar wilayah yang tidak seimbang. Tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencapai 13,13 persen; wilayah administrasi Kota Jakarta Utara mencapai 6,78 persen; dan di wilayah Jakarta Pusat mencapai 4,68 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan Provinsi yang mencapai 4,44 persen. Sedangkan wilayah lain di bawah rata-rata Provinsi yaitu Jakarta Timur sebesar 4,20 persen, Jakarta Barat sebesar 4,09 persen, dan Jakarta Selatan 3,10 persen. Disparitas lainnya yang menjadi parameter adalah nilai IPM antar wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang masih pada angka kisaran 70 yaitu sebesar 75,91, dimana IPM Provinsi sebesar 83,55 pada tahun 2023. Sedangkan wilayah lain nilai IPM sudah berada di atas angka 80.

Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan ketimpangan ini dapat lebih efektif apabila difokuskan dan dikoordinasikan tingkat Kota dan Kabupaten Administrasi. Oleh karena itu, penguatan peran Walikota dan Bupati sebagai koordinator menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Penguatan peran Walikota dan Bupati yang akan didorong adalah dalam peningkatan kewenangan

koordinasi terhadap OPD tingkat Kota dan Kabupaten.

Pengurangan ketimpangan antar wilayah administrasi di DKI Jakarta dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi aksesibilitas, pelayanan dasar, serta pengembangan potensi sebagai aktivitas ekonomi. Sebagaimana diketahui, berbagai upaya sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menuntaskan masalah disparitas, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu solusi utama untuk meningkatkan produktivitas para pekerja, seperti akses jalan untuk mempermudah para pekerja melakukan aktivitasnya.

Akses jalan sebagaimana dimaksud telah diterapkan secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke Kepulauan Seribu sebagai satu kesatuan dari DKI Jakarta masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan infrastruktur yang baik secara tidak langsung akan memengaruhi peningkatan daya saing di setiap wilayah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan, pemenuhan layanan masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan masih menjadi isu penting untuk terus dijadikan sebagai fokus pembangunan. Dari sisi pemenuhan layanan kesehatan, masih ditemukan permasalahan belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan, serta sarana prasarana penunjang lainnya, baik pada jenjang pendidikan formal maupun informal. Sedangkan dari sisi pendidikan masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran, belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru), dan belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan informal.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk juga menjadi salah satu indikator dalam pemerataan pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan hasil skor PPH tahun 2023,

kualitas konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta sudah cukup baik dengan skor 92,7. Skor tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 89,4.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait pemerataan pembangunan akan difokuskan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama: (1) Penurunan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

c. Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan yang mana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya

kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktek KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga, serta pengawasan secara *whistleblowing* oleh para pemangku kepentingan terkait terutama masyarakat, dengan prinsip kolaborasi.

Sampai dengan tahun 2023, mendasar pada hasil survei kepuasan masyarakat, DKI Jakarta memperoleh nilai 91,08 yang masuk kepada mutu layanan "A" dan kinerja "Sangat Baik". Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan pelayanan publik di DKI Jakarta itu sendiri, yaitu:

1. Waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan keluhan masih terhitung lama, hal tersebut dikarenakan proses validasi yang cukup panjang dan memakan waktu.
2. Nomor telepon *online* (pengaduan) yang disediakan tidak bisa dihubungi.
3. Pungutan uang jasa yang diminta masih terhitung besar.
4. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, pengawasan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan terkait layanan publik.
5. Meningkatnya indeks kerawanan keamanan yang disebabkan oleh konflik antar masyarakat dan kriminalitas.

Oleh karena itu, dalam mendukung cita-cita layanan publik tersebut, pemerintah dituntut untuk berjalan secara dinamis (pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif).

Selain dituntut untuk menjadi dinamis, pemerintah juga diharuskan untuk terus menjaga kebhinekaan serta proses demokrasi yang kondusif melalui penguatan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, kebhinekaan guna menghindari konflik antar individu. Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 menjadi salah satu momen penting dalam menjaga kebhinekaan di DKI Jakarta yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk menghadapi momen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berupaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi di Jakarta melalui pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat dan kader partai politik.

Selanjutnya, permasalahan lain yang masih menjadi perhatian dan fokus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai pemerintah yang dinamis adalah terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A). Kasus KtP/A ini di DKI Jakarta diistilahkan sebagai fenomena 'Gunung Es'. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar, namun belum terungkap. Seiring dengan terbukanya akses sebagaimana bagian dari pemanfaatan teknologi yang semakin masif di DKI Jakarta, meningkatnya keberanian, dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian, kasus-kasus seperti ini akan semakin banyak muncul ke permukaan.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membantu penanganan kasus yang selama ini tidak terdeteksi. Dalam rangka optimalisasi perlindungan dan pencegahan KtP/A, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan edukasi dan penyebaran informasi mengenai pencegahan dan layanan penanganan tindak kekerasan. Selain itu, dalam upaya optimalisasi layanan dalam penanganan terhadap korban KtP/A, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penguatan layanan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai pemberi layanan terpadu *one stop service* bagi korban kekerasan perempuan dan anak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi, dengan demikian korban kekerasan 100 persen mendapatkan layanan komprehensif.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 dalam hal pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik akan difokuskan pada kegiatan penguatan nilai demokrasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: (1) Perbaikan kualitas layanan publik; (2) Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; serta (3) Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara

DKI Jakarta dengan segala keunggulan sumber daya manusia dibandingkan dengan daerah lain mampu menjadi *Center of Human Development* bagi Indonesia yang membawa kontribusi positif bagi daerah lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas sumber daya manusia tentunya menjadi hal yang

penting untuk dikejar dan dijadikan sebagai fokus pembangunan. Salah satu aspek yang dapat menciptakan manusia sehat, berdaya saing, dan setara adalah pelayanan kesehatan.

Perbaikan pelayanan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem kesehatan kota DKI Jakarta yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya kota Jakarta, baik fisik maupun non fisik. Perbaikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi kesehatan penduduk DKI Jakarta yang lebih baik di masa mendatang serta meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga DKI Jakarta.

Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan.

Stunting itu sendiri merupakan kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70 persen) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30 persen) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2023, prevalensi stunting DKI Jakarta mencapai 17,6 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 14,8 persen. Nilai itu menggambarkan masih terdapat angka kekurangan gizi di DKI Jakarta yang harus mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.

Untuk mengentaskan stunting di DKI Jakarta, pemerintah akan mengawal dengan serius terkait faktor sensitif berupa lingkungan, tingkat disiplin orang tua, dan jarak antar kelahiran. Selain itu, sampai dengan saat ini pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi masih terhitung rendah, kondisi tersebut menyebabkan tingginya angka perkawinan anak yang berdampak pada tingginya prevalensi stunting dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang belum optimal.

Tingkat kedisiplinan orang tua dalam memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak saat dalam usia dini juga menjadi penting. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan orang tua mengenai cara menjaga kesehatan dan asupan gizi anak menjadi satu hal yang perlu ditingkatkan dan menjadi fokus DKI Jakarta ke depan. Adapun ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, angka stunting di DKI Jakarta berada pada angka 13,2 persen atau di bawah standar WHO, yaitu 20 persen dan di tahun 2026, prevalensi stunting di DKI Jakarta (pendek dan sangat pendek) pada balita diharapkan turun menjadi sebesar 12,2 persen.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait manusia sehat, berdaya saing, dan setara akan difokuskan pada kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama: (1) Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan (2) Intervensi pencegahan stunting.

e. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas

Konsep kota berkelanjutan mengacu pada usaha berjalannya perekonomian dan kegiatan sosial dengan meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan, sehingga generasi selanjutnya masih dapat tetap merasakan kota ramah lingkungan dengan kondisi yang sama. Salah satu pilar utama kota berkelanjutan adalah transportasi publik dinilai aman dan merupakan alternatif yang baik dari kendaraan pribadi. Beralihnya penggunaan kendaraan pribadi kepada transportasi publik secara langsung dapat mendukung pula target DKI Jakarta mencapai *net zero emissions* pada tahun 2050.

Berdasarkan data, jumlah kendaraan di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, yang mana per 31 Desember 2023 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 11.495.973. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan jumlah terbanyak, yaitu 8.750.448 (76,12 persen). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa transportasi publik belum menjadi transportasi utama atau andalan masyarakat DKI Jakarta yang kemudian berkorelasi secara langsung pada tingkat kemacetan yang semakin memburuk.

Masalah kemacetan saat ini sudah dianggap sebagai salah satu ciri khusus kota-kota besar di Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Kemacetan lalu lintas disebabkan

oleh beberapa faktor, yaitu perbandingan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang, jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya penggunaan transportasi umum, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan.

DKI Jakarta, sebagai salah satu kota metropolitan, sampai saat ini masih menjadikan masalah kemacetan sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, pada tahun 2023 kemacetan Jakarta menempati peringkat 30 dari 387 kota di 55 negara, dari sebelumnya berada di peringkat 29 pada tahun 2022. Sementara itu, lama perjalanan di Jakarta per 10 km memakan waktu rata-rata 23,2 menit.

Selanjutnya, kemacetan di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang *car-oriented*, fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda masih belum merata dan tersedia di setiap ruas jalan, masih terbatasnya lebar jalan yang disediakan untuk pejalan kaki dan jalur sepeda, belum maksimalnya sinkronisasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan jaringan utilitas, dan pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas.

Kondisi yang demikian memberikan dampak bahwa untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi mencapai pusat-pusat aktivitas. Di saat kota-kota besar dunia lainnya sudah mengadopsi konsep *15 minute city*, *average travel time* di Jakarta untuk mengakses suatu tempat dan kegiatan adalah 90 menit (JUTPI 2), dengan rata-rata kecepatan kendaraan yang relatif rendah yaitu 24.91 km/jam.

Dalam mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hirarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan

pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang Jakarta, sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan RDTR Jakarta 2022-2026, yang secara berkala akan ditinjau kembali. Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penetapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan *transit oriented development* (TOD); dengan karakteristik utama diantaranya kawasan *mixed-use* dengan densitas tinggi, terdapat intermodal interchange facilities sebagai pusat kawasan yang terpadu dengan hunian, ruang hijau yang memadai, dan berbagai elemen lainnya yang mengutamakan integrasi tata ruang dan transportasi.

Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kota transit. Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2023, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 18,86 persen, angka ini masih jauh dari target jangka panjang Jakarta.

Secara bertahap Pemerintah terus mengupayakan peningkatan penggunaan transportasi publik dan pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 23,01 persen. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melakukan penerapan *transportation demand management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Mendasari beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 terkait kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas akan difokuskan pada kegiatan pengurangan kemacetan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama: (1) *Transport Demand Management*; dan (2) Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur.

f. Ketahanan Terhadap Bencana

Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang selalu mendapatkan perhatian di semua negara tidak terkecuali Indonesia. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti kekeringan, banjir

dan longsor, kegagalan panen, kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi, serta wabah penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Setiap tahun, jutaan orang terkena dampak bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Khususnya, dengan tingginya tingkat urbanisasi diperkirakan akan mendorong hampir dua pertiga populasi global untuk tinggal di kota pada tahun 2050, kota tak terhindarkan berada di garis depan risiko dan tantangan perubahan iklim yang semakin besar, termasuk DKI Jakarta.

Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perkembangan dan pembangunan di DKI Jakarta tumbuh sangat pesat di setiap tahunnya. Adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di DKI Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Oleh karena itu, bencana banjir menjadi salah satu permasalahan yang sering melanda DKI Jakarta.

Selain itu, sebaran kinerja sangat rendah di DKI Jakarta menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan topologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir yang merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluvio vulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan topologi dataran lain.

Selain dipengaruhi oleh kondisi demografi dan sebaran kinerja jasa lingkungan hidup yang masih rendah, bencana banjir di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh kondisi sampah yang dihasilkan oleh setiap kepala rumah tangga. Berdasarkan hasil Kajian Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, volume sampah selalu meningkat di setiap periodenya (Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,37 liter tiap orang per hari dan

kepadatan sampah adalah 0,22 kg/liter).

Tingginya volume sampah yang dihasilkan masih belum diimbangi dengan kemampuan daur ulang sampah atau *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R). Perilaku masyarakat untuk membuang sampah sembarang juga masih menjadi perhatian pemerintah sampai saat ini. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak secara langsung dan menjadi faktor utama permasalahan banjir di DKI Jakarta selain dikarenakan faktor perubahan iklim maupun kinerja dari jasa lingkungan hidup.

Sebagai salah satu kota yang berkomitmen dalam penurunan dampak iklim melalui *C40 Cities Climate Leadership Group*, DKI Jakarta mendorong perubahan nyata melalui kolaborasi dan pembelajaran melalui praktik terbaik. Pemulihan dengan konsep naturalisasi dan normalisasi sumber daya alam yang ada seperti danau dan sungai dapat membantu meningkatkan kualitas dan akses air kota dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bencana banjir.

Penanganan banjir DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau *sheet pile*. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta dapat ditahan lebih lama, melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta. Fungsi waduk kedepan bukan sekedar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja namun bisa dimanfaatkan atau dikelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta.

Kemudian terdapat beberapa hal lain yang juga menjadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta dalam implementasi penanggulangan banjir, yaitu melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran,

pintu air, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat.

Adapun selanjutnya, DKI Jakarta tidak akan mampu mencapai perkembangannya dengan signifikan dalam mengejar metropolitan-metropolitan dunia tanpa dukungan dari daerah-daerah penyangganya. Untuk itu, komitmen untuk koordinasi yang baik antar daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam urusan yang tidak bisa ditangani oleh DKI Jakarta sendirian, seperti, lingkungan hidup dan sumber daya air, pemenuhan ruang terbuka hijau, dan pengolahan sampah, yang merupakan faktor penentu keberhasilan pengendalian banjir. Diperlukan institusionalisasi yang lebih matang untuk menaungi kepentingan bersama DKI Jakarta dan wilayahnya sekitarnya, yakni Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi.

Berdasarkan beberapa kondisi di atas, maka isu strategis pembangunan DKI Jakarta 2024 dalam hal ketahanan terhadap bencana akan difokuskan pada kegiatan penanggulangan banjir yang dilaksanakan melalui 2 strategi, yaitu: (1) Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan (2) Upaya Pencegahan Banjir.

Berdasarkan 6 (enam) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Sasaran dan Strategi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran	Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	
1. Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas (Macet) 2. Ketahanan Terhadap Bencana (Banjir)	1.	Dimensi Lingkungan Bangun (<i>Build Environment</i>)	1.1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	1.1.1 Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1.1.1.1	Optimalisasi kapasitas sistem penanganan persampahan
						1.1.1.2	Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan rencana induk ruang terbuka hijau
						1.1.1.3	Evaluasi tata ruang dalam mencapai tertib pertanahan
						1.1.1.4	Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
						1.1.1.5	Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya
						1.1.1.6	Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air limbah
						1.1.1.7	Penyediaan dan peningkatan akses pelayanan air minum
					1.1.2 Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1.1.2.1	Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan hijau dan ramah disabilitas
						1.1.2.2	Pengintegrasian upaya pencegahan pencemaran lingkungan melalui kebijakan dan aturan
						1.1.2.3	Penurunan beban pencemaran lingkungan
						1.1.2.4	Peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sarana prasarana dan tutupan hijau sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau
						1.1.2.5	Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
							1.1.2.6	Peningkatan ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh kegiatan usaha
							1.1.2.7	Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
							1.1.2.8	Peningkatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau pulau kecil serta peningkatan pemberdayaan masyarakat
							1.1.2.9	Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap
							1.1.2.10	Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan hukum terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
							1.1.2.11	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
							1.1.2.12	Pembangunan / Penataan / Penghijauan Hutan
							1.1.2.13	Inventarisasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
							1.1.2.14	Pemberian pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan tentang kehutanan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan SDM Dinas
							1.1.2.15	Inventarisasi dan koordinasi terkait standarisasi pengelolaan DAS
							1.1.2.16	Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
							1.1.2.17	Peningkatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
					1.1.3	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	1.1.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
							1.1.3.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
							1.1.3.3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
							1.1.3.4	Program Penanggulangan Bencana
							1.1.3.5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
							1.1.3.6	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
					1.1.4	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1.1.4.1	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bina marga
							1.1.4.2	Peningkatan kualitas penataan ruang
							1.1.4.3	Peningkatan pelayanan angkutan umum dan pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
							1.1.4.4	Peningkatan pelayanan terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) dan pengawasan badan usaha angkutan perairan
							1.1.4.5	Perumusan kebijakan dan memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian
3. Ketahanan Ekonomi Inklusif (Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi)	2.	Dimensi Ekonomi (Economics)	2.1	Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	2.1.1	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	2.1.1.1	Peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial
							2.1.1.2	Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
4. Pemerataan Pembangunan (Kemiskinan)							2.1.1.3	Pemberian Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tepat sasaran kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
							2.1.1.4	Penanganan bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bagi korban bencana alam dan sosial
							2.1.1.5	Peningkatan jumlah kecamatan yang tahan pangan
							2.1.1.6	Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran
							2.1.1.7	Peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, hasil pertanian, perikanan dan peternakan
							2.1.1.8	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan kewirausahaan terpadu (Jakpreneur)
					2.1.2	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	2.1.2.1	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan produk, dan daya tarik pariwisata
							2.1.2.2	Peningkatan pemasaran dan informasi pariwisata secara sinergis, intensif, inovatif, dan interaktif
							2.1.2.3	Peningkatan kerja sama kelembagaan secara profesional, efektif, efisien, produktif, serta pemberdayaan, penguatan dukungan, dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif
							2.1.2.4	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
							2.1.2.5	Peningkatan produksi pertanian, peternakan,susu, daging, olahan hasil pertanian peternakan dan pelayanan kesehatan hewan serta pengembangan pertanian perkotaan/urban farming
							2.1.2.6	Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approached</i> (OSS-RBA)
							2.1.2.7	Pelaksanaan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga
							2.1.2.8	Peningkatan ekspor dan pengendalian impor
							2.1.2.9	Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
							2.1.2.10	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
							2.1.2.11	Peningkatan produktivitas industri dan IKM
					2.1.3	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	2.1.3.1	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
							2.1.3.2	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
							2.1.3.3	Penguatan SDM pengelola dan pengawas koperasi
							2.1.3.4	Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan perindustrian, perdagangan dan kewirausahaan, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
					2.1.4	Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	2.1.4.1	Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal
							2.1.4.2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
							2.1.4.3	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
							2.1.4.4	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
							2.1.4.5	Penguatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan cagar budaya
							2.1.4.6	Penguatan peran dan tata kelola permuseuman
							2.1.4.7	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya literasi
							2.1.4.8	Pendataan, pengolahan, preservasi, pengalihmediaan, dan/atau akuisisi naskah kuno
							2.1.4.9	Penguatan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha
							2.1.4.10	Penguatan tata kelola inovasi daerah
Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara (Stunting)	3.	Dimensi Manusia (Human)	3.1	Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	3.1.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	3.1.1.1	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang
					3.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	3.1.2.1	Implementasi transformasi pelayanan kesehatan yang adaptif dan terintegrasi
							3.1.2.2	Pemenuhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan optimalisasi implementasi <i>hospitality</i>

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
							3.1.2.3	Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan keamanan makanan dan minuman
							3.1.2.4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
							3.1.2.5	Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan tenaga pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan memadai
							3.1.2.6	Penguatan pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat
							3.1.2.7	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
							3.1.2.8	Peningkatan daya saing olahraga
							3.1.2.9	Pembentukan anggota pramuka yang berjiwa patriotik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi kepramukaan
					3.1.3	Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	3.1.3.1	Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
							3.1.3.2	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk TPPO
							3.1.3.3	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
							3.1.3.4	Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu
							3.1.3.5	Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang pemenuhan hak anak pada lembaga/ organisasi/ kelompok/ stakeholder

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
					3.1.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	3.1.3.6	Peningkatan advokasi dan koordinasi tentang perlindungan bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
							3.1.4.1	Peningkatan kualitas layanan kepada anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
							3.1.4.2	Penguatan ideologi pancasila
							3.1.4.3	Peningkatan kesadaran politik dan demokrasi
							3.1.4.4	Peningkatan pemberdayaan ormas
							3.1.4.5	Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama
							3.1.4.6	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait pencegahan dan penanganan konflik sosial di masyarakat
Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik (Penguatan Nilai Demokrasi)	4.	Dimensi Pemerintahan (<i>Governance</i>)	4.1	Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	4.1.1	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	4.1.1.1	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk peningkatan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil
							4.1.1.2	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan
							4.1.1.3	Pelaksanaan program pengelolaan kecamatan
					4.1.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	4.1.2.1	Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik
							4.1.2.2	Peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi
							4.1.2.3	Peningkatan penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan di daerah
							4.1.2.4	Peningkatan manajemen keamanan informasi

Isu Strategis	Dimensi		Tujuan		Sasaran		Strategi	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)	
					4.1.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	4.1.3.1	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
							4.1.3.2	Peningkatan kualitas dan efektivitas penataan Peraturan Perundang-Undangan dan advokasi hukum
							4.1.3.3	Persentase pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan
							4.1.3.4	Percepatan penyelesaian rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal (BPK RI)
							4.1.3.5	Peningkatan kebijakan, pendampingan dan asistensi dalam mewujudkan kapabilitas APIP level 4
					4.1.4	Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	4.1.4.1	Pengembangan sistem informasi serta perbaikan standar pelayanan pengadaan barang/jasa
							4.1.4.2	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
							4.1.4.3	Peningkatan penyusunan dan pengelolaan standar harga satuan barang milik daerah
							4.1.4.4	Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
					4.1.5	Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	4.1.5.1	Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN
							4.1.5.2	Peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2024 (diolah); RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah)

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Hal ini sesuai dengan Pasal 348 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa DPRD berhak untuk memberikan saran dan

pendapat berupa pokok-pokok pikirannya untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta juga dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan tahun 2025. Adapun penjabaran pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan isu prioritas RPD 2023-2026 dan isu utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Utama Pembangunan Tahun 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketahanan Ekonomi Inklusif	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi	1. Permohonan bantuan pembinaan dan pendampingan UMKM yang berdampak pada akselerasi pertumbuhan serta kemandirian ekonomi masyarakat. 2. Permohonan bantuan dana untuk kegiatan UMKM yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 3. Permohonan dukungan untuk melaksanakan kegiatan Festival Bazar UMKM untuk meningkatkan penjualan UMKM yang berdampak pada perputaran ekonomi lokal.
2.	Pemerataan Pembangunan	Kemiskinan	1. Permohonan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran untuk menurunkan beban pengeluaran pokok masyarakat. 2. Permohonan pelaksanaan pelatihan pekerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. 3. Permohonan keterbukaan akses informasi pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Permohonan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak (bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan) melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk membantu mengurangi beban pengeluaran pokok masyarakat. 5. Permohonan bantuan sosial khusus masyarakat lanjut usia (lansia) untuk lebih tepat sasaran. 6. Permohonan pengadaan pasar murah untuk pengendalian harga bahan pokok yang tinggi.
3.	Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Nilai Demokrasi	1. Permohonan peningkatan pelayanan dasar yang cepat dan efisien pada tingkat RT/RW. 2. Permohonan kemudahan dalam mengakses pelayanan KJP, PIP, Kartu Lansia, dan Kartu difabel/disabilitas.

No	Isu Prioritas RPD Tahun 2023-2026	Isu Utama Pembangunan Tahun 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Permohonan penyuluhan tindak kekerasan pada anak untuk menekan angka korban kekerasan pada anak. 4. Permohonan pemerintah untuk aktif dalam menggerakkan perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak dan perempuan. 5. Permohonan penyediaan tempat perlindungan saksi kejadian kejahatan dan kekerasan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi.
4.	Manusia Sehat, Berdaya Saing dan Setara	Stunting	1. Permohonan pelaksanaan sosialisasi stunting pada setiap Kelurahan. 2. Permohonan bantuan alat kesehatan khususnya untuk membantu penurunan stunting. 3. Permohonan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak yang kurang gizi untuk pengentasan permasalahan stunting. 4. Permohonan pemerataan kegiatan posyandu pada setiap Kelurahan untuk mencegah terjadinya stunting.
5.	Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas	Macet	1. Permohonan pelebaran jalan pada jalan lingkungan untuk mengurangi kemacetan. 2. Permohonan untuk penertiban bangunan liar yang menjadi penyebab kemacetan pada jalan kolektor. 3. Permohonan rekayasa dan pengaturan lalu lintas pada titik-titik kemacetan. 4. Permohonan penertiban pasar kaget pada beberapa jalan yang menjadi penyebab kemacetan. 5. Permohonan untuk meningkatkan jaringan transportasi umum untuk mengurangi jumlah aktivitas perjalanan masyarakat yang berdampak pada pengurangan titik kemacetan.
6.	Ketahanan Terhadap Bencana	Banjir	1. Permohonan perbaikan saluran air untuk penanggulangan bencana banjir. 2. Permohonan melanjutkan pembuatan sodetan/saluran air untuk solusi pengurangan banjir. 3. Permohonan normalisasi sungai pada setiap sungai induk untuk mengurangi debit air pada musim hujan yang berdampak kepada bencana banjir. 4. Permohonan bantuan pompa air untuk mempercepat surut debit air pada saat banjir.

Sumber: Hasil Reses Tahun 2021 dan Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pokok-pokok pikiran DPRD yang mengakomodasi aspirasi masyarakat selaras

dengan isu pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa isu pembangunan yang sampai dengan

tahun 2024 masih menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadi isu yang diprioritaskan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, pokok-pokok pikiran DPRD akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah:

Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia

Tema tersebut memiliki makna bahwa Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 diarahkan untuk bertransformasi untuk mencapai Jakarta sebagai:

- a. **Kota Tangguh:**
Kota yang tangguh untuk melalui berbagai krisis atau tantangan yang terjadi, baik ekonomi, sosial, hingga bencana (alam dan non-alam). Konsep DKI Jakarta sebagai Kota Tangguh juga diusung sebagai semangat bersama bahwa DKI Jakarta ada sebagai kota yang dapat menjadi kebanggaan warganya, serta kota yang menjanjikan berbagai harapan dan impian.
- b. **Berdaya Saing:**
DKI Jakarta sampai saat ini dianggap menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia

ke dunia dan pintu gerbang dunia masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, DKI Jakarta diharapkan dapat menjadi kota berdaya saing global.

- c. **Berkelanjutan:**
Kota yang memungkinkan semua warganya memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya, tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau kehidupan orang lain, di masa kini dan di masa depan. Dengan konsep tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak dalam setiap pembangunannya.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD tahun 2022 dan fokus pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yang tertera dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan arah kebijakan RPD untuk Tahun 2024 sangat erat.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)
TUJUAN: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1. Penanggulangan Banjir Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir; dan • Upaya Pencegahan Banjir. 2. Penanganan Kemacetan Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • <i>Transport Demand Management</i>; dan • Perluasan penyediaan jaringan/ infrastruktur
Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	
TUJUAN: Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	

Tujuan/Sasaran	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)
Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan kegiatan kewirausahaan; dan • Peningkatan kemudahan layanan perizinan berusaha. 2. Penanggulangan Kemiskinan Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: • Penurunan beban pengeluaran masyarakat; • Peningkatan pendapatan masyarakat; • Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	
Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	
Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	
TUJUAN: Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	
Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Percepatan Penurunan Stunting Melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu: • Pelaksanaan Program Penanganan Stunting; dan • Intervensi pencegahan stunting.
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	
Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	
TUJUAN: Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	
Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Penguatan Nilai Demokrasi Melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu: • Perbaikan kualitas layanan publik; • Penguatan nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat; dan • Perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	
Terkelolanya Keuangan Daerah Yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	
Tercapainya Pengembangan Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	

Sumber: RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 (diolah)

Sebagaimana tabel di atas, 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan berkorelasi positif dengan prioritas pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024. Korelasi positif tersebut memberikan gambaran bahwa 4 (empat) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, secara langsung dapat menjawab isu utama DKI Jakarta. Kemudian, di setiap prioritas pembangunan yang ada, terdiri atas strategi utama yang dalam hal ini akan menjadi pedoman dalam perumusan program prioritas DKI Jakarta Tahun 2024. Dari 6 (enam) prioritas pembangunan yang ada, total strategi utama pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024 adalah

sebanyak 14 (empat belas) strategi. Program prioritas sebagaimana dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Selanjutnya, prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan DKI Jakarta. Sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas RKPd Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran, strategi, prioritas pembangunan, dan program prioritas RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dilakukan melalui 11 (sebelas) sasaran pembangunan dan 48 (empat puluh delapan) strategi yang tersebar ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggulangan Banjir

DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian kawasannya memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berada pada muara daerah aliran sungai, serta dilalui oleh 17 sungai. Dengan kondisi geografis tersebut dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, serta dampak pembangunan yang masif, DKI Jakarta dihadapkan pada kerentanan kebencanaan yang kompleks, salah satunya adalah banjir.

Kota yang berketahanan harus dapat menjaga keberlanjutan ekologis dengan mengimplementasikan manajemen risiko bencana dalam rangka mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak, serta mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bencana. Hal ini sejalan dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030*.

Selain dipengaruhi oleh kondisi demografi, dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim menjadi faktor lainnya mengapa DKI Jakarta sangat rentan terhadap bahaya banjir. Curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat menyebabkan terjadinya peningkatan debit air yang melampaui kapasitas alir sistem drainase perkotaan yang saat ini hanya sebesar 1.414 m³/detik. Perubahan iklim juga berdampak pada kenaikan muka air laut global ditambah lagi dengan ekstraksi air tanah yang tidak terkendali menyebabkan sisi utara DKI Jakarta mengalami penurunan muka tanah dan rentan terhadap bencana banjir rob.

Pengendalian daya rusak air untuk mencapai pemulihan daerah aliran sungai (DAS) kritis dan pengamanan pesisir pantai dilaksanakan dengan fokus kepada antisipasi debit air yang belum tertampung melalui peningkatan kapasitas eksisting dan desain sistem drainase, pembangunan tanggul pengaman, dan upaya retensi air dalam rangka mengurangi luas daerah genangan banjir menjadi 889,4 m² di tahun 2026.

Upaya penanggulangan banjir dari hulu ke hilir di wilayah DAS Ciliwung-Cisadane Bodetabekpunjur juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, diantaranya melalui penyelarasan perencanaan pengelolaan DAS

yang termuat dalam Dokumen RPJMN 2019-2024, Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RPDAS) Ciliwung, Rencana Pembangunan Sumber Daya Air (RPSDA), serta dokumen lainnya.

Kepadatan penduduk juga menjadi faktor pendukung lainnya kejadian bencana di DKI Jakarta. Tingginya jumlah kepadatan penduduk di DKI Jakarta menimbulkan berbagai potensi permasalahan. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan adanya intervensi kegiatan perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Bahkan di area yang rawan terhadap bencana seringkali dimanfaatkan sebagai hunian. Hal tersebut berdampak menjadi semakin sempitnya daerah resapan air yang menyebabkan peningkatan aliran permukaan, dan banjir yang tidak terelakkan.

Dengan berbagai risiko tersebut, maka stabilitas dan ketahanan kota menjadi hal yang perlu untuk diwujudkan. Ketahanan kota dapat diartikan sebagai siapnya kapasitas individu, komunitas, swasta dan sistem di dalam kota untuk bersiap, beradaptasi, bertahan, dan menjadi lebih kuat menghadapi berbagai jenis tekanan dan guncangan yang dialami.

Untuk mengurangi potensi dampak dan meningkatkan ketahanan kota Jakarta terhadap bencana, diperlukan upaya-upaya pengelolaan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Adapun untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanggulangan banjir, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Persampahan.
- 2. Program Penatagunaan Tanah.
- 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- 4. Program Kawasan Permukiman.
- 5. Program Pengembangan Perumahan.
- 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
8. Program Penataan Bangunan Gedung.
9. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
12. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
13. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
15. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
16. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
17. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
18. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
19. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
20. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
21. Program Pengelolaan Hutan.
22. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
23. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
24. Program Pengelolaan DAS.
25. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
26. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
27. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
28. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
29. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
30. Program Penanggulangan Bencana.
31. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
32. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

b. Penanganan Kemacetan

Salah satu *root cause* dari kemacetan DKI Jakarta adalah pola pergerakan yang tidak efisien, pembangunan kota yang *car-oriented*, dan pengembangan hunian yang belum mempertimbangkan aksesibilitas, sehingga untuk beraktivitas sehari-hari warga menghabiskan banyak waktu untuk bermobilisasi mencapai pusat-pusat aktivitas. Di saat kota-kota besar dunia lainnya sudah mengadopsi konsep *15 minute city*, *average travel time* di Jakarta untuk mengakses suatu tempat dan kegiatan adalah 90 menit (JUTPI 2), dengan rata-rata kecepatan kendaraan yang relatif rendah yaitu 24.91 km/jam.

Untuk mengurai kemacetan tersebut Pemerintah menggagas transformasi secara menyeluruh melalui pergeseran paradigma penataan ruang yang lebih berorientasi transit dan selaras dengan rencana pengembangan sistem transportasi, penyediaan infrastruktur transportasi umum terintegrasi, yang mudah diakses, aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua, serta pembangunan infrastruktur yang mendorong *active mobility* melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki, jalur sepeda, dan prasarana lainnya yang mendorong warga melakukan perjalanan tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah juga merestrukturisasi hierarki prioritas pengguna jalan yang menempatkan pejalan kaki dan pesepeda pada prioritas utama, diikuti dengan angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan, dan kendaraan pribadi pada prioritas terakhir.

Konsep ruang kota berbasis transit menjadi salah satu tujuan jangka panjang penataan ruang DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam rancangan RTRW Jakarta 2040 dan penjabarannya RDTR Jakarta 2022-2026. Akselerasi perwujudan kota berorientasi transit juga dilaksanakan melalui penetapan sistem pusat-pusat pelayanan pada simpul-simpul transportasi yang dapat dikembangkan menjadi titik-titik kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan karakteristik utama diantaranya kawasan *mixed-use* dengan densitas tinggi, terdapat intermodal *interchange facilities* sebagai pusat kawasan yang terpadu dengan hunian, ruang hijau yang memadai, dan berbagai elemen lainnya yang mengutamakan integrasi tata ruang dan transportasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara konsisten memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan ruang serta implementasi program dan kegiatan sesuai dengan *timeline*

yang ditetapkan dalam RDTR dan PRK untuk seluruh kawasan TOD dan kawasan prioritas. Sejalan dengan upaya penataan ruang, pengembangan sistem transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kota transit.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2023, penggunaan transportasi publik (*public transport mode-share*) baru mencapai 18,86 persen, masih jauh dari target jangka menengah DKI Jakarta yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 23,01 persen. Untuk mencapai target tersebut, diterapkan *Transportation Demand Management* (TDM) melalui *push and pull strategy*. *Push strategy* merupakan kebijakan pembatasan ruang gerak bagi kendaraan pribadi, sedangkan *pull strategy* merupakan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Dalam rangka mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik sebagai implementasi kebijakan *pull strategy*, Pemerintah terus meningkatkan layanan angkutan umum. Salah satunya dengan menciptakan layanan transportasi terintegrasi melalui program Jak Lingko, dimana integrasi yang dilakukan tidak hanya berupa integrasi fisik, tetapi juga integrasi non fisik. Sedangkan implementasi kebijakan *push strategy* dilakukan dengan pembatasan volume penggunaan kendaraan pribadi melalui pemberlakuan kebijakan ganjil-genap, rencana operasional jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP), serta pemutakhiran regulasi perparkiran yang diiringi dengan pembangunan fasilitas *park and ride* yang terintegrasi dengan moda transportasi publik.

Adapun untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanganan kemacetan, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan.
- 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 4. Program Pengelolaan Pelayaran.
- 5. Program Pengelolaan Perkeretaapian.

c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu menciptakan peluang ekonomi serta dapat memberikan pemasukan bagi

daerah. Kawasan perkotaan memiliki potensi untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi, efisiensi sumber daya, kegiatan yang bernilai tambah, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperhatikan kontribusi ekonomi informal, sekaligus mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi formal.

DKI Jakarta sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis global memiliki peluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kebijakan pengembangan sektor usaha yang tepat. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah berkomitmen membangun praktik industri berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, perdagangan yang kompetitif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis dan inovasi berbasis pengalaman dan nilai tambah seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sektor perindustrian menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi Jakarta, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah dan lapangan kerja, serta peningkatan PDRB. BPS mencatat sektor industri pengolahan pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 11,87 persen terhadap PDRB, dengan pertumbuhan sebesar 4,49 persen. Adapun pengembangan industri di Jakarta diarahkan pada aktivitas ekonomi dengan value added yang tinggi, diantaranya industri kreatif dan industri berbasis teknologi yang tidak memerlukan lahan yang luas.

Komitmen Pemerintah dalam mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) dilaksanakan diantaranya dengan peningkatan kapasitas pelaku IKM melalui pelatihan dan peningkatan omset IKM melalui pendampingan, pemasaran, serta pendaftaran sertifikasi halal dan HKI. Melalui upaya yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan komunitas, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta, serta masyarakat, diharapkan IKM akan lebih inovatif sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan pengendalian izin usaha industri yang diselenggarakan dalam rangka mendorong pelaku industri untuk tertib perizinan melalui sosialisasi, verifikasi teknis, dan kegiatan pengawasan industri.

Selanjutnya, memastikan ekonomi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan juga dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan perekonomian lokal serta memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat memiliki

pekerjaan yang layak. Dampak lain dari kemajuan teknologi adalah perubahan kebutuhan tenaga kerja; pekerjaan yang sifatnya rutin, manual, dan kognitif akan berkurang. Sehingga untuk meminimalkan disrupsi dibutuhkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas dan adaptabilitas yang tinggi untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang kompetitif. Tantangan utama dunia ketenagakerjaan saat ini yaitu adanya bonus demografi penduduk usia produktif yang jumlahnya lebih besar dari penduduk usia tidak produktif, dampak pandemi yang mengakibatkan gelombang PHK, permintaan dan produksi barang yang turun, dan otomasi pekerjaan.

Dalam rangka menjawab tantangan yang ada, sekaligus peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan.
2. Transformasi Pusat Pelatihan Kerja.
3. *Link and Match* Ketenagakerjaan.
4. Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja.
5. Pengembangan Talenta Muda.
6. Perluasan Pasar Kerja Dalam Negeri.
7. Reformasi Pengawasan.

Selain produktivitas dan adaptabilitas tenaga kerja, untuk mengurangi potensi peningkatan pengangguran terbuka, Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah melalui pembangunan kewirausahaan. Adapun fokus kebijakan pada tahun 2024 yaitu melanjutkan penciptaan wirausaha yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT), yang dilaksanakan juga melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat dan/atau pihak lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung ekosistem PKT secara berkelanjutan, maka perlu dikembangkan ruang-ruang usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang dihasilkan. Dengan semakin tingginya aktivitas sosial dan kegiatan masyarakat di area publik, menimbulkan demand akan pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh produk UMKM. Untuk memfasilitasi hal tersebut dilaksanakan pendirian ruang usaha di area publik sesuai dengan standar yang berlaku, revitalisasi lokasi binaan dan lokasi sementara dengan menerapkan CHSE, dan

penataan pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Masterplan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta. Dengan pola pengaturan dan pengelolaan yang profesional nilai dari ruang dimaksud dapat ditingkatkan menjadi kawasan UMKM yang tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga bernilai estetis.

Disamping UMKM, pengembangan koperasi juga menjadi komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdimensi keadilan. Jakarta memiliki 9.904 koperasi, dengan 4.050 koperasi diantaranya merupakan koperasi aktif. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.551 koperasi dengan 987 koperasi aktif diantaranya merupakan binaan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menempatkan koperasi sebagai sektor yang berpotensi memberikan dampak signifikan dalam menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi rakyat.

Upaya yang dilaksanakan di sektor perkoperasian diantaranya adalah; penyuluhan koperasi kepada masyarakat, pembinaan koperasi, fasilitasi pameran bagi anggota koperasi, fasilitasi akta pendirian koperasi, revitalisasi koperasi binaan provinsi, fasilitasi klinik konsultasi koperasi, peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, peningkatan kepatuhan koperasi melalui pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi guna terciptanya peningkatan volume usaha koperasi, perluasan usaha koperasi, dan transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi digital.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penguatan nilai demokrasi, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

- 8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 9. Program Pengembangan Ekspor.
- 10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- 11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- 12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
- 13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- 14. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
- 15. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 16. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 17. Program Hubungan Industrial.
- 18. Program Pengawasan Ketenagakerjaan.
- 19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- 20. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
- 21. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
- 22. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
- 23. Program Pengembangan UMKM.
- 24. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 25. Program Promosi Penanaman Modal.
- 26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 27. Program Pengembangan Kebudayaan.
- 28. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- 29. Program Pengelolaan Permuseuman.
- 30. Program Pembinaan Perpustakaan.
- 31. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
- 32. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 33. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 34. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- 35. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- 36. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

d. Penanggulangan Kemiskinan

Jakarta berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk dan dimensi kemiskinan, yang dapat dimulai dengan memastikan bahwa

setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjadikan Jakarta kota inklusif, dengan menurunkan ketimpangan yang diukur melalui perhitungan gini rasio.

Ketimpangan pengeluaran penduduk salah satunya dapat tergambar melalui tingkat kemiskinan yang selama sepuluh tahun terakhir sempat berada di titik terendah yaitu 3,47 pada 2019. Memasuki periode pandemi di tahun 2020, tingkat kemiskinan DKI Jakarta sempat melonjak cukup jauh yaitu 4,72. Upaya Pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui berbagai program seperti pemberian bantuan tunai/non-tunai serta bantuan pengembangan ekonomi sehingga tingkat konsumsi penduduk miskin dapat terjaga stabilitasnya. Adapun pendanaan program tersebut dapat bersumber dari APBD serta non-APBD melalui kolaborasi dan skema pembiayaan lainnya.

Salah satu kebutuhan dasar yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah adalah kebutuhan akan pangan. Sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan bagi sepuluh juta penduduk Jakarta, hingga tingkat perseorangan tidak hanya mencakup kuantitas melainkan juga kualitas pangan yang berkaitan dengan keberagaman serta keamanan pangan. Secara kualitas, Pemerintah perlu memastikan pangan yang dikonsumsi penduduk sesuai proporsi energi seimbang yang dicerminkan melalui Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) ideal. Pada tahun 2023, skor PPH Provinsi DKI Jakarta adalah 92,7 poin. Selain itu Pemerintah juga telah melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan dari cemaran biologis,

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan.

Adapun upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan lain yang akan dilakukan Pemerintah yaitu dengan menyusun peta jalan pangan Provinsi DKI Jakarta, pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan untuk memantau kebutuhan dan suplai pangan pada 11 komoditi di daerah produsen dan pasar swalayan, pengawasan keamanan pangan terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak binaan, dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak di bidang pangan untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melakukan operasi pasar dan atau gelar pasar/bazar murah.

Selain menjamin ketersediaan pangan, perhatian lain dari pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta adalah melalui sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Pembatasan mobilitas masyarakat dan akses keluar masuk dari negara lain, menyebabkan jumlah wisatawan berkurang secara signifikan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain melalui Instruksi Gubernur No. 57 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Strategi Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Pasca Covid-19, sosialisasi sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) bagi industri pariwisata, serta penyaluran hibah pariwisata bagi pemilik hotel dan restoran. Kedepannya rencana pemulihan sektor pariwisata dalam jangka menengah difokuskan untuk pengembangan destinasi wisata urban, penguatan wisata *meetings, incentives, conferences, and exhibitions* (MICE), pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri, serta didukung oleh pengembangan sektor ekonomi kreatif. Strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis big data.

Pemulihan sektor pariwisata juga tidak terlepas dari pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai melting pot dari berbagai keberagaman kekayaan intelektual yang

berasal dari warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat baik untuk dikembangkan. Tujuh belas subsektor yang termasuk dalam sektor ekonomi kreatif antara lain kuliner, televisi dan radio, penerbitan, fashion, aplikasi, game developer, kriya, periklanan, arsitektur, musik, seni pertunjukan, fotografi, film animasi dan video, desain produk, desain interior, seni rupa, desain komunikasi visual.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Program Penanganan Bencana.
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
6. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
10. Program Pemasaran Pariwisata.
11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

e. Percepatan Penurunan Stunting

Perbaikan kesehatan perkotaan dikembangkan secara menyeluruh sebagai suatu sistem kesehatan kota Jakarta yang tangguh, berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan kualitas layanan kesehatan perkotaan, akses universal terhadap layanan kesehatan yang holistik, berkualitas, dan berkelanjutan ditingkatkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan. Untuk menciptakan generasi emas sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan intervensi dalam meningkatkan derajat kesehatan pada berbagai siklus kehidupan. Di mulai dari remaja putri yang sehat bebas anemia, skrining kesehatan bagi calon pengantin, kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin, sampai pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang

merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya pertumbuhan stunting, yang akan berdampak jangka panjang hingga berulang dalam siklus kehidupan.

Intervensi dalam rangka percepatan penurunan stunting berupa intervensi sensitif (70 persen) dari sektor di luar kesehatan dan spesifik (30 persen) dari sektor kesehatan. Pada tahun 2023, DKI Jakarta berhasil mencapai penurunan stunting sebesar 17,6 persen. Ditargetkan pada 2026, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita diharapkan turun menjadi sebesar 12,2 persen.

Penyelenggaraan layanan kesehatan di DKI Jakarta bertujuan untuk menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaanya. Cakupan layanan kesehatan tersebut terukur melalui Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI), yang pada tahun 2023 mencapai 75,01.

Terobosan dalam pengembangan layanan kesehatan juga diperlukan guna meningkatkan kualitas dan harapan hidup warga Jakarta, di antaranya melalui transformasi pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan Pemprov DKI Jakarta, digitalisasi pelayanan kesehatan (e-kesehatan), serta peningkatan layanan promotif dan preventif, tanpa mengabaikan layanan kuratif dan rehabilitatif. Upaya perbaikan kesehatan perkotaan perlu didukung oleh penguatan sektor penunjang lain seperti peningkatan peran dan fungsi keluarga, pembangunan kepemudaan, serta penyediaan fasilitas dan aktivitas yang dapat membangun pola hidup masyarakat yang lebih sehat.

Selanjutnya, dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan berketahanan, telah dirancang penyelenggaraan pelayanan keluarga satu pintu yang dioperasionisasikan melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), yang merupakan pusat informasi dan koordinasi layanan kesejahteraan dan ketahanan keluarga berbasis digital yang dilengkapi dukungan data yang dikumpulkan oleh Tim Penggerak PKK melalui kader Dasa Wisma. Melalui PUSPA, masyarakat dapat mengakses data, informasi, dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan

aktivitas virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara *online* dan *offline* bagi keluarga (ibu, balita, remaja, lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus kepada anak dan perempuan yang merupakan kelompok penduduk dengan kriteria spesifik, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Salah satu perhatian yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan memastikan kebutuhan gizi masyarakat yang dimulai dari anak usia dini tercukupi dengan baik. Sebagaimana diketahui, salah satu sumber makanan yang memiliki protein baik adalah ikan. Pada tahun 2023, DKPKP Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 211.332 ton produksi perikanan, dimana produksi terbesar bersumber dari perikanan tangkap sebesar 181.490 ton, serta paling sedikit bersumber dari perikanan budidaya sebanyak 4.976 ton. Adapun produksi perikanan pada tahun 2023 ini lebih kecil dari tahun 2022 yang mencapai 273.273 ton.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait percepatan penurunan stunting, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
5. Program Pengendalian Penduduk.
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
10. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
11. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
12. Menurunnya Kesenjangan Melalui

Pembangunan Responsif Gender.

13. Program Perlindungan Perempuan.
14. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
15. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
16. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
17. Program Perlindungan Khusus Anak.
18. Program Pengelolaan Pendidikan.

f. Penguatan Nilai Demokrasi

Pelayanan Publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi salah satu tolok ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat agar tetap prima. Seluruh instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat menjadikan nilai IKM sebagai parameter untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran yang berkesinambungan untuk mengetahui kinerja pelayanan dan untuk memperoleh aspek pelayanan mana yang dianggap perlu oleh masyarakat dan menjadi prioritas guna memperbaiki kualitas layanan.

Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diwujudkan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan. Khusus untuk pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyederhanakan prosedur perizinan, melakukan percepatan waktu proses perizinan, sampai melakukan automasi (elektronifikasi) perizinan maupun non perizinan. Seluruh perizinan ditargetkan 100 persen berbasis elektronik (*online*) yang didalamnya mencakup penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan birokrasi menjadi lebih ringkas sampai izin diterbitkan.

Terkait pelayanan administrasi kependudukan, dilakukan pemenuhan cakupan dokumen pendaftaran penduduk (KTP-el, KK,

KIA) dan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Akta Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian). Pelayanan administrasi kependudukan juga telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Alpukat Betawi untuk memudahkan warga dalam mengakses layanan tersebut. Di masa yang akan datang, pelayanan dengan menggunakan aplikasi online akan lebih ditingkatkan.

Selain itu, penggunaan mobil keliling untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan pelaporan kelahiran akan tetap dilaksanakan. Berikut layanan administrasi kependudukan lainnya yang akan tetap dilaksanakan kedepannya, antara lain: 1) SIMPATIK DUKCAPIL (Pelayanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan 3 Instansi, yaitu: Dinas Dukcapil, Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan), 2) Pelayanan Pencatatan Kawin Massal, 3) Layanan PeDeKaTe (Layanan Pencatatan Perkawinan bekerja sama dengan rumah ibadah), 4) Layanan administrasi kependudukan melalui Whatsapp, drive-thru, dan jemput bola.

Selanjutnya, akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara yang juga penting untuk diperhatikan oleh pemerintah selain transformasi layanan publik. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. AKIP juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pada tahun 2023, Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 81,06 atau mendapat predikat A. Pada tahun 2026 Pemerintah Provinsi DKI menargetkan nilai sebesar 90,5 atau mendapat predikat AA.

Salah satu transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang sehat,

transparan dan akuntabel ditandai dengan laporan keuangan daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Opini Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit oleh BPK RI selama enam tahun berturut-turut pada tahun 2017 s.d. 2022. Sejalan dengan capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan predikat WTP di tahun 2023-2026 mendatang.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan terkait penguatan nilai demokrasi, terdapat beberapa program prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2024, yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
7. Program Pendaftaran Penduduk.
8. Program Pencatatan Sipil.
9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
11. Program Pelayanan Penanaman Modal.
12. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13. Program Pengelolaan Arsip.
14. Program Pengelolaan Kecamatan.
15. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
16. Program Koordinasi Ketenteraman dan

Ketertiban Umum.

17. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
18. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
19. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
20. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
21. Program Penataan Organisasi.
22. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
23. Program Perekonomian dan Pembangunan.
24. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
25. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
26. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
27. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
28. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa.
29. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
31. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
32. Program Kepegawaian Daerah.
33. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Adapun keterkaitan antara Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan DKI Jakarta tahun 2024; Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dengan Program Prioritas DKI Jakarta tahun 2024; serta keterkaitan antara Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dengan Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah DKI Jakarta tahun 2024 tersampaikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.6
Keselarasan Prioritas dan Sasaran Nasional dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.	• Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	• Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi • Percepatan Penurunan Stunting • Penanggulangan Kemiskinan • Penguatan Nilai Demokrasi
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing	• Percepatan Penurunan Stunting • Penanggulangan Kemiskinan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	• Penguatan Nilai Demokrasi
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	• Penguatan Nilai Demokrasi • Penanganan Kemacetan

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar	b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan d. Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan e. Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	• Penanganan Kemacetan • Penanggulangan Banjir
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal b. Optimalnya kebijakan luar negeri c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	• Penguatan Nilai Demokrasi

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Keterkaitan sasaran pembangunan pembangunan nasional tahun 2024 disajikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 dengan sasaran pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7
Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024	
(1)		(2)	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
S3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	-	-
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024	
(1)		(2)	
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S8	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
		S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
		S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial
		S6	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
		S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S12	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
		S9	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S8	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S7	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2024	
(1)		(2)	
		S4	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S3	Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S2	Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S10	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S11	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

Dukungan program daerah RKPDP Tahun 2024 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. Terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah tahun 2024 agar target-target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pada RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.8
Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. - Program Pengelolaan Kota Administrasi. - Program Penempatan Tenaga Kerja. - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). - Program Pengelolaan Pendidikan. - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi. • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 9. Program Pengendalian Penduduk. 10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 13. Program Rehabilitasi Sosial. 14. Program Hubungan Industrial. 15. Program Pengembangan Perumahan. 16. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 19. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 20. Program Perlindungan Perempuan. 21. Program Penanganan Bencana. 22. Program Penanggulangan Bencana. 23. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 24. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 25. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Goal 2 Tanpa Kelaparan Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan. 3. Program Pengendalian Penduduk. 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan di anekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian. • Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 12. Program Penyuluhan Pertanian. 13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 14. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia . Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. • Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. • Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 4. Program Pengendalian Penduduk. 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 7. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman. 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
• Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. • Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. • Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. • Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	1. Program Pengelolaan Pendidikan. 2. Program Pengendalian Penduduk. 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 4. Program Pembinaan Perpustakaan. 5. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. 6. Program Pengelolaan Arsip. 7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
• Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. • Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. • Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. • Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. • Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	
Goal 5 Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	1. Program Perlindungan Perempuan. 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). 3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 4. Program Perlindungan Khusus Anak. 5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 7. Program Pengembangan Perumahan. 8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 9. Program Penyediaan dan Pengembangan

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
• Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. • Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional. • Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Prasarana Pertanian. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 12. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. • Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 11. Program Pengelolaan Hutan. 12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. 2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. • Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. • Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	1. Program Pengembangan Ekspor. 2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 6. Program Pemasaran Pariwisata. 7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. 9. Program Perekonomian dan Pembangunan. 10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 11. Program Perencanaan Tenaga Kerja. 12. Program Penempatan Tenaga Kerja. 13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 14. Program Hubungan Industrial. 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan. 16. Program Pengelolaan Pelayaran. 17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 18. Program Promosi Penanaman Modal. 19. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 20. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 21. Program Pelayanan Penanaman Modal. 22. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 23. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 24. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 25. Program Pengembangan UMKM. 26. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. 27. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 2. Program Pengelolaan Pelayaran.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. • Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. 4. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. 5. Program Penyelenggaraan Jalan. 6. Program Pengelolaan Perkeretaapian.
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). 3. Program Penempatan Tenaga Kerja. 4. Program Hubungan Industrial. 5. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 7. Program Rehabilitasi Sosial. 8. Program Perlindungan Perempuan. 9. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. 10. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada	1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Kawasan Permukiman. 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 4. Program Penyelenggaraan Jalan. 5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 6. Program Pengelolaan Pelayaran. 7. Program Pengembangan Kebudayaan. 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 9. Program Pengelolaan Permuseuman. 10. Program Penanggulangan Bencana. 11. Program Penanganan Bencana. 12. Program Pengelolaan Kecamatan.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. • Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. • Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. • Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. • Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. • Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>. • Target 11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.	13. Program Rehabilitasi Sosial. 14. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. 15. Program Pengelolaan Persampahan. 16. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 17. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 18. Program Penataan Bangunan Gedung. 19. Program Pengelolaan Perkeretaapian. 20. Program Penatagunaan Tanah.
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. 4. Program Pengelolaan Persampahan.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. • Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.	1. Program Penanggulangan Bencana. 2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 3. Program Rehabilitasi Sosial. 4. Program Penanganan Bencana. 5. Program Pengembangan Perumahan. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. 8. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Goal 14 Ekosistem Lautan Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i>.	1. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. 4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 7. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
• Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	
Goal 15 Ekosistem Daratan Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin kelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Program Pengelolaan Hutan. 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar,	1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 2. Program Perlindungan Khusus Anak. 3. Program Perlindungan Perempuan. 4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan. 7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. 8. Program Pengelolaan Kota Administrasi. 9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan. 10. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 11. Program Penataan Organisasi. 12. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 13. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. 14. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 15. Program Pendaftaran Penduduk. 16. Program Pencatatan Sipil. 17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 18. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. • Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	19. Program Pengendalian Penduduk. 20. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. 21. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan Beberapa target yang akan menjadi fokus DKI Jakarta di tahun 2025, yaitu: • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Pengembangan Ekspor. 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 6. Program Pendaftaran Penduduk. 7. Program Pencatatan Sipil. 8. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
Gender	
Menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 2. Program Perlindungan Perempuan. 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). 6. Program Perlindungan Khusus Anak.
Modal Sosial dan Budaya	
Internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (<i>local knowledge</i>), kearifan lokal (<i>local wisdom</i>), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 4. Program Promosi Penanaman Modal.

Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
(1)	(2)
	5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. 6. Program Pengembangan Kebudayaan. 7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 8. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Transformasi Digital	
Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	1. Program Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik. 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2024

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) wilayah Kota dan 1 (satu) Kabupaten. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Daya saing kota/ kabupaten dapat optimal jika masing-masing wilayah fokus membangun pada potensi keunggulannya. Oleh karena itu, perlu rumusan prioritas pembangunan dari setiap wilayah kota/kabupaten di DKI Jakarta.

a. Jakarta Pusat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Saluran Drainase
Fokus: 23 lokasi
2. Pembangunan Parapet
Fokus: Kali Krukut sepanjang 968,6 M.
3. Pembuatan 4 Kolam Retensi
Fokus: Jalan Suprpto sisi Selatan.
4. Pemeliharaan Rutin Saluran dan Drainase.
5. Pengerukan Kali Cideng dan Waduk Melati.
6. Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Stasioner.
7. Penempatan Pompa *Mobile* di Lokasi Rawan Genangan.

8. Pelaksanaan Grebek Lumpur.
9. Penyediaan MCK dan Septictank Komunal.
10. Melanjutkan Program 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
11. Optimalisasi Tempat Kumpul Kreatif (TKK) Fokus: Rehabilitasi Gedung TKK Johar Baru.
12. Pembinaan Kewirausahaan Peserta Jakpreneur.
Fokus: Kompetisi untuk subsektor Film, TV, Seni Pertunjukan, Desain, Foto, Musik dan Seni Rupa
13. Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pendaftaran Sertifikat Halal, Hak Merek, dan Izin Edar MD BPOM.
14. Pelatihan, Pembuatan Logo dan Desain Kemasan.
15. Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan.
16. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kemitraan.
17. Pameran Produk dan Bimtek Pengembangan Ekraf Berkolaborasi dengan Masyarakat dan Komunitas.
18. Peningkatan Pendapatan dan Produktivitas.

Fokus: Pelatihan dan bursa lowongan kerja.

19. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh.
20. Akurasi dan Validitas Data.
Fokus: Kegiatan TELISIK (Telusur Spesifik) pada keluarga terpilih dari hasil pendataan keluarga satu pintu.
21. Penataan Kawasan Skala Mikro.
Fokus: 44 Kelurahan.
22. Penataan Kawasan Petojo Enclek Menjadi Kawasan Wisata Berjalan Kaki Yang Nyaman.

b. Jakarta Utara

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Jalan
Fokus: Disepanjang jalan Akses Marunda.
2. Peninggian Jalan
Fokus: (Sisi Timur) depan Lantamal III.
3. Penyelesaian Pembangunan NCICD
Fokus: Titik utama pembangunan NCICD dalam rangka penanggulangan Banjir Rob di Pesisir Utara Jakarta.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Fokus: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai dalam rangka mendukung pencapaian target nasional untuk penurunan stunting.

c. Jakarta Barat

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Sarpras Pengendali Banjir.
Fokus:
 - a) Penambahan Kapasitas Kolam Olakan Pompa Phb. Bojong – Rawa Buaya.
 - b) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Tanjung Duren.
 - c) Revitalisasi Pompa Mobile menjadi Pompa Stasioner di Jl. Pedongkelan Raya (pertemuan Kali Apuran dengan Cengkareng Drain).
 - d) Perkuatan tebing kali / sheetpile Kali Sekretaris (Jl. Gili Sampeng – Jl. Arjuna Selatan) sepanjang 200 m².
2. Normalisasi Saluran.
3. Pemeliharaan Rutin Kali / Saluran.
4. Perbaikan Saluran.

5. Refungsi Saluran.
6. Penanganan Sampah Kali.
7. Rekayasa Lalu Lintas.

Fokus:

- a) Sistem satu arah / pengalihan jalan alternatif dari Jl. Puri Kencana melalui Jl. Kencana Indah dan Jl. Kembang Indah ke arah Meruya, Kembangan.
- b) Pengaturan arus lalu lintas dari utara dan selatan karena penyempitan jalan (*bottle neck*) di Kembang Kerep Kuku Macan, Kecamatan Kembangan.
8. Penertiban Parkir Liar.
9. Pembebasan Lahan untuk Penyesuaian Trase Jalan.
10. Pembukaan Portal.
11. Pelaksanaan Pelatihan.
Fokus: Masyarakat miskin dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Pelatihan *Softskill* dalam Memotivasi Para Pelaku Usaha dan Pelatihan *Hardskill* untuk Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Pelaku Usaha.
Fokus:
 - a) Pelatihan Manajemen usaha dan pemasaran dengan professional.
 - b) Pelatihan dalam bidang Kuliner, Fashion, Kerajinan, Tata Rias, Service AC, Ekonomi Kreatif, Olahan Hasil Perikanan, Hasil Pertanian, Hasil Peternakan, Budidaya Perikanan dan Budidaya pertanian perkotaan.
13. Perluasan Akses Pemasaran Produk Jakpreneur.
Fokus: Pelaksanaan event bazar tingkat Kecamatan, Kota, dan Provinsi secara *offline* maupun *online*.
14. Implementasi Pergub 77 Tahun 2020.
Fokus: Pengurangan sampah di sumber sesuai target 28% pada tahun 2024.
15. Pembentukan dan Pendampingan Bank Sampah.
Fokus: 905 BSU.
16. Peningkatan TPS yang Berkonsep 3R.
Fokus: Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Grogol Petamburan, Kecamatan Kalideres, Kecamatan Kembangan.
17. Alokasi Revitalisasi Tangki Septik.
18. Pelatihan Guru PAUD dan Percepatan Pembentukan PAUD Holistik Integratif.
19. Pembangunan IPAL di Jakarta Barat.

d. Jakarta Selatan

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Embung Terpadu
Fokus: Cipete Selatan.
2. Pembuatan Embung
Fokus: Duren Tiga & Tegal Parang.
3. Pembuatan Embung Terpadu
Fokus: Srengseng Sawah.
4. Pembuatan Embung
Fokus: Bantaran Kali Krukut dan PHB El Nusa.
5. Pembuatan Embung dan Jalan Inspeksi
Fokus: Jl. Mampang Prapatan IX.
6. Penurapan Kali Mampang dan Kali Krukut.
7. Pengerukan & Beautifikasi
Fokus: Sepanjang kampung pinggir kali PHB Kalibata.
8. Pembangunan Saluran
Fokus: Dari perempatan Seskoal ke Kali Pesanggrahan.
9. Pembuatan Embung Terpadu
Fokus: Jl.Merpati II RT 03/RW 06 Pesanggrahan.
10. Inventaris Kepemilikan Lahan untuk Pembangunan.
11. Optimalisasi GO TUNTAS JS (Gerakan Orang Tua Asuh untuk Anak Stunting Jakarta Selatan).
12. Perencanaan Pembangunan (X-1)
Fokus:
a) PUSKESMAS Kelurahan Karet Kuningan.
b) PUSKESMAS Kelurahan Jati Padang.
13. Rehab Gedung Sekolah.
14. Rehab Lapangan Sepakbola, Futsal, dan Basket Terbuka
Fokus: A.Yani di jalan Praja No.3a RT 014/ RW 001 Kecamatan Kebayoran Lama
Pembangunan 35 Lapangan Olahraga
Pengadaan alat tenis meja.
15. Penyesuaian Separator/Median Jalan, Pembukaan/Penutupan Putaran, Koordinasi/Fasilitasi Pelebaran Jalan.
Fokus: Titik *bottle neck* ke Instansi samping/vertikal.
16. Pembangunan Gedung Parkir (Lahan milik Jakpro.
17. Pengembangan Taman Eduwisata Tanaman Buah “KEYLA”.

e. Jakarta Timur

Prioritas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Fungsi Waduk /Setu /Embung & Kali dengan Pengerukan Berkala.
Fokus: 39 lokasi pada tahun 2021 s.d. 2022.
2. Pembangunan Saluran Phb dan Saluran Mikro Sepanjang 29.387,77 M dan Pengurasannya 7.206,10 M.
3. Membangun dan Memelihara Waduk Wirajasa Terhubung Saluran Phb Manunggal.
4. Pembangunan/Peningkatan 23 Pintu Air, 8 Rumah Pompa dan 30 Unit Pompa.
5. Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Pompa.
Fokus: 4 lokasi (Pulomas, JGC, Tipala /Adhyaksa, dan Phb Cililitan -Kebon Pala).
6. Optimalisasi Ruang Biru Pada RTH dengan Membangun Bioswale.
Fokus: 6 lokasi dan rain garden 1 lokasi.
7. Pemanfaatan Waduk /Embung Sebagai Pengendali Banjir Sekaligus Tempat Rekreasi.
8. Dukungan Percepatan Penyerahan Fasos /Fasum Oleh Universitas Trisakti.
Fokus: Lahan sodetan Ciliwung.
9. Melakukan Perencanaan dan Evaluasi Penanganan Stunting.
Fokus: Pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting.
10. Memaksimalkan Tugas dan Fungsi 1.184 Posyandu dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita.
11. Peningkatan Wawasan Kepada Remaja Putri, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pekerja Wanita, Ibu Menyusui dalam Memaksimalkan Seribu HPK.
12. Memaksimalkan Peran Orang Tua Asuh Stunting.
13. Penyediaan PMT-AS SD dan TK/PAUD.
14. Sosialisasi Strategi Pengasuhan Positif pada Anak Usia Dini.
15. Melaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
Fokus: Monitoring dari tingkat kota dan TPPS.
16. Mendorong Balita Stunting Dirujuk untuk Dilakukan Intervensi Lebih Lanjut dari RS.
17. Pelatihan Bagi Peserta Jakpreneur

Berbasis APBD:

Fokus: 9.850 peserta dan kerjasama dengan swasta/universitas sebanyak 6.439 peserta.

- 18. Penerbitan Izin Bagi Jakpreneur.
Fokus: 2.296 peserta.
- 19. Pemasaran Produk Jakpreneur.
Fokus: 5.060 peserta dengan omset Rp5M
- 20. Pelatihan Keterampilan.
Fokus: 7.138 peserta.
- 21. Pelaksanaan Job Fair Sebanyak 3 Kali.
- 22. Dukungan Terhadap Pengembangan Destinasi Berbasis Agro Edu Wisata.
Fokus: Agro Wisata Cilangkap, Cagar Buah Condet, dan Taman Ternak Pondok Ranggon.
- 23. Penataan Jaringan Utilitas dan Saluran Secara Terintegrasi Dengan *Ducting System*.
- 24. Penyediaan dan Mengkoneksikan Jalur Pejalan Kaki dan Penyeberangan/*Skywalk*.
- 25. Penataan Taman Menjadi Ruang Interaksi dan Melengkapi Jalur Hijau Dengan Bioswale dan Rain Garden.
- 26. Integrasi Moda Transportasi Baik Kendaraan Umum Maupun Pribadi.

f. Kepulauan Seribu

Prioritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka mendukung tema pembangunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan status RSUD dari Tipe D ke Tipe C / RSIA.
- 2. Optimalisasi rumah sakit kepulauan seribu dengan pemanfaatan layanan kamar operasi dan perawatan intensif untuk dewasa (ICU) dan bayi baru lahir (NICCU).

- 3. Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan peningkatan intensif dokter spesialis yang ditempatkan di RSUD Kep.Seribu.
- 4. Dibutuhkan lahan untuk pembangunan poskes di pulau pari.
- 5. Pembentukan Jurusan SMK Sesuai kebutuhan.
- 6. Pengadaan Tempat Praktek Docking Kapal sebagai sarana pelatihan SMKN 61.
- 7. Revitalisasi Pelabuhan & Dermaga.
- 8. Membuat gerbang masuk utama Kepulauan Seribu di daratan DKI Jakarta.
- 9. Pemenuhan Kebutuhan Angkutan Perairan Antar Pulau.
- 10. Pembangunan Rumah Susun di Kepulauan Seribu.
- 11. Peningkatan kapasitas produksi SWRO.
- 12. Peningkatan kualitas produksi dan SWRO agar bisa langsung diminum.
- 13. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Terpadu.
- 14. Revitalisasi Pulau Tidung Kecil menjadi Eko Agro Mina Wisata.
- 15. Pengadaan Kapal Conveyor untuk membersihkan sampah di perairan.
- 16. Pembangunan TPS, dan Pengolahan Sampah Non Konvensional dan Ramah Lingkungan.
- 17. Pengembangan adanya pulau khusus penanganan sampah di pulau.
- 18. Pengembangan Spot wisata di setiap Pulau Permukiman.
- 19. Pengembangan *Object* wisata Cagar Budaya.
- 20. Pembangunan GOR di pulau panjang dan pulau tidung kecil.
- 21. Pembangunan *Floating Sports Tourism*.
- 22. Pemenuhan kebutuhan aliran listrik di Pulau *Resort* dan Pulau *Private*



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah yang memuat kebijakan dan penyesuaian perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah, serta penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1 Kebijakan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian rencana kerja dan pendanaan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Kebijakan perubahan dimaksud mengacu pada Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Kriteria Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi:

- a. pemenuhan belanja wajib dan mengikat, yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan sosial;
- c. menjaga optimalisasi layanan pada instansi yang menerapkan skema Badan Layanan Umum Daerah;

- d. penyelesaian prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2024, antara lain:
 - 1) penanggulangan banjir;
 - 2) penanganan kemacetan;
 - 3) akselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - 4) pencegahan stunting;
 - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
 - 6) penguatan nilai demokrasi.
- e. kegiatan yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan lainnya yang merupakan ear marking dari Dana Transfer Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Wajib yang didanai oleh dana bagi hasil.

Selain itu, perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah juga tetap memperhatikan:

- a. pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah dan pemenuhan prioritas pembangunan daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah dan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun;
- c. pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat, arahan tertulis Pj. Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
- d. keadaan darurat, mendesak dan keadaan luar biasa;
- e. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ditetapkan;
- f. pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah yang masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

5.2 Penyesuaian Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, serta prioritas pembangunan tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembangunan melalui 132 program prioritas. Pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjaga konsistensi terhadap program prioritas yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Adapun rincian rencana kerja program prioritas yang dilaksanakan di tahun 2024 beserta pagu indikatif dan target kinerja disampaikan pada Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan			Indeks Kota Layak Huni	Indeks	66		71		71		71		
1.1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas			Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	%	69,56		77,24		77,24		77,24		
	Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kapasitas pengolahan air minum yang beroperasi	liter/ detik	22984	20.962.173.187	22984	23.540.920.956	22984	23.540.920.956	22.984	22.266.374.312	Dinas SDA
	Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah debit air limbah yang terolah	m3/ hari	1370	701.880.312.553	1370	680.148.129.002	1370	680.148.129.002	1.370	659.333.715.041	Dinas SDA
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	% Unit Hunian Layak yang Terbangun	%	1,57	424.434.364.155	1,35	445.206.954.424	1,35	445.206.954.424	1,35	453.524.745.488	Dinas PRKP
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	% Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Terselenggara	%	81,38	*	81,38	*	81,38	*	81,38	*	Dinas PRKP
	Penyelesaian Administrasi Pertanahan untuk Kampung Kota	2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah milik masyarakat yang terinventarisasi dan terfasilitasi dalam rangka perencanaan penggunaan tanah untuk mendukung peningkatan sertifikasi di kawasan permukiman	%	20	2.613.390.642	20	2.563.377.046	20	2.563.377.046	20	2.563.377.046	Dinas CKTRP
	Penyediaan Hunian Layak dan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	% PSU Kawasan Permukiman yang ditingkatkan	%	9,67	430.458.925.683	9,67	419.513.849.705	9,67	419.513.849.705	9,67	415.309.418.908	Dinas PRKP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.2	Optimalisasi Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Kolaboratif serta Berwawasan Lingkungan	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kapasitas sistem penanganan persampahan	ton/ hari	2750	2.613.045.958.569	2750	2.962.068.624.800	2750	2.962.068.450.456	2750	3.214.153.803.304	DLH
			Persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan	%	9	9		9		9				
	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit			Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	20,97		20,97		20,97		20,97		20,97
	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Bina Marga	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan	Indeks	4	1.677.277.445.217	4	1.763.647.067.807	4	1.763.647.067.807	4	1.896.224.135.105	DBM
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	Indeks	4	13.386.262.442	4	11.946.862.808	4	11.946.862.808	4	11.404.502.328	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian panduan rancang kota sistem pusat pelayanan dengan pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit	%	90	130.516.710.087	90	135.660.508.627	90	135.660.508.627	90	134.052.578.206	Dinas CKTRP
				Persentase pelanggaran penyelenggaraan ruang dan bangunan yang terselesaikan tepat waktu	%	90		90		90		90		
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari	Penumpang g per hari	3972800	5.365.922.191.797	3972800	5.399.180.623.948	3972800	5.399.180.623.948	3972800	6.220.184.839.000	Dishub
				Indeks fatalitas kecelakaan angkutan umum per tahun	Indeks	1,49		1,49		1,49		1,49		
				Kecepatan rata-rata di ruas jalan yang dikenakan kebijakan	km/jam	27		27		27		27		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				pembatasan lalu lintas pada jam sibuk										
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Pelabuhan	7	44.404.508.349	7	47.336.081.430	7	47.336.081.430	7	39.767.739.396	Dishub
				Persentase badan usaha angkutan perairan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	49,52		49,52		49,52		49,52		
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian provinsi	Rekomendasi	2	5.434.392.291	2	3.939.602.119	2	3.939.602.119	2	3.939.602.119	Dishub
1.3	Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	55,43		55,43		55,43		55,43		
				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	20		25,4		25,4		25,4		
	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis keselamatan bangunan	%	97	1.464.882.482.885	97	943.374.082.609	97	943.374.082.609	97	955.147.334.995	Dinas CKTRP
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan tepat waktu	%	100	745.592.000	100	1.434.537.918	100	1.434.537.918	100	1.689.177.918	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase parameter yang memenuhi baku mutu	%	76,5	59.777.478.657	76,5	67.950.929.546	76,5	67.950.929.546	76,5	107.131.709.546	DLH

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	%	100	875.727.951.344	100	884.801.728.266	100	884.799.487.595	100	886.706.438.770	Distamhut
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	%	100	10.612.838.538	100	10.541.337.062	100	10.541.337.062	100	10.490.939.211	Kab. Adm. Kep. Seribu
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Limbah B3 Rumah Tangga yang dikelola	ton	65	3.119.666.991	65	2.824.494.835	65	2.824.494.835	65	2.849.767.004	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	%	12,5	2.599.914.588	12,5	2.665.258.298	12,5	2.665.258.298	12,5	2.765.458.298	DLH
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah partisipan yang berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional	Lokasi	50	4.266.101.710	50	5.125.402.333	50	5.125.402.333	50	5.147.802.333	DLH
	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Ruang Laut	%	18,49	5.050.107.597	18,49	4.731.890.068	18,49	4.731.890.068	18,49	4.731.890.068	Dinas KPKP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	120107	9.572.470.728	120107	8.976.472.238	120107	8.976.472.238	120.107	8.738.560.772	Dinas KPKP
	Pengurangan Pencemaran Lingkungan melalui Upaya Preventif dan Pengendalian yang Intensif	2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan	%	100	648.378.815	100	648.084.872	100	648.084.872	100	648.084.872	DLH
	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	71	1.091.267.625	71	1.024.770.580	71	1.024.770.580	71	1.270.548.300	Dinas KPKP
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	4498	9.602.491.806	4498	10.273.899.684	4498	10.273.899.684	4.498	10.012.467.092	Dinas KPKP
	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebihan	3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	15331,8	7.928.667.424	15331,8	7.866.536.227	15331,8	7.866.536.227	15.331,8	7.866.536.227 30.081.330.204	Dinas KPKP
				Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	48		48		48		100		
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	%	100	30.698.218.474	100	30.056.130.246	100	30.056.130.204	90	142.021.356	Distamhut
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	%	90	142.021.360	90	142.021.356	90	142.021.356	80	588.914.786	Distamhut
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.05	Program Pendidikan dan	Persentase peserta dengan tingkat	%	80	589.055.754	80	588.914.786	80	588.914.786	2	348.131.101	Distamhut

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan										
	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Lokasi	2	348.135.567	2	348.131.101	2	348.131.101	262,94	7.576.671.509	Distamhut
	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	715,69	10.649.524.422	262,944	7.576.671.509	262,944	7.576.671.509	18,49	4.731.890.068	Dinas TKTE
	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	%	100	4.647.605.635	100	6.870.974.454	100	6.870.974.454	100	7.253.181.233	Dinas TKTE
				Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	%	30		30		30				
				Presentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	%	60		60		60				
	Peningkatan Stabilitas dan Ketahanan Kota				Indeks Risiko Bencana	Skor	59,66		59,66		59,66		59,66	
1.4	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan kapasitas tampungan air	m3	682000	1.825.385.682.486	682000	1.696.027.024.358	682000	1.696.027.024.358	682000	2.323.458.095.077	Dinas SDA
				Persentase luas kawasan/sistem polder yang tertangani	%	8,78		8,78		8,78				
				Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi	%	54,4		54,4		54,4				

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pembangunan tanggul kritis di muara kali dan pantai Jakarta	%	49		49		49		49		
	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air yang Berkelanjutan	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam	%	87	811.538.761.899	87	907.767.487.599	87	907.767.487.599	87	916.029.345.958	Dinas SDA
	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	94,5	280.177.028.077	94,5	264.135.935.008	94,5	264.135.935.008	94,5	264.235.852.030	Satpol PP
	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	%	0,92	40.133.527.331	0,92	84.782.697.952	0,92	84.782.697.952	0,92	93.235.424.266	BPBD
				Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	100		100		100		100		
				Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	%	100		100		100		100		
	Peningkatan Kapasitas Ketangguhan Kebakaran	1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Berhasil	%	55	233.791.938.066	55	346.684.822.172	55	346.684.822.172	55	346.175.552.429	Dinas Gulkarmat
	Pengendalian Penurunan Muka Tanah Melalui Pemanfaatan Air Tanah yang Terkendali	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pemantauan pemanfaatan air tanah	%	100	17.741.999.970	100	17.699.999.922	100	17.699.999.922	100	17.699.999.922	Dinas SDA
2.	Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,81		7,81		7,81		7,81		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.1	Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,40-6,20		4,8		4,8		4,8		
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Usaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki perizinan	Usaha pariwisata	17345	76.068.301.879	17345	86.929.946.945	17345	86.929.946.945	17345	97.470.516.722	Dinas Parekraf
				Jumlah pengunjung event	Orang	324008		324008		324008		324008		
				Nilai kepuasan pengunjung objek wisata	Nilai	75		75		75		75		
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Usaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pengunjung e-tourism	Pengunjung website dan medsos	3216410	45.542.661.267	3216410	73.132.762.705	3216410	73.132.762.705	3216410	72.025.086.902	Dinas Parekraf
				Nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta	Nilai	75		75		75		75		
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Usaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya	produk	450	39.618.589.151	450	38.436.999.815	450	38.436.999.815	450	41.915.945.277	Dinas Parekraf
	Peningkatan Jumlah Wisatawan serta Keterlibatan Usaha Ekonomi Kreatif dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi	orang	5488	8.832.773.456	5488	6.024.141.910	5488	6.024.141.910	5.488	6.021.915.365	Dinas Parekraf
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	50	9.484.972.613	50	9.134.741.265	50	9.134.741.265	50	9.477.251.030	Dinas KPKP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana peternakan dalam kondisi baik	%	55	12.555.502.795	55	12.642.187.894	55	12.642.187.894	55	12.486.978.579	Dinas KPKP
				Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	70		70		70		70		
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (rabies)	%	100	9.682.747.586	100	9.595.050.445	100	9.595.050.445	100	9.380.460.282	Dinas KPKP
				Persentase pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	%	70		70		70		70		
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5		5		5		5		
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase area lahan yang terkendali	%	85	994.490.770	85	979.433.720	85	979.433.720	85	979.433.720	Dinas KPKP
	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian dan peternakan	%	2,5	11.633.972.114	2,5	11.696.361.289	2,5	11.696.355.919	2,5	11.322.309.939	Dinas KPKP
				Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	80		80		80		80		
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemanfaatan SKA	Persen	**	**	**	**	**	**	**	**	Dinas PPKUKM
				Persentase verifikasi permohonan Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan melalui	Persen	**		**		**		**		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Online Single Submission Risk Based Approached (OSS-RBA)										
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Nilai	14	254.236.775	14	254.161.378	14	254.161.378	14	254.161.378	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas DKI Jakarta	USD	11542100000	2.991.741.424	11542100000	6.115.532.175	11542100000	6.115.532.175	11542100000	6.262.531.507	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100	9.009.987.604	100	7.871.097.189	100	7.871.097.189	100	7.762.561.088	Dinas PPKUKM
				Persentase produk hasil uji yang sesuai syarat mutu SNI atau syarat teknis lainnya	%	81		81		81		81		
				Persentase alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	%	100		100		100		100		
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha terfasilitasi dalam pemasaran produk dalam negeri yang meningkat omsetnya	%	30	23.508.614.051	30	29.786.217.179	30	29.786.217.179	30	30.612.693.866	Dinas PPKUKM
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Berwawasan Lingkungan	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan omzet industri kecil dan menengah	%	4	78.044.744.057	4	65.587.797.475	4	65.587.797.475	4	64.261.310.100	Dinas PPKUKM
				Persentase pelaku usaha IKM yang meningkat kapasitasnya	%	55		55		55		55		
	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri tertib perizinan	%	60	9.840.150	60	9.807.749	60	9.807.749	60	9.807.749	Dinas PPKUKM

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Berwawasan Lingkungan													
2.2	Meningkatkan Kesempatan, Pemberdayaan, dan Adaptabilitas Tenaga Kerja			Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus)	Persen	7,91		6,53		6,53		6,53		
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	%	70	105.724.270	70	105.718.590	70	105.718.590	70	205.906.090	Dinas TKTE
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	%	90	28.171.351.796	90	30.746.444.121	90	30.746.444.121	90	29.025.444.354	Dinas TKTE
				Persentase tenaga kerja mandiri yang berwira usaha, berdaya saing dan berkelanjutan.	%	90		90		90		90		
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	%	70	2.115.408.980	70	2.089.165.000	70	2.089.165.000	70	2.089.165.000	Dinas TKTE
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	60	7.800.000	60	7.800.000	60	7.800.000	60	7.800.000	Dinas PPKUKM
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	%	80	85.410.874.660	80	90.960.049.241	80	90.960.049.241	80	97.607.101.361	Dinas TKTE
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	403711000		403711253		403711253		403711253		
	Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan.	%	80	3.450.528.289	80	3.422.020.180	80	3.422.020.180	80	3.677.503.474	Dinas TKTE
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya	%	60	446.409.079	60	1.000.250.643	60	748.445.752	60	748.445.752	Dinas PPKUKM

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kemandirian Ekonomi													
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	2.172.367.782	2	654.077.501	2	654.077.501	2	465.007.811	Dinas PPKUKM
				Persentase koperasi konvensional yang bertransformasi digital (modern)	%	0,48		0,48		0,48		0,48		
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru yang tangguh dan mandiri	%	3	61.042.337.636	3	65.139.768.551	3	65.391.374.825	3	64.229.574.348	Dinas PPKUKM
	Penumbuhan Nilai-nilai Kewirausahaan Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Ekonomi	2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang terdigitalisasi	%	80	182.145.315	80	233.596.279	80	233.596.279	80	233.596.279	Dinas PPKUKM
2.3	Berkurangnya Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial			Tingkat Kemiskinan	Persen	3,79		3,79		3,79		3,79		
				Rasio Gini	Koefisien	0,410		0,41		0,41		0,41		
				Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,88		0,5		0,5		0,5		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mampu melakukan pemberdayaan sosial	%	79,8	19.859.154.831	79,8	19.473.052.798	79,8	19.473.052.798	79,8	20.171.094.032	Dinsos
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Indeks pencapaian SPM rehabilitasi sosial	Indeks	100	275.891.720.763	100	290.816.255.506	100	290.816.255.506	100	298.616.349.169	Dinsos

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima layanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	%	100	1.011.503.103.097	100	860.792.291.786	100	860.792.291.786	100	749.140.331.786	Dinsos
	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks pencapaian SPM penanganan bencana	Indeks	100	28.046.228.441	100	28.307.733.939	100	28.307.733.939	100	38.806.986.312	Dinsos
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	%	95	204.819.975	95	204.798.467	95	204.798.467	95	204.501.697	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	100	762.883.806.363	100	795.188.175.882	100	795.188.175.882	100	795.373.542.140	Dinas KPKP
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah tahan pangan	%	95,45	96.429.020	95,45	*	95,45	*	95,45	*	Dinas KPKP
	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan yang Bebas Bahan Berbahaya	%	99,8	2.910.472.541	99,8	2.866.106.653	99,8	2.866.106.653	99,80	2.782.243.693	Dinas KPKP
	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	93,63	467.084.476.133	93,63	468.217.958.592	93,63	468.217.958.592	93,63	467.033.126.924	Dinas PPAPP
2.4	Memkuatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,98		4,01		4,01		4,01		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai kemudahan investasi	Nilai	75	2.142.394.188	75	2.390.606.032	75	2.390.606.032	75	2.390.606.032	Dinas PMPTSP
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, dan Swasta	100	100	9.723.543.435	100	9.473.642.465	100	9.473.642.465	100	8.723.336.557	Dinas PMPTSP
				Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta	%	100		100		100		100		
	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	50	75	2.904.925.381	75	2.794.386.163	75	2.794.386.163	75	2.794.386.163	Dinas PMPTSP
	Terwujudnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkaya Kebudayaan Nasional	2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Benda dan Tak Benda (WBTB) yang merupakan Intangible Culture Assets menurut UNESCO	%	8,98	82.954.645.463	8,98	109.155.517.838	8,98	109.155.517.812	8,98	113.267.492.002	Disbud
	Terwujudnya Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memperkaya Kebudayaan Nasional	2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Objek diduga Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta	%	43,06	13.322.331.487	46,8	13.321.906.121	46,8	13.321.906.121	46,8	13.074.041.576	Disbud
	Memperkuat peran museum sebagai tempat pelestarian dan pusat informasi benda cagar budaya dan koleksi.	2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan museum lainnya	%	24,7	19.409.101.594	24,7	61.189.878.816	24,7	61.189.878.800	24,7	61.189.878.800	Disbud

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	25	61.921.761.380	25	102.705.994.491	25	102.705.994.491	25	102.109.852.207	Dispusip
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0625		0,0625		0,0625		0,0625		
				Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0004		0,0004		0,0004		0,0004		
				Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	%	9,9		9,9		9,9		9,9		
				Nilai tingkat kegemaran membaca	Nilai	72,91		72,91		72,91		72,91		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Di Wilayah Yang Optimal	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	14	1.536.050.214	14	1.471.011.296	14	1.471.011.296	14	1.479.336.296	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase capaian serah simpan karya cetak dan karya rekam yang menjadi koleksi daerah	%	27,5	799.391.649	27,5	890.107.782	27,5	890.107.782	27,5	890.107.782	Dispusip
				Persentase capaian naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	%	20		20		20		20		
	Peningkatan Fasilitas Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha	4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase proyek kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan	%	***	***	***	***	***	***	***	***	Dinas PMPTSP
	Menciptakan Kluster Inovasi Melalui Kolaborasi Pentahelix	5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	%	60	2.284.530.359	60	4.169.253.050	60	4.169.253.050	60	7.556.738.768	Bappeda

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,77		83,55		83,55		83,55		
3.1	Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua dan Edukasi terkait Pembelajaran Sepanjang Hayat			Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,16		12,16		12,16		12,16		
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Persentase	91,58	9.516.852.438.005	91,58	9.172.910.258.852	91,58	9.201.062.258.852	91,58	9.810.791.653.242	Dinas Pendidikan
				Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persentase	100		100		100		100		
				Jumlah Anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100		100		100		100		
				Persentase guru profesional	Persentase	88,5		88,5		88,5		88,5		
				Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	Persentase	72,56		72,56		72,56		72,56		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	69,92		69,92		69,92		69,92		
				Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Nilai	62,5		62,5		62,5		62,5		
				Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	Persentase	100		100		100		100		
				Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Persentase	100		100		100		100		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persentase	100		100		100		100		
3.2	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan			Angka Harapan Hidup	Tahun	73,32		75,81		75,81		75,81		
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	13,2		13,2		13,2		13,2		
	Meningkatkan Layanan, Infrastruktur, Akses, dan Integrasi Transportasi	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	****	2.690.041.100.559	****	2.559.563.847.597	****	2.559.563.847.597	****	2.903.781.596.260	Dinkes
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan Farmasi Klinis Sesuai Standar	%	67		67		67		67		
				Persentase Pemenuhan Kategori Standar Alat Kesehatan yang Aman, Mutu, Selamat dan Laik Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		
				Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,58		0,58		0,58		0,58		
				Angka Kematian Ibu (AKI)	Rate	74		74		74		74		
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	Rate	1,3		1,3		1,3		1,3		
				Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	%	100		100		100		100		
				Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100		100		100		100		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				sesuai target di SKPD/UKPD Urusan Kesehatan										
				Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD)	%	40		40		40		40		
				Persentase Pemenuhan Standar Pembangunan, Rehabilitasi, dan/atau Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya	%	100		100		100		100		
				Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98		98		98		98		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	100		100		100		100		
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase implementasi hospitality dalam pelayanan	%	100	1.524.238.762.960	100	1.630.370.390.539	100	1.630.370.390.539	100	1.574.267.589.414	Dinkes
				Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Dinas Kesehatan dan Unit Kerja Dinas Kesehatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK)	%	60		60		60		60		
				Persentase pemenuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas Kecamatan	%	89		89		89		89		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pemenuhan kriteria penyelenggara pelatihan bidang kesehatan berskala nasional	%	60		60		60		60		
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	45	383.208.906	45	384.467.544	45	384.467.544	45	275.968.307	Dinkes
				Persentase sarana alat kesehatan yang memenuhi ketentuan cara pengelolaan dan distribusi alat kesehatan yang baik	%	45		45		45		45		
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	69		69		69		69		
	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase keluarga yang terdata melalui Carik Jakarta yang berhasil dimutakhirkan	%	92	16.882.981.991	92	8.596.093.683	92	8.886.531.183	92	8.558.052.429	Dinas PPAPP
	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,5	1.621.485.470	22,5	1.844.110.457	22,5	1.844.110.457	22,5	1.871.716.269	Dinas PPAPP
	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda hasil binaan yang berprestasi dalam bidang yang ditentukan	%	50	22.619.861.842	50	22.605.165.400	50	22.605.165.400	50	22.433.254.980	Dispora
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	65	322.332.967	65	274.732.326	65	274.732.326	65	268.141.362	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	91	411.587.341.511	91	719.281.416.840	91	719.281.416.840	91	1.144.204.362.255	Dispora
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	%	80	1.148.595.855	80	488.108.185	80	488.108.185	80	493.343.485	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase anggota kepramukaan yang meningkat kapasitasnya	%	2,18	4.465.733.455	2,18	4.465.204.841	2,18	4.465.204.841	2,18	4.361.681.548	Dispora
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	%	5	198.717.328	5	202.013.613	5	202.013.613	5	202.013.613	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Proporsi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) aktif	%	62	705.700.440	62	705.798.455	62	705.798.455	62	528.938.455	Dinkes
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) melaksanakan revitalisasi pelayanan	Unit	88		88		88		88		
	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase masyarakat (keluarga) yang memperoleh informasi program Bangsa Kencana dengan cara memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan	%	58,6	2.072.020.088	58,6	8.432.806.602	58,6	8.432.806.602	58,6	9.060.007.967	Dinas PPAPP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Keluarga (Bangga Kencana) melalui media dan petugas.										
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	13,8		13,8		13,8		13,8		
				Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	58,99		58,99		58,99		58,99		
				Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20,85		20,85		20,85		20,85		
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang Komprehensif Dengan Pendekatan Siklus Kehidupan (Continuum of Care)	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks	3	6.239.109.542.246	3	6.337.449.788.227	3	6.305.148.372.969	3	6.445.381.915.747	Dinkes
3.3	Menurunnya Kesenjangan dan Pembangunan Responsif Gender			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,14		95,14		95,14		95,14		
	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD dan lembaga masyarakat yang melaksanakan PUG dan pemberdayaan perempuan	%	75	2.229.540.730	75	2.284.740.730	75	2.284.740.730	75	2.459.563.794	Dinas PPAPP
	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	14.583.427.637	100	17.299.716.644	100	17.128.320.644	100	16.617.221.664	Dinas PPAPP
	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan kepada perempuan dan anak dalam keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	%	20	3.350.742.296	20	3.196.817.540	20	3.196.817.540	20	1.783.470.000	Dinas PPAPP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase keluarga yang diintervensi permasalahan kesenjangan gender dan anak	%	100	7.855.000	100	7.855.000	100	7.855.000	100	97.635.000	Dinas PPAPP
	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya melalui pemenuhan indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60	509.239.600	60	1.076.394.905	60	1.076.394.905	60	908.299.229	Dinas PPAPP
	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus melalui lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk memenuhi indikator Klaster 5 Kabupaten/Kota Layak Anak	%	77	2.093.458.980	77	2.028.221.547	77	2.198.817.547	77	2.198.817.547	Dinas PPAPP
3.4	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat			Indeks Demokrasi	Indeks	77,07		82,13		82,13		82,13		
	Peningkatan Efektivitas Layanan dan Fasilitasi Lembaga Legislatif	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	4	370.637.080.453	4	473.219.552.144	4	473.219.519.590	4	428.800.964.648	Sekretariat DPRD
	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	51	16.652.829.371	51	17.109.494.492	51	17.109.494.492	51	17.174.288.192	Bakesbangpo I
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Lingkup Kabupaten	%	***	***	***	***	***	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan di Wilayah Yang Optimal			Administrasi Kepulauan Seribu										
	Peningkatan Partisipasi Pemilu	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik, etika dan budaya politik serta peningkatan peran partai politik	%	51	746.012.416.222	51	746.716.329.051	51	746.716.329.051	51	747.850.644.051	Bakesbangpo I
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Pendidikan Politik, Etika dan Budaya Politik Serta Peningkatan Peran Partai Politik Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	***	***	***	***	***	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tingkat pemahaman organisasi kemasyarakatan terkait peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	%	51	9.788.004.590	51	9.752.196.664	51	9.752.196.664	51	10.099.039.624	Bakesbangpo I
	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	51	1.484.935.702	51	1.880.829.888	51	1.880.829.888	51	2.083.199.664	Bakesbangpo I

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembinaan Ideologi, Kerukunan, Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Bebas Dari Segala Ancaman	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait kewaspadaan dini, penanganan konflik, dan pemantauan orang asing	%	51	153.884.057.466	51	153.883.491.086	51	153.870.756.086	51	154.338.566.086	Bakesbangpo I
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik, dan Pemantauan Orang Asing Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	%	***	***	***	***	***	***	***	***	Kab. Adm. Kep. Seribu - Kep. Seribu
4.	Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83		83		83		83		
4.1	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,6		91,08		91,08		91,08		
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	99	65.618.827.192	99	63.757.787.697	99	63.757.787.697	99	71.737.400.500	Dinas Dukcapil
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	99,75	6.878.390.657	99,75	6.254.522.640	99,75	6.254.522.640	99,75	6.410.973.600	Dinas Dukcapil
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	%	100	329.167.443	100	328.156.506	100	328.156.506	100	328.156.506	Dinas Dukcapil
	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin tepat waktu	%	100	152.439.904.524	100	144.846.916.306	100	144.846.916.306	100	143.080.088.337	Dinas PMPTSP

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi serta sistem data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Indeks	88	17.379.360.730	88	17.399.505.340	88	17.399.505.340	88	16.773.782.238	Dinas PMPTSP
	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan Daerah, Kapabilitas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan yang Diawasi dan Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase ketersediaan arsip siap layan	%	39,36	19.561.036.533	39,36	21.695.431.168	39,36	21.695.431.168	39,36	21.945.835.496	Dispusip
				Persentase lembaga (OPD,BUMD) yang mengelola arsip sesuai dengan NSPK	%	74,07		74,07		74,07		74,07		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	%	30	57.081.639	30	57.046.969	30	57.046.969	30	57.046.969	Kab. Adm. Kep. Seribu
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	2.822.441.612	4	2.533.275.174	4	2.533.275.174	4	2.563.025.174	Kota Adm. Jakpus
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	1.705.983.924	4	1.458.354.046	4	1.458.354.046	4	1.438.545.786	Kota Adm. Jakut

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jakarta Utara yang Optimal													
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	3.299.719.085	4	3.126.309.248	4	3.126.309.248	4	2.672.847.675	Kota Adm. Jakbar
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	3.320.142.783	4	3.092.087.805	4	3.092.087.803	4	3.126.570.619	Kota Adm. Jaksel
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	7.971.548.637	4	7.673.179.918	4	7.673.117.313	4	7.428.443.731	Kota Adm. Jaktim
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketertiban umum	Indeks	4	509.388.886	4	484.093.108	4	484.093.108	4	484.093.108	Kab. Adm. Kep. Seribu
	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	92,86	1.297.638.296	92,86	2.174.981.201	92,86	2.174.981.201	92,86	2.113.931.201	Dinas Dukcapil

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perundang-undangan		Administrasi Kependudukan											
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	78.464.728.234	4	80.782.559.268	4	80.831.535.809	4	80.760.351.395	Kota Adm. Jakpus
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	97.115.281.247	4	94.075.997.465	4	94.075.997.465	4	92.276.522.160	Kota Adm. Jakut
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	102.964.202.540	4	103.374.460.246	4	103.423.432.111	4	102.625.318.435	Kota Adm. Jakbar
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	115.123.046.997	4	115.046.916.964	4	115.125.916.258	4	114.420.323.678	Kota Adm. Jaksel
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik dan RPTRA	Indeks	4	136.059.434.344	4	140.571.596.056	4	140.669.587.487	4	139.072.508.822	Kota Adm. Jaktim

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal													
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	Indeks	4	6.855.686.765	4	7.126.537.472	4	7.175.537.472	4	7.086.110.790	Kab. Adm. Kep. Seribu
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	364.099.081.391	4	360.728.853.673	4	360.826.541.741	4	356.502.344.101	Kota Adm. Jakpus
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	432.027.884.117	4	428.689.045.944	4	428.822.471.972	4	422.387.055.544	Kota Adm. Jakut
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	530.247.503.662	4	528.106.635.928	4	528.204.631.009	4	516.856.798.477	Kota Adm. Jakbar
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi	7.01.02		Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan	Indeks	4	571.948.265.948	4	568.616.956.931	4	568.684.826.691	4	556.786.350.294	Kota Adm. Jaksel

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang Optimal		Program Pengelolaan Kecamatan	(penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)										
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	645.300.207.901	4	641.177.750.730	4	641.226.472.863	4	627.295.273.769	Kota Adm. Jaktim
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks kepuasan terhadap pengelolaan kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	Indeks	4	42.044.141.738	4	42.046.168.867	4	42.095.166.839	4	40.935.045.505	Kab. Adm. Kep. Seribu
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan PPSU	Indeks	4		4		4		4		
4.2	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Manajemen Kota Cerdas			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,50		4,21		4,21		4,21		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	%	100	58.440.770.111	100	62.553.786.427	100	62.553.786.427	100	64.849.022.541	Diskominfotik
	Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah pemenuhan layanan teknologi informatika dan komunikasi	Perangkat Daerah	51	332.732.144.747	51	574.168.614.157	51	574.168.599.339	51	559.483.537.299	Diskominfotik
	Peningkatan Penggunaan Data dalam Proses Perencanaan	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas	%	100	4.610.254.546	100	8.110.929.674	100	8.110.929.674	100	7.883.316.582	Diskominfotik

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pembangunan di Daerah													
	Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	%	98	9.415.871.625	98	8.514.626.840	98	8.514.626.840	98	8.041.176.320	Diskominfo
4.3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah			Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	84 (A)		84 (A)		84 (A)		84 (A)		
				Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	75		75		75		75		
	Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	4.01.02	Program Penataan Organisasi	Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan dan penguatan organisasi	Nilai	7,2	940.812.522	7,2	877.387.740	7,2	877.387.740	7,2	1.078.192.740	Biro ORB
				Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai	12,12		12,12		12,12		12,12		
				Nilai PMPRB pada lingkup area perubahan manajemen perubahan	Nilai	4,85		4,85		4,85		4,85		
	Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	4.01.05	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang diundangkan	%	90	2.751.776.131	90	2.507.510.483	90	2.507.510.483	90	2.361.091.463	Biro Hukum
				Persentase penanganan perkara litigasi yang diselesaikan	%	100		100		100		100		
				Persentase penanganan perkara non litigasi yang diselesaikan	%	100		100		100		100		
				Nilai capaian pelaksanaan aksi HAM daerah	Nilai	92		92		92		92		
	Meningkatkan Kualitas	5.01.02	Program Perencanaan,	Nilai komponen perencanaan	Nilai	80	14.596.637.961	80	24.412.149.723	80	24.412.149.723	80	25.101.995.948	Bappeda

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)		Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	pembangunan lingkup provinsi pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah										
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan pada indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai	80		80		80		80		
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai komponen perencanaan pembangunan daerah lingkup perangkat daerah	Nilai	80	3.726.085.526	80	3.509.672.562	80	3.509.672.562	80	3.537.072.562	Bappeda
				Nilai komponen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan lingkup perangkat daerah	Nilai	80		80		80		80		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian TL LHP internal dan eksternal	%	92	58.069.091.662	92	53.934.431.002	92	53.934.430.955	92	40.285.542.455	Inspektorat
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	3,5	16.263.442.312	3,5	17.043.329.533	3,5	17.043.329.533	3,5	20.046.265.796	Inspektorat
	Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan sesuai dengan peraturan	%	100	149.185.260	100	145.136.400	100	145.136.400	100	145.136.400	Biro Perkeu
4.4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel			Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP		3		3		3		
	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02	Program Pengelolaan	Persentase akurasi dan penyelesaian dokumen APBD	%	100	1.737.171.868.184	100	1.692.689.141.104	100	2.787.728.711.446	100	1.939.745.496.927	BPKD

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Pruden dan Berkelanjutan		Kuangan Daerah	Persentase pengelolaan pelaksanaan APBD	%	100		100		100		100		
				Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100		100		100				
	Perbaikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Menerapkan Prinsip Value For Money	4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	85	7.102.223.072	85	6.940.691.102	85	6.940.691.102	85	3.571.874.195	BPPBJ
	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pruden dan Berkelanjutan	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan standar harga tepat waktu	%	100	2.089.729.500	100	2.016.377.940	100	2.016.377.940	100	1.993.002.940	BPKD
	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset, Penagihan Piutang, Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	%	15	86.501.839.533	15	94.803.095.345	15	94.802.874.717	15	99.883.974.966	BPAD
				Indeks kepatuhan tertib aset	Indeks	4		4		4		4		
				Persentase aset daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset	%	100		100		100		100		
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	156.437.761.302	100	221.965.291.888	100	222.569.283.284	100	228.783.837.692	Bapenda
				Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah	%	100		100		100		100		
	4.5	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur			Indeks Sistem Merit	Indeks	335,5		350,5		350,5		350,5	
Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem informasi serta perlindungan dan pelayanan pada indeks sistem merit	Nilai	110	28.679.695.546	110	28.527.024.200	110	43.638.348.597	110	47.458.810.847	BKD

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Nilai aspek promosi dan mutasi pada indeks sistem merit	Nilai	37,5		37,5		37,5		37,5		
				Nilai aspek pengembangan karir pada indeks sistem merit	Nilai	59,53		59,53		59,53		59,53		
				Nilai aspek manajemen kinerja serta penggajian, penghargaan dan disiplin pada indeks sistem merit	Nilai	112,5		112,5		112,5		112,5		
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	Indeks	3	18.122.553.215	3	39.000.000	3	39.000.000	3	17.620.528.771	Kab. Adm. Kep. Seribu
	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai tugas belajar yang lulus tepat waktu	%	100	39.000.000	100	17.090.017.169	100	17.090.002.989	100	39.000.000	BPSDM
	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS	Nilai	6	46.311.961.055	6	42.439.525.772	6	42.439.525.272	6	33.423.830.751	BPSDM
				Nilai sistem merit pada sub aspek ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	Nilai	10		10		10		10		
				Nilai sistem merit pada sub aspek	Nilai	7,5		7,5		7,5		7,5		

No	Sasaran	Kode	Program Prioritas	Indikator Kinerja		RKPD 2024		Penetapan APBD 2024		Pergeseran II APBD 2024		Perubahan RKPD 2024		Perangkat Daerah
				Indikator	satuan	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan										
				Nilai sistem merit pada sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	Nilai	7,5		7,5		7,5		7,5		
				Persentase diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan	%	62		62		62		62		

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

Keterangan:

- * Program tidak menggunakan APBD
- ** Didukung oleh anggaran Program Penunjang
- *** Perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah
- **** Tidak memiliki data kinerja (N/A)

5.3 Penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah

Merupakan pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 10 Biro Sekretariat Daerah. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 137 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.390.559.999.564 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 43 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.390.907.436.805 atau 1,88% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sekretariat Daerah	1.389.277.405.565	1.390.559.999.564	1.390.907.436.805	1,88

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Merupakan pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 63 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.806.856.139.792 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 38 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.804.836.585.709 atau 1,05% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40603000	Sekretariat DPRD	806.861.502.122	806.856.139.792	804.836.585.709	1,05

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

3. Inspektorat

Merupakan unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 103 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.241.644.585.752 dan pada Perubahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 19 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.241.644.020.133 atau 0,32% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40604000	Inspektorat	241.644.585.799	241.644.585.752	241.644.020.133	0,32

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

4. Dinas Pendidikan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 881 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.066.706.016.252

dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 405 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.17.913.236.140.648 atau 23,48% dari total pagu belanja daerah

Tabel 5.5
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10101000	Dinas Pendidikan	17.014.321.719.186	17.066.706.016.252	17.913.236.140.648	23,48

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

5. Dinas Kesehatan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 1573 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.496.172.877.104

dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 602 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.10.924.236.008.183 atau 14,32% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10201000	Dinas Kesehatan	10.528.474.292.362	10.496.172.877.104	10.924.236.008.183	14,32

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

6. Dinas Bina Marga

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 76 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.2.449.788.998.322 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 27 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.2.579.735.102.384 atau 3,38% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.7
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Bina Marga Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10301000	Dinas Bina Marga	2.449.760.562.322	2.449.788.998.322	2.579.735.102.384	3,38

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

7. Dinas Sumber Daya Air

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 145 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.4.003.280.590.235 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 53 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.4.636.041.648.794 atau 6,08% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10302000	Dinas Sumber Daya Air	4.003.280.590.235	4.003.280.590.235	4.636.041.648.794	6,08

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

8. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Urusan Pemerinatahan Bidang Pertanahan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024

terdapat 100 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.315.572.466.033 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 15 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.313.862.570.567 atau 1,72% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10303000	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1.314.576.787.133	1.315.572.466.033	1.313.862.570.567	1,72

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

9. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 190 Sub

Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.443.311.962.091 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 46 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.426.014.663.369 atau 1,87% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.10
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10402000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.443.311.962.091	1.443.311.962.091	1.426.014.663.369	1,87

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

10. Satuan Polisi Pamong Praja

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 130 Sub

Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.216.115.276.348 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 34 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.216.096.563.498 atau 1,59% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.11
Rekapitulasi Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10501000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.216.115.276.348	1.216.115.276.348	1.216.096.563.498	1,59

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 11. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 224 Sub
- Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.285.059.823.665 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 36 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.270.450.532.957 atau 1,67% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.12
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10501000	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	1.285.059.823.665	1.285.059.823.665	1.270.450.532.957	1,67

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 12. Dinas Sosial**

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 547 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.562.287.828.890
- dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 149 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.463.157.682.565 atau 1,92% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10601000	Dinas Sosial	1.562.092.375.621	1.562.287.828.890	1.463.157.682.565	1,92

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 13. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi**

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024
- terdapat 297 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.450.270.201.305 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 76 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.468.478.140.982 atau 0,61% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.14
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20101000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	449.771.592.080	450.270.201.305	468.478.140.982	0,61

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

14. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 412 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.707.780.854.956 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 83 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.688.347.278.008 atau 0,90% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20201000	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	707.154.264.923	707.780.854.956	688.347.278.008	0,90

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

15. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pertanian. Pada Pergeseran Kedua

APBD Tahun 2024 terdapat 237 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.110.148.581.106 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 41 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.098.476.668.733 atau 1,44% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20301000	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.110.148.586.476	1.110.148.581.106	1.098.476.668.733	1,44

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

16. Dinas Lingkungan Hidup

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Lingkungan

Hidup. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 199 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.4.117.851.172.639 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak

50 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.4.400.856.439.773 atau 5,77% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.17
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20502000	Dinas Lingkungan Hidup	4.121.663.987.885	4.117.851.172.639	4.400.856.439.773	5,77

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024

terdapat 169 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.478.740.781.882 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 43 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.437.049.890.998 atau 0,57% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.18
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20601000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	429.031.429.808	478.740.781.882	437.049.890.998	0,57

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

18. Dinas Perhubungan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perhubungan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 351 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.6.302.104.194.751 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 73 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.7.117.814.761.994 atau 9,33% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20901000	Dinas Perhubungan	6.299.041.197.529	6.302.104.194.751	7.117.814.761.994	9,33

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Statistik, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Persandian. Pada Pergeseran Kedua

APBD Tahun 2024 terdapat 115 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.770.432.735.128 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 16 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.756.590.546.490 atau 0,99% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21001000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	770.432.749.946	770.432.735.128	756.590.546.490	0,99

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 98 Sub Kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.785.129.680.007 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 7 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.781.986.823.028 atau 1,02% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21201000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	780.942.844.624	785.129.680.007	781.986.823.028	1,02

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

21. Dinas Pemuda dan Olahraga

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 240 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.124.732.793.821 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 69 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.550.001.311.033 atau 2,03% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21301000	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1.124.652.499.769	1.124.732.793.821	1.550.001.311.033	2,03

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

22. Dinas Kebudayaan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kebudayaan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 253 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.449.858.341.970 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 19 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.453.381.160.257 atau 0,59% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21601000	Dinas Kebudayaan	449.983.673.083	449.858.341.970	453.381.160.257	0,59

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kearsipan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024

terdapat 173 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.611.266.713 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 29 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.267.485.535.426 atau 0,35% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.24
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21701000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	272.697.101.664	272.611.266.713	267.485.535.426	0,35

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

24. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Pariwisata. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 183 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.397.761.288.541 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 34 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.408.804.219.838 atau 0,54% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30204000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	397.855.835.737	397.761.288.541	408.804.219.838	0,54

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

25. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Kehutanan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 117 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.302.723.837.931 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 17 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.293.709.390.885 atau 1,70% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.26
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30401000	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1.302.726.081.943	1.302.723.837.931	1.293.709.390.885	1,70

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

26. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Merupakan pelaksana Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perdagangan, Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Perindustrian, dan Bidang Urusan Bidang Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 202 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.371.213.331.473 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 53 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.357.630.549.755 atau 0,47% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21101000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	371.213.530.090	371.213.331.473	357.630.549.755	0,47

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 161 Sub Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.169.741.127.507 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 40 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.184.221.285.889 atau 0,24% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40101000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	170.183.816.044	169.741.127.507	184.221.285.889	0,24

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

28. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 106 Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.2.915.108.711.354 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 34 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.2.072.271.835.534 atau 2,72% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.29
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40201000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.820.069.141.012	2.915.108.711.354	2.072.271.835.534	2,72

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

29. Badan Pendapatan Daerah

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 69 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.480.071.203.529

dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 19 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.473.966.116.290 atau 1,93% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.30
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40203000	Badan Pendapatan Daerah	1.479.329.602.695	1.480.071.203.529	1.473.966.116.290	1,93

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

30. Badan Pengelolaan Aset Daerah

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 123 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.337.442.230.364 dan

pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 37 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.430.824.543.004 atau 0,56% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.31
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengelolaan Aset Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40202000	Badan Pengelolaan Aset Daerah	337.589.228.236	337.442.230.364	430.824.543.004	0,56

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

31. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 14 Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.29.938.725.841 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 2 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.28.565.976.001 atau 0,04% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.32
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40606000	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	29.938.725.841	29.938.725.841	28.565.976.001	0,04

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

32. **Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa**

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 22 Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.102.492.814.925 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 8 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.100.011.402.127 atau 0,13% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.33
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40605000	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	102.239.404.079	102.492.814.925	100.011.402.127	0,13

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

33. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 37 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.137.926.358.287 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 17 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.117.746.941.892 atau 0,15% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.34
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40302000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	138.005.520.092	137.926.358.287	117.746.941.892	0,15

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

34. **Badan Kepegawaian Daerah**

Merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 97 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.887.765.517 dan

pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 22 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.201.939.932.023 atau 0,26% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.35
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40301000	Badan Kepegawaian Daerah	185.268.241.120	200.887.765.517	201.939.932.023	0,26

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Merupakan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 46 Sub Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.128.993.503.966 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 11 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.128.416.648.598 atau 0,17% dari total pagu belanja daerah

Tabel 5.36
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10503000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.993.503.966	128.993.503.966	128.416.648.598	0,17

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merupakan Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 166 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.990.496.397.777 dan

pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 7 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.989.712.529.213 atau 1,30% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.37
Rekapitulasi Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40501000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	990.383.087.905	990.496.397.777	989.712.529.213	1,30

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

37. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Merupakan Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 1.396 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.773.600.153.280 dan pada Perubahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 198 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.775.856.594.178 atau 1,02% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.38
Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50110000	Kota Administrasi Jakarta Pusat	773.301.068.379	773.600.153.280	775.856.594.178	1,02

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 38. Kota Administrasi Jakarta Utara**

Merupakan Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 1.015 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.823.136.751.274 dan pada Perubahan
- Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 162 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.814.732.688.529 atau 1,07% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.39
Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50120000	Kota Administrasi Jakarta Utara	822.971.099.822	823.136.751.274	814.732.688.529	1,07

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 39. Kota Administrasi Jakarta Barat**

Merupakan Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 1.730 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.038.743.866.877 dan pada
- Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 307 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.026.621.681.160 atau 1,35% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.40
Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50130000	Kota Administrasi Jakarta Barat	1.038.189.259.778	1.038.743.866.877	1.026.621.681.160	1,35

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 40. Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Merupakan Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 2.024 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.208.554.252.256 dan pada
- Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 473 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.205.817.207.243 atau 1,58% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.41
Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50140000	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.208.268.536.871	1.208.554.252.256	1.205.817.207.243	1,58

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 41. Kota Administrasi Jakarta Timur**

Merupakan Unsur Kekhususan Kota Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 1.945 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.328.022.713.990 dan pada
- Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 590 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.1.285.140.059.870 atau 1,68% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.42
Rekapitulasi Perubahan Renja Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50150000	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.327.511.432.429	1.328.022.713.990	1.285.140.059.870	1,68

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

- 42. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**

Merupakan Unsur Kekhususan Kabupaten Administrasi. Pada Pergeseran Kedua APBD Tahun 2024 terdapat 272 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
- Rp.206.816.842.140 dan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sub Kegiatan yang berubah sebanyak 44 dengan alokasi pagu indikatif sebesar Rp.202.215.291.295 atau 0,27% dari total pagu belanja daerah.

Tabel 5.43
Rekapitulasi Perubahan Renja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kode	Perangkat Daerah	APBD (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Perubahan Renja PD (Rp)	Persentase Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50160000	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	206.663.436.253	206.816.842.140	202.215.291.295	0,27

Sumber: Sistem Smart Planning Budgeting (SPB), 2024 (diolah)

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 didasari oleh perubahan dinamika baik dalam tataran global, nasional, maupun regional, yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak bagi pembangunan di DKI Jakarta. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 juga menjadi pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjaga konsistensi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024 yang sejalan dengan RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Konsistensi sebagaimana dimaksud juga berlaku pada tema pembangunan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024, yaitu **“Transformasi Jakarta sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Indonesia”**.

Mendasar pada tema di atas, Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tetap difokuskan untuk menyelesaikan 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

- a. Penanggulangan Banjir;
- b. Penanganan Kemacetan;
- c. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
- d. Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Percepatan Penurunan Stunting; dan
- f. Penguatan Nilai Demokrasi.

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2024 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
- b. Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024;
- c. Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024;
- d. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat DKI Jakarta; dan
- e. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen serta sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian.

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



bappeda.jakarta.go.id



sekretariat.bappeda@jakarta.go.id



Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Jl. Merdeka Selatan No.8-9 Gedung Blok G Lt.2
Jakarta Pusat 10110